



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI PARTAI
POLITIK DALAM MENJARING CALON ANGGOTA
LEGISLATIF PEREMPUAN
(Studi Kasus : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)**

TESIS

IBNU SOEPRIO

0706184115

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI PARTAI
POLITIK DALAM MENJARING CALON ANGGOTA
LEGISLATIF PEREMPUAN
(Studi Kasus : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Komunikasi**

IBNU SOEPRIMO

0706184115

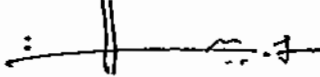
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ILMU KOMUNIKASI
JAKARTA
JUNI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ibnu Soeprijo

NPM : 0706184115

Tanda Tangan : 

Tanggal : 30 Juni 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ibnu Soeprijo
NPM : 0706184115
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Tesis : Evaluasi Strategi Komunikasi Partai Politik dalam
Menjaring Calon Anggota Legislatif Perempuan
(Studi Kasus : Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Kekhususan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Eduard Lukman, MA (.....
Ketua Sidang: Dr. Billy K Sarwono, MA (.....
Penguji Ahli : Henry Faisal Noor SE., MBA (.....
Sekretaris : Ir. Firman Kurniawan, M.Si (.....

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal : 30 Juni 2009

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa atas berkat, rahmat dan ridhoNya, Penulis dapat menyelesaikan karya akhir ini dengan baik tepat pada waktunya. Bagi Penulis penyusunan karya akhir ini bukanlah hal yang mudah, dan Penulis merasa telah belajar banyak dari setiap langkah penyusunannya. Penulis sadar betul, bahwa tidak mungkin Penulis bisa menyelesaikan semua ini tanpa bantuan Tuhan YME melalui orang-orang di sekitar Penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuannya sehingga semua ini bisa terwujud.

Pada kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Penulis, Bapa dan Ibu yang telah mencurahkan kasih sayang dan memberikan panduan setiap langkah dalam hidup ini, juga kepada seluruh keluarga. Penulis juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih secara khusus kepada Istri tercinta yang memberikan dukungan moril, materiil dan Anakku (RGK) yang memberikan motivasi khusus sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan karya akhir ini. Untuk itu perkenankanlah peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Deddy N. Hidayat, Ph.D selaku Ketua Program Studi
2. Bapak Drs. Eduard Lukman, MA selaku pembimbing dari Reading Course hingga Tesis, yang sabar dan telaten serta banyak memberikan pencerahan, arahan, bimbingan dan pengertian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Billy K Sarwono, MA selaku Ketua Sidang.
4. Bapak Ir. Firman Kurniawan Sujono, M.Si selaku Sekretaris Sidang
5. Bapak Henry Faisal Noor, SE., MBA selaku Penguji Ahli
6. Seluruh Staf Pengajar, Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia kampus Salemba yang telah membuka wawasan saya mengenal lebih dalam ilmu komunikasi, Staf

Administrasi dan Staf Perpustakaan yang membantu dalam hal aktivitas selama perkuliahan.

7. Mustopa sebagai teman diskusi dan Tan-Sri Zulfikar yang mengenalkan dan mengajak saya masuk ke partai politik.
8. Seluruh keluarga besar Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi, khususnya angkatan 2007, yang selalu bersama dan tulus serta kompak dalam kegiatan belajar bersama serta setiap kegiatan perkuliahan, semoga hal ini selalu terjaga sampai kapanpun.
9. Keluarga Besar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) khususnya Ibu Ketua Umum (Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono) dan Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang telah memberikan kemudahan memperoleh data dan informasi.
10. Dr. Eko Harisusanto, Supratman M.Si, Dr. Sumardi Dahlan yang telah mendorong untuk mengambil studi dan memperdalam Ilmu Komunikasi.
11. Ibu Meutia Hatta Swasono, Ibu Eni Bushiri, Bapak Haidar HS., Ibu Chusnul Ma'riyah, Ibu Yety, yang telah bersedia menjadi nara sumber.
12. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar betul bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu dengan kerendahan hati Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin terkandung dalam tulisan ini. Semoga hasil karya akhir ini berguna bagi perkembangan ilmu komunikasi dan penelitian lain yang ingin memperdalam topik ini.

Salemba, 30 Juni 2009

Ibnu Soeprijo

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibnu Soeprijo
NPM : 0706184115
Program : Pascasarjana
Departemen : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Evaluasi Strategi Komunikasi Partai Politik dalam Menjaring Calon Anggota Legislatif Perempuan (Studi Kasus : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)**.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2009
Yang menyatakan

Ibnu Soeprijo

ABSTRAK

Nama : Ibnu Soeprijo
NPM : 0706184115
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul : Evaluasi Strategi Komunikasi Partai Politik dalam
Menjaring Calon Anggota Legislatif Perempuan
(Studi Kasus : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)

(i-xiii)1-109 Halaman : 42 buku (1984-2008); 6 Dokumen; 5 Jurnal; 5 Tesis; 2 Koran; 8 Alamat Web.

Tesis ini membahas evaluasi strategi komunikasi PKP INDONESIA dalam menjaring calon anggota legislatif perempuan. Kekuatan dan kendala dalam menjaring calon anggota legislatif perempuan pada pemilu 2009. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Visi dan Misi serta infrastruktur menjadi strategi mendasar bagi PKP INDONESIA, Faktor Meutia Hatta menjadi kekuatan partai ini kemudian Faktor kendala kurang minatnya kaum perempuan menjadi calon anggota legislatif. Penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan kebijakan yang lebih kongkrit, keterbukaan dalam proses penjaringan, dan pendidikan politik khususnya terhadap perempuan yang menjadi calon anggota legislatif agar strategi komunikasi partai politik dapat mencapai hasil yang maksimal.

Kata Kunci :
Strategi, figur, perempuan, infrastruktur.

ABSTRACT

Name : Ibnu Soeprijo
NPM : 0706184115
Study Program: Ilmu Komunikasi
Title : Evaluation Communication Strategy Party Politics in selectivity
Candidate Member Legislative Women
(Case Studies: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)

(i-xiv)1-109 Pages : 42 book (1984-2008); 6 Document; 5 Journal; 5 Thesis; 2
Newspaper; 8 Web Address.

This thesis discusses the strategy of evaluation in communication PKP INDONESIA member legislative candidates encompass women. Strengths and potential obstacles in the selectivity of women members in the legislative elections in 2009. The approach of this research is descriptive qualitative research. Results of this research concluded that the Vision and Mission and infrastructure to become a fundamental strategy for PKP INDONESIA, Mrs. Meutia Hatta factor into the strength of this party and then less interest factor constraints of women to become candidates for legislative members. Research suggests that this policy needed a more concrete, crawl in the process of scrutiny, and political education, especially against women who become candidate members of legislative communication strategy so that political parties can achieve maximum results.

Keywords:
Strategy, figures, women's, infrastructure.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	1
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	12
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Signifikansi Penelitian	15
1.5. Signifikansi Penulisan	17
2. KERANGKA KONSEPTUAL	17
2.1. Komunikasi Politik	19
2.2. Komunikasi Pemasaran	23
2.3. Political Marketing	23
2.3.1. Definisi Political Marketing	24
2.3.2. Politik dan Segmentasi Pasar	28
2.3.3. Market Oriented Party	31
2.4. Kampanye Politik	32
2.5. Partai Politik	36
2.5.1. Calon Legislatif	38
2.5.1.1. Syarat-syarat Calon Legislatif	39
2.5.2. Kebijakan Internal dan Seleksi Calon Legislatif	41
2.4.3. Politik dalam Perspektif Perempuan	47
3. METODOLOGI	47
3.1. Metoda Penelitian	49
3.2. Analisis Data	50
3.3. Obyek Penelitian	50
3.4. Unit Analisis	51
3.5. Pengumpulan Data	52
3.6. Kerangka Evaluasi	56
3.7. Keabsahan Penelitian	57
3.6. Keterbatasan dan Kelemahan Penelitian	58
4. DATA, FAKTA DAN ANALISA	58
4.1. Latar Belakang Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	58

4.2. Strategi Komunikasi PKP INDONESIA	80
4.2.1. Langkah-langkah Kebijakan	82
4.2.2. Langkah-langkah Strategi	87
4.2.3. Target Persentase Kuota Perempuan	90
4.3. Kekuatan PKP INDONESIA	92
4.3.1. Faktor Figur dan Infrastruktur	94
4.4. Kendala PKP INDONESIA	97
5. KESIMPULAN DAN SARAN	101
5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran	102
DAFTAR REFERENSI	104



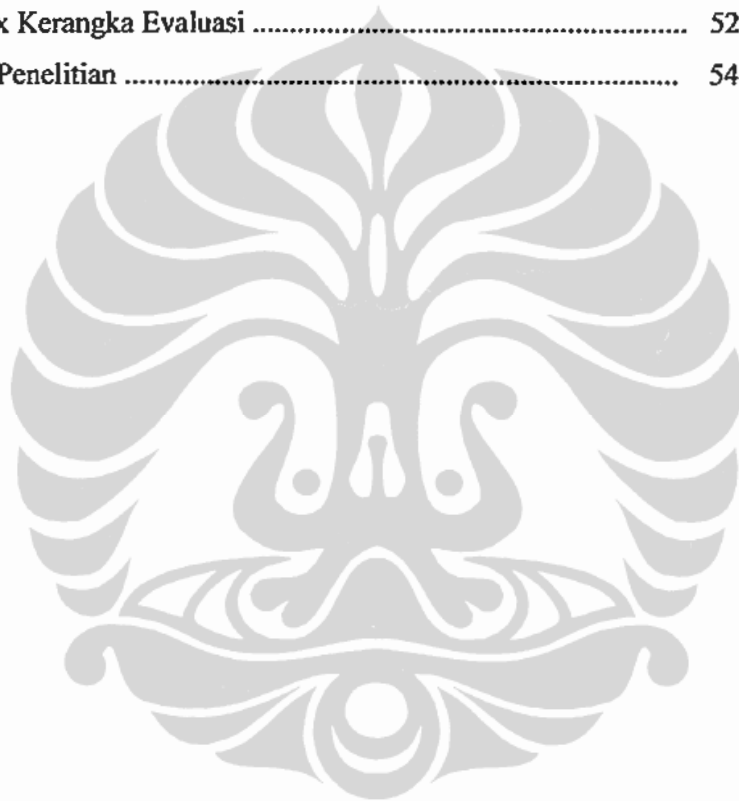
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peran-Peran dalam Institusi DPN PKP INDONESIA 79



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Calon Legislatif Perempuan Periode 2009-2014	8
Tabel 2.1. Segmen-Segmen dalam Market Politik	25
Tabel 2.2. Pasal-Pasal Penjamin Keterlibatan Perempuan Dalam Politik ..	45
Tabel 3.1. Matrix Kerangka Evaluasi	52
Tabel 3.2. Reka Penelitian	54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Wawancara dengan Ketua Umum PKP INDONESIA Meutia Hatta Swasono.
- Lampiran 2. Wawancara dengan Ketua Tim Penjaringan Calon Anggota Legislatif Haidar H.S.
- Lampiran 3. Wawancara dengan Wakil Ketua Dewan Penasehat Khusus Bidang Perempuan PKP INDONESIA Eni Bushiri
- Lampiran 4. Wawancara dengan Pengamat Politik Perempuan dan Pengajar pada Fakultas Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Indonesia Chusnul Mari'yah
- Lampiran 5. Wawancara dengan Caleg DPR RI Perempuan Yety Ani Ethika
- Lampiran 6. Daftar Peserta Partai Politik Pemilu 2009



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada data pusat statistik tahun 2000, menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Indonesia hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki, tetapi di tinjau dari kelompok umur dua puluh sampai duapuluh sembilan tahun (20-29 tahun) menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki (<http://www.bps.go.id>). Selanjutnya bagi bangsa Indonesia yang presentasi penduduk perempuannya berimbang dengan laki-laki, sudah saatnya banyak melibatkan perempuan dalam posisi yang strategis khususnya dalam bidang politik (Fauzi, 2002, 113).

Pemilihan Umum (Pemilu) 5 April 2004, telah menghasilkan jumlah anggota legislatif perempuan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebanyak enam puluh tiga (63) orang dari lima ratus lima puluh (550) kursi yang tersedia atau sebelas koma empat puluh lima persen (11,45%), Sementara itu, dalam Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi, hanya ada empat puluh lima (45) perempuan dari lima ratus (500) anggota DPR RI yang terpilih atau sembilan persen (9%) (<http://www.kpu.go.id>).

Kecilnya persentase jumlah anggota legislatif perempuan ini di karenakan partisipasi perempuan dalam dunia politik khususnya partai politik masih sangat sedikit, Hal ini disebabkan bukan karena kecilnya representasi kaum perempuan, tetapi karena lambatnya proses perubahan. Hal ini di karenakan adanya bahwa keikutsertaan kaum perempuan dalam partai politik akan membawa dampak buruk yaitu ketidakstabilan dalam keluarga, sehingga kaum laki-laki atau para elit partai sendiri enggan untuk memberikan tempat bagi perempuan di dalam partai politik (Faturahman dan Sobari, 2002,88).

Sejarah representasi perempuan dalam parlemen Indonesia tidak begitu saja muncul dengan sendirinya, tetapi merupakan proses perjuangan

panjang bagi para perempuan untuk memasuki dunia politik. Kongres perempuan Indonesia pertama yang diadakan pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta, Tema pokok Kongres adalah menggalang persatuan dan kesatuan antara organisasi wanita Indonesia yang pada waktu itu masih bergerak sendiri-sendiri. Kongres ini telah berhasil membentuk badan federasi organisasi wanita yang mandiri dengan nama "Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia" di singkat PPPI. Kongres ini menjadi titik tolak dari semangat para perempuan untuk memperbaiki kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi, sosial budaya maupun politik. Kongres itu menjadi sebuah forum dimana berbagai kelompok etnis, agama dan bahasa bersatu mendeklarasikan kebangkitan perempuan (<http://kowanj.or.id/>).

Kemudian Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik, telah memiliki dasar konstitusional yang kuat. Ketentuan Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 menyebutkan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan sama dalam mencapai persamaan dan keadilan (Dok. Internal PKP INDONESIA 2008). Kemudian wacana mengenai keterwakilan perempuan dalam politik semakin berkembang, di mana pada pemilu 1999 tersebut untuk pertama kalinya isu mengenai hak-hak perempuan di kedepankan dalam kampanye, dan setelah pemilu 1999 berlangsung, tuntutan peningkatan peran perempuan semakin mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (Kusumaatmadja, 2007,2), tentunya peristiwa tersebut menandai hal baru dalam sistem politik perempuan, yaitu bagaimana perempuan tidak bisa dilepaskan dalam proses politik yang berlangsung (Agustono,2000,15).

Meskipun Pemilu 1999 masih jauh dari harapan keterlibatan perempuan dalam politik, namun tuntutan peningkatan peran perempuan pasca Pemilu 1999 semakin menunjukkan geliatnya. Kesadaran akan pentingnya peran politik perempuan semakin nyata seiring dengan semakin terkuaknya sejumlah persoalan yang menimpa perempuan mulai dari masalah kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi

perempuan, *trafficking* dan sebagainya. Dari sini muncul kesadaran bahwa sejumlah persoalan yang menimpa perempuan tidak bisa hanya diselesaikan kasus per kasus karena jumlahnya yang cukup besar. Persoalan perempuan juga membutuhkan kebijakan politik yang melahirkan sejumlah aturan untuk mengatasi sejumlah persoalan perempuan.

Isu perempuan dalam politik menurut beberapa pemerhati masalah perempuan memang belum membuahkan hasil yang menggembirakan, baik melalui indikator capaian berupa angka statistik yaitu kenaikan jumlah perempuan di posisi pengambil keputusan, juga berdasarkan pada indikator adanya kesadaran masyarakat dan pengambil kebijakan akan pentingnya mengakhiri pelbagai bentuk diskriminasi di bidang politik, serta pemahaman hak-hak politik warga negara, termasuk hak-hak perempuan. (Kusumaatmadja, 2007, 5)

Kemudian akhirnya sejarah perjuangan gerakan perempuan mencapai kesetaraan dalam politik, yaitu diakomodasinya keterwakilan politik perempuan dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, Pasal 65 Ayat 1 mencantumkan, bahwa : "Setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurang 30 persen (30%)".

Kuota 30% untuk perempuan artinya 30% menjadi batas minimal prosentase keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan, Alasan persentase kuota keterwakilan perempuan, karena *pertama*, keterwakilan politik perempuan di Indonesia masih sangat rendah dan *kedua* alotnya proses transisi demokrasi di Indonesia. Padahal inti dari demokrasi adalah upaya menjamin kesetaraan perempuan dalam politik dan memastikan keberadaan perwakilan dari setiap orang termasuk kaum minoritas dan perempuan (Seda, 2003, 21).

Pemilu 2004 juga menorehkan sejarah perjuangan gerakan perempuan mencapai kesetaraan dalam politik, yaitu diakomodasinya keterwakilan politik perempuan sebanyak tiga puluh perseratus (30%),

Universitas Indonesia

meskipun masih belum dilakukan dengan sepenuhnya, selain itu, capaian yang tidak kalah strategisnya adalah disahkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Tahun 2004 merupakan bentuk terobosan politik bagi perjuangan perempuan untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga Indonesia. (Kusumaatmadja, 2007, 2),

Realisasi klausul tersebut menurut Tumbu Saraswati yang diperoleh dari berbagai informasi (Jurnal Perempuan 35, 2004, 33) banyak partai politik yang hanya berusaha memenuhi kuota sebesar tiga puluh persen (30%) untuk para calon anggota legislatif (Caleg) perempuan, tetapi kurang memperhatikan pengalaman dan kualitas Caleg perempuan tersebut. Akibatnya muncul kekhawatiran apakah calon legislatif perempuan yang diajukan oleh partai-partai itu mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya perjuangan terhadap kaum perempuan.

Sistem kuota perempuan pertama kali diperkenalkan dengan nama sistem kuota gender di Norwegia di dalam Partai Sosialis Kiri dan Partai Liberal mulai tahun 1970. Saat ini, semua partai besar Norwegia menerapkan sistem kuota gender dalam nominasi pemilihan umum serta membentuk badan pemerintahan pada semua tingkat. Sistem kuota ini diterapkan sendiri dengan suka rela. Norwegia sendiri tidak memiliki peraturan hukum dalam hal keseimbangan gender di partai politik atau badan terpilih (<http://www.dubes.go.id/norwegia>)

Upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik akan kembali diuji pada Pemilu 2009. Beberapa peraturan perundang-undangan pun telah mengatur kuota tiga puluh persen (30%) perempuan bagi Partai Politik (Parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya.

Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Legislatif) serta UU Nomor 2 tahun

2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada Parpol untuk memenuhi kuota tiga puluh persen (30%) bagi perempuan dalam politik.

Pasal 8 butir d UU Nomor 10/2008, misalnya, menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan Parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu 2009. Selain itu, Pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar bakal calon juga memuat paling sedikit tiga puluh persen (30%) keterwakilan perempuan.

Lebih jauh, Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 10/2008 juga menyebutkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa cetak harian dan elektronik nasional. Sementara di Pasal 2 ayat 3 UU Parpol disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan tiga puluh persen (30%) keterwakilan perempuan. Lebih jauh, di Pasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah tiga puluh persen (30%).

Meskipun telah ada peraturan perundangan yang memandatkan kuota tiga puluh persen (30%) dalam parlemen, itu tidak serta-merta menjamin peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Selain itu, dalam kenyataannya pun, pemenuhan kuota tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. Meskipun ketentuan yang ada sifatnya mensyaratkan, itu hanya disertai sanksi moral dan bukan sanksi yang tegas yang dapat mendesak pemenuhan kuota itu.

Dalam Pasal 57 dan Pasal 58 UU Pemilu Legislatif, misalnya, tentang verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon, tindak lanjut jika kuota keterwakilan perempuan terpenuhi hanya disebutkan bahwa KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota akan memberikan kesempatan pada parpol untuk memperbaiki daftar calon tersebut dan memberikan alasan tertulis.

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat sendiri, bukannya tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota tiga puluh persen (30%) bagi keterwakilan perempuan dalam politik penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, serta lingkungan, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan *multitasking* dan mengelola waktu, serta yang tidak kalah penting adalah keterbiasaan dan kenyataan bahwa perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok pengajian.

Liberalisasi politik yang terjadi sejak era reformasi tidak otomatis diikuti kesiapan lembaga pendidikan dan rekrutmen politik, terutama Parpol, untuk secara serius dan berkelanjutan untuk membuka kesempatan partisipasi perempuan dalam politik, terutama menempatkan perempuan dalam posisi dan tanggung jawab organisatoris yang signifikan, selain mempersiapkan dan menempatkan perempuan sebagai Caleg yang andal dengan kesempatan yang setara dengan Caleg laki-laki.

Dengan di syariatkannya pemenuhan kuota keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik maupun dalam daftar Calon Anggota Legislatif, Parpol dalam sebagai Peserta Pemilu 2009 harus mempunyai Strategi dalam proses penjangkaran mulai dari kepengurusan hingga penempatan bakal Calon tersebut, di mana hal ini menjadikan persaingan yang cukup ketat, di mana semua Partai Politik Peserta Pemilu 2009 mempunyai tujuan yang sama berkaitan dengan pemenuhan kuota yang di syaratkan pada UU tersebut.

Para Parpol dalam pemilu 2009 Selain itu, peran parpol sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi pendidikan dan rekrutmen serta sosialisasi politik harus terus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar berpolitik praktis dengan memberikan tanggung jawab di posisi-posisi yang strategis, tapi juga

dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dan kontribusi yang signifikan seperti halnya laki-laki.

Yang tidak kalah penting adalah penerapan hukum yang konsisten dengan sanksi yang tegas bilamana parpol tidak dapat memenuhi keterwakilan kuota perempuan dalam politik, baik di parpol itu sendiri maupun di lembaga perwakilan rakyat. Hal itu pun juga diterapkan Prancis lewat *parity law* (1999) dengan penalti keuangan, maupun Argentina dengan *ley de cupos* (1991) dengan penalti penolakan keikutsertaan parpol dalam pemilu.

Akhirnya, selama anggota legislatif masih berasal dari parpol, keterwakilan perempuan dalam politik akan kembali kepada kesungguhan dan *political good will* dari parpol dan segenap jajaran elitnya. Pesan lain yang perlu digariskan, berapa pun persentase keterwakilan perempuan dalam politik juga harus didasari pertimbangan rasional dan strategis, seperti kapabilitas untuk bersaing dan berkontribusi dalam politik praktis secara signifikan, dukungan basis massa yang jelas, dan pengalaman yang relevan, dan visi serta misi yang sejalan dengan parpol. Tantangan yang berat, tapi bukan tidak mungkin untuk diwujudkan.

Pada Pemilu 2009 yang diikuti oleh 44 Parpol dimana sejumlah 38 Parpol adalah Parpol Nasional dan Lokal, tentunya hal ini akan menimbulkan persaingan yang *kompetitif*, dimana masing-masing Parpol akan menjangkir simpatisan dan kadernya melalui berbagai cara.

Berbagai langkah strategis dan pendekatan politik di lakukan oleh para Parpol untuk dapat memenangi hasil pemilu dan langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menempatkan individu yang berkualitas untuk duduk dalam kepengurusan, kemudian setelah itu melakukan perekrutan para kadernya untuk menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg). Strategi ini perlu dipikirkan oleh setiap Parpol karena pesaing juga secara intens melakukan upaya-upaya yang hampir sama untuk memenangi persaingan politik (Firmansyah,2008,109). Semakin banyak Parpol membuat persaingan semakin tinggi, Masyarakat di hadapkan pada lebih

banyak alternatif pilihan selama periode Pemilu. Kenyataan bahwa suatu Parpol memiliki massa tradisional (massa yang telah mempunyai pilihan partai) bukanlah jaminan bahwa massa tradisionalnya itu tidak akan pindah dan migrasi ke parpol lain (Firmansyah,2008,146). terlihat di bawah adalah tabel yang menggambarkan perolehan jumlah Caleg Perempuan pada masing-masing Parpol dalam keikutsertaannya pada Pemilu 2009

Tabel I.1
Jumlah Calon Legislatif (Caleg) Perempuan Periode 2009-2014

No. urut	Partai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsl
1	HANURA	414	186	600	31.00
2	PKPB	86	55	141	39.01
3	PPPI	140	134	274	48.91
4	PPRN	212	76	288	28.39
5	GERINDRA	275	112	387	28.94
6	BARNAS	172	104	276	37.68
7	PKPI	173	142	315	46.08
8	PKS	364	215	579	37.13
8	PAN	413	179	592	30.24
10	PIB	35	20	55	36.36
11	KEDAULATAN	154	89	243	36.63
12	PPD	92	67	159	42.14
13	PKB	258	134	392	34.18
14	PPI	184	92	276	33.33
15	PNIM	76	37	113	32.74
16	PDP	234	166	400	41.50
17	PKP	133	66	199	33.17
18	PMB	179	124	303	40.92
19	PPDI	34	16	50	32.00
20	PDK	143	107	250	42.80
21	REPUBLIKAN	162	67	229	29.26
22	PELOPOR	65	41	106	38.68
23	GOLKAR	446	192	638	30.09
24	PPP	339	131	470	27.87
25	PDS	207	115	322	35.71
26	PNBKI	115	56	171	32.75
27	PBB	263	129	392	32.91
28	PDIP	407	221	628	35.19
29	PBR	185	129	314	41.08
30	PATRIOT	102	23	125	18.40
31	DEMOKRAT	439	219	658	33.28
32	PKDI	100	45	145	31.03
33	PIS	192	123	315	39.05
34	PKNU	192	96	288	33.33
41	MERDEKA	57	32	89	35.96
42	PNUI	52	40	92	43.48
43	PSI	81	46	127	36.22
44	BURUH	142	76	218	34.86
	Jumlah	7,317	3,902	11,219	

Kompas : 9 Februari 2009

Terlihat dalam tabel di atas bahwa peserta Pemilu 2009 sebanyak 38 Partai Nasional dan nomer urut partai dari 35,36,37,38,39,40 tidak

Universitas Indonesia

tertera karena ke-enam partai tersebut adalah Partai Lokal untuk daerah Aceh (sumber <http://www.kpu.go.id>), Jumlah Partai yang melebihi kuota keterwakilan perempuan ada 33 Partai Politik dan yang masih dibawah persentase keterwakilan perempuan ada 5 Partai Politik.

Dari 38 Parpol Nasional, PKP INDONESIA merupakan salah satu Parpol yang menempati perolehan Caleg perempuan ke dua (2) setelah PPPI, dan PKP INDONESIA tersebut bukanlah partai baru, PKP INDONESIA telah mengikuti pemilu yang ketiga pada pemilu 2009. keberadaan PKP INDONESIA berawal dari rasa keprihatinan sekelompok putra-putra bangsa akan nasib dan penderitaan rakyat, terpuruknya keadilan dan persatuan, melemahnya nasionalisme, bahkan terancamnya integrasi bangsa yang semakin melebar akibat krisis di berbagai bidang pada tahun 1998 (AD/ART PKPI; 2008).

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya sepakat membentuk suatu gerakan moral yang dinamakan Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB), Gerakan ini dimotori oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Try Sutrisno, Edi Sudradjat, Tatto S. Pradjamanggala, Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmaja, Hayono Isman, Udju S. Dinata dan David Napitupulu.

Dalam perjalanan selanjutnya sesuai perkembangan politik tanah air yang membuka peluang berdirinya banyak partai politik (multi partai), sebagian dari para pengagas GKPB menganggap bahwa perlu dibentuk satu partai politik agar perjuangan GKPB dapat lebih tajam dalam berpartisipasi menentukan arah kebijakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 yang saat itu akan digelar.

Atas dasar gagasan tersebut, maka pada tanggal 15 Desember 1998 di Gedung Jakarta Design Center diumumkan Panitia Pembentukan Partai Politik yang diketuai oleh Edi Sudradjat dan Sekretaris Tatto S. Pradjamanggala, dan disusul dengan Deklarasi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pada tanggal 15 Januari 1999 di Gedung Manggala Wanabhakti-Jakarta. PKP dipimpin oleh Ketua Umum Edi Sudradjat dan

Universitas Indonesia

Sekretaris Jendral Hayono Isman, dibantu Tatto S. Pradjamanggala, Suryadi, Meutia Hatta Swasono, Anton J. Supit, John Pieris dan Sutradara Gintings dan Udju S. Dinata. Sementara Sarwono Kusumaatmadja, Siswono Yudhohusodo dan David Napitupulu tetap berjuang di GKPB.

Hasil Pemilu 1999, dengan berbagai persiapan yang relatif singkat dan serba keterbatasan, PKP berada di urutan kedelapan diantara 48 partai politik peserta Pemilu 1999 dengan perolehan suara absolute 1.065.810 dan berhasil menempatkan 4 kursi di DPR, 26 DPRD Provinsi dan 178 DPRD Kabupaten/Kota. Hasil sedemikian menempatkan PKP sebagai partai politik yang tidak bisa langsung ditetapkan sebagai partai politik 2004 karena tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold* (ET). (Dokumen AD/ART PKPI, 2008).

PKP sebagai partai politik yang tidak memenuhi ET, sehingga secara aturan UU Bidang Politik (terutama UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu) tidak dapat mengikuti Pemilu 2004, kecuali dengan cara : (1) bergabung dengan partai politik yang telah memenuhi ET ; (2) bergabung dengan sesama partai politik ET hingga dapat memenuhi ET; dan (3) membentuk partai politik baru, mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi sebagai partai politik peserta pemilu 2004. Namun demikian Kongres PKP tahu 2002 memutuskan untuk tetap melanjutkan eksistensinya dan berusaha menjadi Partai Politik peserta Pemilu 2004.

Melalui berbagai forum yang diselenggarakan PKP, baik yang melibatkan lintas Partai Politik, maupun forum pertemuan internal partai (MUSPIMNAS II PKP tanggal 29-30 Juli 2002 dan Forum Konsultasi Nasional PKP tanggal 28 Oktober 2002) akhirnya PKP memutuskan bentuk keikutsetaannya di Pemilu 2004 dengan cara "*metaforfosa*", dengan cara merubah nama dari PKP menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA), yang kemudai didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM pada tanggal 27 Mei 2003 dan ditetapkan sebagai Partai Politik berbadan hukum pada tanggal 17 Juli 2003. hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan pendaftaran ke KPU pada tanggal 19 September 2003 dan pada tanggal 7 Desember 2003 PKP

Universitas Indonesia

INDONESIA diumumkan secara resmi sebagai Partai Politik Peserta pemilu 2004.

Hasil Pemilu 2004 menempatkan PKP INDONESIA pada urutan 10 dengan perolehan suara 1.424.240, yang menghasilkan 1 kursi DPR, 9 kursi DPRD Provinsi dan 244 kursi DPRD Kabupaten /Kota.

Hasil Pemilu 2004 menempatkan PKP INDONESIA sebagai salah satu partai politik yang tidak dapat mengikuti Pemilu 2009 karena dibatasi oleh ketentuan ET, namun Kongres PKP INDONESIA tahun 2005 menetapkan mempertahankan dan mengembangkan eksistensi PKP INDONESIA, sebagai partai politik yang mandiri, populis dan modern, serta berjuang dan berupaya untuk dapat menjadi Partai Politik Peserta Pemilu 2009.

Pada tanggal 16 Desember 2007 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ditetapkan oleh DPR dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2008 oleh Presiden. Hal ini kemudian diikuti dengan pembukaan pendaftaran partai politik oleh Departemen Hukum dan HAM dan ditutup pada tanggal 27 Februari 2008.

Dengan melibatkan jaringan PKP INDONESIA secara nasional. Dalam kurun waktu \pm satu bulan, kebutuhan administrasi PKP telah berhasil dikonsolidasikan di 33 provinsi, 346 Kabupaten/Kota dan 3.091 kecamatan, dan didaftarkan pada tanggal 11 Februari 2008, serta penyempurnaan kelengkapan syarat pendaftaran pada tanggal 18 dan 27 Februari 2008. Kesemua langkah tersebut dalam rangka mengantisipasi diberlakukannya ketentuan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang membatasi keikutsertaan PKP INDONESIA di Pemilu 2009 karena memenuhi ketentuan *electoral threshold* (ET).

Pada tanggal 3 Maret 2008 (lima hari pasca penutupan pendaftaran partai politik di Departemen Hukum dan HAM) DPR menetapkan UU RI No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yang diantaranya memberikan kelonggaran kepada partai politik peserta Pemilu 2004 yang memperoleh kursi di DPR dapat langsung mengikuti Pemilu 2009, termasuk

Universitas Indonesia

didalamnya PKP INDONESIA. Seiring dengan keputusan tersebut dan dalam rangka melaksanakan keputusan Kongres tahun 2005 secara tepat guna, maka DPN PKP INDONESIA memutuskan mencabut pendaftaran PKP ke Departemen Hukum dan HAM, dan selanjutnya memutuskan menetapkan PKP INDONESIA untuk ikut sebagai peserta dalam Pemilu 2009 sesuai ketentuan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

1.2. Rumusan Masalah.

Keterwakilan perempuan dalam partai politik yang mengakomodasi aspirasi dan kepentingan kaum perempuan sangatlah diharapkan, melalui lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif. Harapan tersebut didukung dengan kesempatan yang tersedia untuk berperan lebih banyak jumlah dan luas ruang lingkungannya.

Hal yang paling penting untuk diperhatikan bukan hanya kuantitas dari terpilihnya kaum perempuan dalam Pemilu sebagai anggota legislatif, namun hal lain yang juga penting untuk diprioritaskan adalah kemauan dan kemampuan mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan orang banyak khususnya yang terkait dengan kepentingan dari keberadaan kaum perempuan. Hal ini merupakan tanggung jawab moral para anggota legislatif kepada para konstituennya yang kemungkinan mayoritas dari kaum perempuan, yang sekaligus menggambarkan tingkat integritas anggota tersebut.

Perempuan yang diharapkan diatas, tentunya perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan emosional serta mau dan mampu memperjuangkan agenda partai politik umumnya dan agenda perempuan khususnya. Kemauan dan kemampuan inilah yang menggambarkan integritas perempuan tersebut jika terpilih sebagai anggota legislatif, dalam menyikapi persoalan yang dihadapi kaum perempuan. Kemudian permasalahan yang dimunculkan bukan sekedar perempuan sebagai

perempuan. Tapi justru yang lebih banyak muncul adalah persoalan yang terkait peran yang dilabelkan pada perempuan secara kultural.

PKP INDONESIA telah melakukan revitalisasi dalam rangka memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Legislatif, antara lain : (a) Pemenuhan keterwakilan tiga puluh persen (30%) perempuan pada pengurus partai di tingkat pusat/ nasional (DPN), tingkat provinsi (DPP) dan tingkat kabupaten/Kota (DPK); dan (b) Pemenuhan pelaporan kantor dan alamat tetap pengurus tingkat provinsi (DPP) dan kabupaten/kota (DPK) yang dilaporkan oleh pengurus partai tingkat nasional (DPN).

Strategi kampanye dalam proses merekrut anggota calon legislatif perempuan melibatkan banyak aspek, tidak saja mengenai bagaimana mengelola pesan, meningkatkan citra partai politik, calon anggota legislatif atau calon presiden, dan memanfaatkan media kampanye, tapi juga bagaimana dengan karakteristik jumlah penduduk yang mayoritas perempuan. Wilayah yang akan dibahas pertama adalah pada berbagai literatur komunikasi politik, sementara yang kedua mendapat porsi yang banyak psikologi politik.

Penelitian ini tidak akan membahas wilayah karakteristik pemilih perempuan, yang juga turut menentukan keberhasilan strategi kampanye, melainkan memberikan porsi yang memadai untuk membahas beberapa aspek strategi pemasaran politik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Strategi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) dalam menjaring calon legislatif (caleg) perempuan ?.
2. Apa yang menjadi kekuatan dan kendala PKP INDONESIA dalam menjaring caleg perempuan dalam Pemilu 2009?.

Alasan PKPI yang dijadikan sebagai kasus, karena ternyata keterwakilan perempuan pada partai ini lebih besar dibandingkan dengan partai politik lainnya. Berdasarkan data dari KPU pusat bahwa

keterwakilan perempuan pada partai ini mencapai empat puluh lima koma nol delapan persen (45,08%), lebih besar dengan amanat undang-undang yang mencatumkan kuota perempuan sebesar tiga puluh persen (30%).

1.3. Tujuan Penelitian.

Dari pemaparan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Strategi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) dalam menjaring calon legislatif (caleg) perempuan.
2. Menjelaskan faktor-faktor menjadi kekuatan dan kendala PKP INDONESIA dalam menjaring caleg perempuan dalam Pemilu 2009.

1.4. Signifikansi Penelitian.

a. Kontribusi Akademis

Studi mengenai pemasaran politik cukup banyak telah dilakukan, pada umumnya penelitian yang dilakukan lebih pada proses pemasaran politik melalui kampanye dan ditujukan kepada para pemilih. Penelitian lebih kepada pada kandidat atau calon anggota legislatif terutama yang perempuan masih sedikit.

Penelitian tentang strategi juga telah banyak dilakukan pada tesis, dan umumnya lebih meneliti tentang strategi yang berkaitan dengan pihak eksternal salah satunya adalah penelitian pada tesis Irmanto tahun 2008 pada Program Studi Ilmu Komunikasi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia tentang "Strategi Kampanye Partai Politik Baru" dengan Studi Kasus pada Partai Hanura dan hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa pembangunan pembangunan infrastruktur hingga ke tingkat paling bawah menjadi strategi mendasar bagi partai politik dan faktor individu yang populer beserta infrastruktur menjadi kekuatan suatu partai politik.

Universitas Indonesia

Penelitian lain tentang perempuan khususnya Caleg Perempuan pada tesis Irene Erlyska tahun 2004 pada Program Studi Ilmu Komunikasi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dengan judul "Perempuan Sebagai Calon Legislatif Pemilu 5 April 2004 di Media Televisi", hasil penelitian yang diperoleh adalah dari frame yang ditemukan bahwa metro TV stasiun yang mengukuhkan diri sebagai Election Channel, menonjolkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik perlu mendapatkan perhatian lebih. Banyak caleg perempuan yang berkualitas dengan visi dan misi yang jelas harus terhadaang dengan kendala-kendala yg disebabkan oleh budaya patriarki.

b. Signifikansi Praktis.

dapat memberikan sumbangan pemikiran/ saran berupa rekomendasi kepada pihak terkait dalam hal ini Partai Politik dan khususnya kepada Dewan Pengurus Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP INDONESIA) dalam membuat kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Regulasi oleh pemerintah dalam hal Pemilu hingga akhirnya dapat menerapkan setiap kebijakan yang dibuat berdasarkan aturan yang sesuai dengan Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah.

1.5. Signifikansi Penulisan

Sesuai dengan panduan yang diterbitkan pihak Universitas, penelitian yang merupakan Karya Akhir ini disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini di kemukakan dengan seksama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian mengapa penelitian ini penting dilaksanakan.

BAB 2 KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam bab ini berisi hasil kajian terhadap bebrbagai pustaka dan penelitian tentang political marketing pada partai politik. Dan berdasarkan kerangka

konseptual ini, Penulis menentukan teori-teori mana yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis memaparkan metoda penelitian yang digunakan, analisis data, obyek penelitian, unit analisis, pengumpulan data hingga kerangka evaluasi dan keterbatasan penelitian.

BAB 4 ANALISA DAN TEMUAN PENELITIAN

Berisi Data, Fakta dan Analisa. Diawali dengan latar belakang, sejarah, hingga visi misi dari obyek penelitian serta pada bagian berikutnya lebih memaparkan hasil temuan dari strategi yang digunakan, faktor kekuatan dan kendala dalam menjaring caleg perempuan.

BAB 5 KESIMPULAN

Berisi kesimpulan Penulis terhadap berbagai temuan didalam penelitian. Bab ini lebih memberikan gambaran serta rekomendasi yang dihasilkan dari bab-bab sebelumnya.

BAB 2

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka berpikir yang melandasi penulisan proposal ini adalah konsep-konsep teori yang dianggap berhubungan dengan judul dan topik pembuatan tesis ini terdiri ; Komunikasi Politik, Komunikasi Pemasaran, *Political marketing*, Partai Politik, Politik dalam Perspektif Perempuan, beserta relevansinya dengan Strategi Komunikasi Partai Politik dalam Menjaring Calon Anggota Legislatif Perempuan.

2.1. Komunikasi Politik.

Komunikasi politik yang terangkum dalam teori yang dikemukakan Laswell (1948) "*who says what in what channel to whom with what effect*". Berdasar definisi tersebut Dan Nimmo dalam Johson Cartee dan Coopeland (2004)

Melengkapi pemaknaan komunikasi politik sebagai berikut :

"Communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual an potential) which regulate human conduct under conditions of conflict (or competition)

Komunikasi politik merupakan tindakan komunikasi yang terjadi di wilayah politik dengan segala konsekuensinya yang mengatur manusia untuk suatu kompetisi atau kondisi di bawah konflik tertentu. Dan Nimmo meminjam istilah Laswell di atas sebagai cara yang tepat untuk menggambarkan tindakan komunikasi dengan memodifikasi formula Laswell dari linear menjadi sirkular "*to whom* menjadi *with whom*". Dan Nimmo melihat bahwa proses komunikasi politik audiens adalah subyek yang aktif.

Dengan demikian komunikasi politik adalah suatu aktivitas /peristiwa /proses/ pengiriman pesan (yang di dalamnya) bisa terkandung informasi dari suatu pihak yang biasanya disebut "sumber/komunikator"

sengaja maupun tidak melalui saluran/medium tertentu. Yang ditujukan kepada pihak tertentu (komunikasi/penerima) yang dapat disertai analisis sesudahnya, bahwa si penerima (akan) melakukan reaksi tertentu dalam konteks-konteks komunikasi yang tertentu pula (ruang waktu, hubungan-hubungan sosial dan sebagainya), misal melalui konflik atau suatu kompetisi.

Sedangkan Graber, 1984,²² mendefinisikan komunikasi politik sebagai usaha mengkonstruksi, pengiriman, penerimaan dan pemrosesan pesan yang potensial untuk berdampak langsung maupun tidak langsung dalam politik. Kegiatan komunikasi politik tersebut diimplementasikan melalui kegiatan persuasi dan manajemen pencitraan.

Charles U. Larson, 1986,¹¹ mendefinisikan persuasi dalam bukunya *Persuasion Reception and Responsibility*, mengatakan bahwa persuasi adalah proses yang bertujuan mengubah keyakinan/nilai-nilai, sikap dan perilaku dari penerima. Yang dalam hal ini kerelaan serta sikap kritis penerima akan menentukan keberhasilan proses persuasi. Kerjasama diantara kedua belah pihak, suasana kesamaan dan peluang akses ke media, kejelasan agenda dan ruang dimana penerima melihat keseluruhan pertimbangan yang ada menjadi kriteria utama persuasi yang berhasil. Dengan kata lain persuasi akan berhasil apabila berorientasi pada receiver serta memahami pendekatan dan proses persuasi secara sistimatis.

Sedangkan manajemen pencitraan pada prinsipnya berkaitan dengan *positioning* dan *memori* (Gazali,2005,30). Manajemen pencitraan merupakan suatu proses mengelola suatu *positioning* melalui *memori* tertentu yang ditanamkan terus menerus kepada penerima dalam hal ini publik ataupun calon pemilih.

Komunikasi politik modern ditandai dengan ciri *mass mediated communication* yaitu komunikasi yang menggunakan media massa untuk sarana berkomunikasi antara *persuader* dan penerimannya. Maka dalam komunikasi politik modern *mass media* menjadi keharusan utama sebagai medium untuk menyampaikan pesan politik.

2.2. Komunikasi Pemasaran

Komunikasi Pemasaran secara umum dianggap sebagai “*suatu hubungan yang sistematis antara suatu bisnis dan pasarnya, di mana para pemasar menggunakan berbagai macam ide, desain, media, potongan-potongan, bentuk, dan warna-warni untuk mengkomunikasikan dan menstimulikan persepsi dari produk / jasa kepada individu-individu yang dipastikan telah berada dalam target pasarnya*” (Smith, Berry dan Pulford, 1999:21). Definisi lain menyatakan bahwa komunikasi pemasaran merupakan “*kesatuan elemen bauran pemasaran dari satu merk (brand) yang memfasilitasi pertukaran pengertian diantara produsen dan konsumen*” (Shimp, 1997:10).

Menurut (Kotler 2000,176) juga mendefinisikan tak jauh dengan sebelumnya yaitu : Komunikasi pemasaran sebagai :”suatu scope yang merentang dari informasi internal (perusahaan) sampai dengan sistem pengambilan keputusan konsumen”. Termasuk didalamnya adalah pesan dan *images* (tentang produk) yang dipresentasikan oleh perusahaan kepada konsumen potensial maupun *stakeholders* lainnya.

Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa komunikasi pemasaran merupakan usaha atau aktivitas *produsen* untuk mengkomunikasikan (mempresentasikan) informasi dan menarik perhatian (memberikan stimuli) pasar yang dituju dengan menggunakan media tertentu, untuk menyampaikan ide, pesan, serta simbol-simbol yang terintegrasi. Dengan tujuan agar diperhatikan konsumen, terpengaruh /terbujuk, bahwa ingat akan produknya. Sehingga mereka mau menerima, membeli, bahkan loyal terhadap produk yang bersangkutan.

Namun demikian, komunikasi pemasaran pada prakteknya ternyata membutuhkan suatu bentuk strategi untuk lebih mudah memahami dan mewujudkan tujuan yang direncanakan. Adapun strategi komunikasi pemasaran tersebut akan mengintegrasikan dan menuntun seluruh kegiatan komunikasi pemasaran yang dijalankan menuju pada suatu tujuan yang jelas, efektif dan terarah (Smith, Berry dan Pulford, 1999:21). Lebih

mudahnya, strategi di sini untuk merujuk pada “bagaimana tujuan komunikasi pemasaran dapat diraih”.

Dari komponen kunci yang terarah ini, memungkinkan pesan mengenai produk disampaikan kepada target pasar dengan cara yang efektif dan mungkin efisien. Di mana dengan langkah yang tepat namun terintegrasi pada setiap tahapan dari strategi tersebut dapat menjadi kekuatan perusahaan untuk bersaing di dalam kondisi bisnis yang *unpredictable* ini.

Pada tahap berikutnya, komunikasi pemasaran itu juga harus diimplementasikan dengan menggunakan media tertentu (alat), yang disebut sebagai *marketing communication mix/promotion mix*, salah satunya adalah periklanan (Kotler,2000,550).

Periklanan, adalah pesan-pesan penjualan yang paling persuasi yang diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya. Adapun tujuan periklanan, yaitu menciptakan pengenalan merk / produk perusahaan, memposisikan, mendorong prospek untuk mencoba, mendorong terjadinya penjualan, membina loyalitas konsumen, mengumumkan cara baru yang bermanfaat, dan meningkatkan citra (Cakram,2001,50). Dengan demikian berdasarkan tujuannya, iklan dapat dikategorisasikan ke dalam informatif *advertising* yang bertujuan untuk menginformasikan khalayak mengenai seluk beluk produk (*informative*), *persuasive advertising* yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak untuk membeli (*persuading*), dan *reminder advertising* yang bertujuan untuk menyegarkan informasi yang telah diterima khalayak (*reminding*).

Dalam membangun suatu strategi komunikasi pemasaran terpadu, diperlukan lima langkah utama (De Lozier, 272-273 dalam Tesis Widiyanto,2005,25) :

1. Memperkirakan peluang dalam komunikasi pemasaran, yang didapat dengan mempelajari lingkungannya.
2. Menganalisa sumber-sumber komunikasi pemasaran. Suatu organisasi harus mampu menganalisa sumber-sumber dan dalam perusahaannya

untuk dapat menunjang kegiatan komunikasi pemasaran yang akan dilakukan. Dengan demikian maka segera diketahui kelemahan dan kekuatan perusahaan tersebut .

3. Menentukan tujuan komunikasi pemasaran.
4. Membuat dan mengevaluasi langkah alternatif dan strategi. Setelah strategi ditentukan maka selanjutnya merancang sekaligus mengevaluasi strategi alternatif untuk mencapai tujuan.
5. Menentukan taktik yang jitu, guna menjalankan strategi komunikasi pemasaran yang tepat.

Setelah langkah-langkah di atas dijalankan, maka tahap berikutnya adalah menentukan klasifikasi strategi pemasarannya yang terbagi dalam tiga kategori umum, yaitu : (dalam Tesis Widiyanto,2005,26)

1. Strategi "*Product Benefit*"

Merupakan strategi yang terfokus pada apa yang dimiliki oleh produk tersebut dan apa fungsinya bagi konsumen. Untuk itu produk harus memiliki keistimewaan yang mampu membedakannya dan produk sejenis dan merek lain.

Untuk menjalankan strategi ini harus mendapat dukungan semua unsur komunikasi yang tidak hanya promosi atau periklanan, tetapi juga mempertimbangkan kelayakan kemasan produk, harga, nama produk, agar komunikasi dapat membentuk pesan yang diharapkan (oleh para konsumen).

2. Strategi "*Image Identification*"

Strategi *image* merupakan strategi yang terfokus pada upaya organisasi untuk membentuk *image merk* produknya pada tingkat status yaitu : kenyamanan, keistimewaan, dan kemampuan. Biasanya strategi ini digunakan oleh organisasi yang memiliki kesamaan secara fisik dan fungsi dengan produk dari perusahaan lainnya.

Strategi identifikasi merupakan kesinambungan dari strategi *image* di mana orientasinya adalah pada konsumen. Kalau strategi *image* berlandaskan pada orientasi bagaimana suatu produk, maka strategi identifikasi melihat bagaimana konsumennya. Titik pandangnya adalah

kemungkinan bagaimana seorang konsumen bisa mengidentifikasi suatu *image* yang cocok untuk mereka.

3. Strategi “*Product Positioning*”.

Merupakan strategi yang berusaha untuk langsung menempatkan suatu produk pada posisi tertentu dalam suatu pesan yang sudah ada secara *gambling*, bahkan dengan kompetitornya.

Walaupun telah ada 5 langkah dalam membangun strategi komunikasi pemasaran, maka banyak faktor yang menjadi pertimbangan antara lain lingkungan, kepentingan perusahaan, sumber-sumber yang ada dalam perusahaan, dan lain-lain. Bagi suatu produk yang memiliki banyak kompetitor dalam kesamaan fisik dan fungsi maka perkiraan akan kompetisi merupakan pertimbangan utama.

Hal tersebut di atas berlaku pula bagi produk yang sifatnya bukan barang, seperti produk sosial atau jasa misalnya produk kampanye partai politik karena model komunikasi yang digunakan sama, yaitu mencakup unsur S (*Source* atau sumber/pengirim), M (*Message* atau pesan), E (*Effect/efek*), C (*Channel* atau saluran), R (*Receiver* atau penerima) dan F (*Feed back* atau umpan balik). Perbedaannya terletak pada aplikasi dan informasi yang dibawa atau ingin disampaikan dan S menuju R, sebagaimana hasil pemikiran Jack Dempsey tentang informasi yang bisa dijadikan pegangan, yaitu : (dalam Kasali, 1995,168)

“Informasi, bila berdiri sendiri, tidak akan memiliki nilai informasi mulai memainkan peranannya ketika para ahli strategi mulai menangkap makna dasar informasi dan relevansinya terhadap hal-hal tertentu yang berhubungan dengan topik yang dibawa oleh informasi.

Bila makna ini telah kita dapatkan, maka kita dituntut untuk ‘masuk’ ke dalamnya. Tentu saja dengan menyertakan juga segala data yang kita miliki. Selain itu, sekali waktu kita tetap perlu mengambil jarak dengan informasi tersebut. Tujuannya justru agar bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bila hal ini berhasil dilakukan, secara tidak langsung kita telah bisa membedakan mana informasi yang penting diingat dan mana yang tidak”.

2.3. Political Marketing

2.3.1. Definisi *Political marketing*

Dalam ilmu sosial sampai saat ini belum ada satu definisi tentang *political marketing* yang dapat disepakati oleh semua pihak (Baines, Brennan dan Egan, 2003,5). Baines memberikan kritik kepada para pendahulunya yang mendefinisikan *political marketing* sebagai "Proses di mana kandidat politik dan ide yang dijunjungnya dikemas kepada pemilih untuk bisa memenuhi kebutuhan pemilih tersebut hingga pada gilirannya pemilih tersebut akan memberikan dukungan kepada kandidat dan ide yang dijunjungnya tadi" (Shama 1975). Definisi selanjutnya meliputi proses melobi (Lock and Harris 1996); memiliki tujuan jangka panjang (Henneberg, 1997); Fokus kepada kompetisi, polling opini publik, dan analisa lingkungan (Wring, 1997) serta perspektif internasional dan organisasi (Baines, 2001).

Baines berpendapat definisi seperti di atas justru mengabaikan unsur penting dari sebuah proses *political marketing*. Definisi tersebut tidak menjelaskan kebutuhan organisasi politik untuk berorientasi *marketing* serta kurang menjelaskan peran *marketers* (yang biasanya merupakan politisi lokal) yang menjadi *fronline* dalam proses kampanye. Oleh sebab itu Baines, Brennan dan Egan (2003,6) menawarkan definisi *Political Marketing* adalah suatu proses di mana organisasi politik :

- Mengkomunikasikan pesannya, *targetted* atau *untargetted*, langsung ataupun tidak langsung, kepada pebdukungnya dan pemilih lainnya.
- Membangun kredibilitas dan kepercayaan dari pendukungnya, pemilih lain dan sumber external lain yang bisa membantu mereka menggalang dana dan membangun serta memelihara struktur manajemen lokal dan nasional.

- Berinteraksi dan merespon pendukungnya, *influencer*, *legislator*, kompetitor, dan *general public* dalam rangka pengembangan dan adaptasi kebijakan dan strategi.
- Menjawab kebutuhan semua *stake holder*, melalui *diverse media*, berbagai informasi, saran dan kepemimpinan yang diharapkan atau diisyaratkan dalam sebuah negara yang demokratis.
- Menyediakan pelatihan, sumber informasi dan alat-alat kampanye untuk kandidat, agen, *marketers*, dan atau aktifis partai lokal lainnya.
- Berusaha mempengaruhi dan menghibau pemilih, media dan *influencers* penting lain untuk mendukung kandidatnya dan atau tidak memilih kompetitornya.

2.3.2. Politik dan Segmentasi Pasar.

(Bannon, 2004,15-23) berpendapat tentang luasnya tehnik segmentasi digunakan oleh *political marketers* diberbagai belahan dunia. Namun demikian hal ini tidak menghapuskan dikotomi yang ada karena banyak juga para ahli yang menentang penerapan segmentasi dalam dunia politik.

Bannon pada tulisannya membuat contoh bagaimana ia membagi *political market* ke dalam beberapa segmen :

Tabel 2.1
Segmen-Segmen dalam Market Politik

Segmen	Perilaku	Hasil yang diharapkan	Action Plan
Politisi	Political representative	Competen/dipilih kembali	Strategic input dan implementasi
Pengurus partai	Politically active	Evangelist	Keterlibatan dalam proses keputusan
Anggota partai	Positive Advocate	Loyalitas	Menjaga hubungan
Supporter	Active	Suara/keanggotaan/sumbangan	Informi, pelihara dan membangun relasi
Potential supporter/masa mengambang	Passive	Suara	Komunikasi dan bujuk untuk mendukung
Non-Voter	Inactive	Menjadi aktif	Komunikasikan pentingnya memilih
Non-Supporter	Active negative	Inactivity/apathy	Abaikan buat bingung, tekan
Oposisi	Negative advocate	Neutralise	Dis-informasi negative campaign

Sumber : Declan P. Bannon (2004)

Era Reformasi telah merubah sistem perpolitikan di Indonesia ke arah lebih demokratis berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kajian dan praktik komunikasi politik, dan pemasaran politik (*political marketing*). Hal ini dapat dilihat dari maraknya jejak pendapat yang dilakukan institusi-institusi dan lembaga survei dan iklan politik yang bertebaran di manapun, baik media massa menjelang pemilihan umum baik legislatif, bupati, walikota, gubernur, maupun presiden.

Political marketing merupakan konsep yang diadopsi dari dunia bisnis (pemasaran). Dasar dari kerangka konseptualnya adalah bahwa *political marketing* menunjukkan karakteristik “*structural*”, seperti sifat produk, organisasi, dan pasar serta karakteristik “proses” yang mendefinisikan, mengembangkan, dan memberikan nilai. Dengan menggunakan karakteristik ini dan menyelidikinya untuk melihat implikasi pemasarannya, orang yang berkampanye dilengkapi dengan lebih baik untuk mengkonseptualisasikan lingkungan dan mengembangkan strategi yang tepat.

Pemasaran politik dapat diartikan sebagai aplikasi prosedur dan prinsip-prinsip pemasaran di dalam kampanye politik oleh sejumlah individu dan organisasi. Prosedur tersebut meliputi analisis, pengembangan, eksekusi dan strategi manajemen kampanye oleh kandidat, partai politik, pemerintah, para pelobi dan kelompok kepentingan guna mengarahkan opini publik, memperteguh ideologi, memenangkan pemilu dan merebut kursi legislatif di dalam masyarakat (Coolins dan Butler dalam Newmann, 1999,5).

Sedangkan pengertian pemasaran, adalah seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran serta mendapatkan mempertahankan, dan menambah jumlah pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan pengkomunikasian nilai pelanggan yang unggul. (Philip Kotler dan Neil Kotler dalam Newmann,1999,3).

Secara filosofi pemasaran sesungguhnya bermakna relasional, yakni mekanisme pertukaran ide, gagasan ideology antara konstestan dengan konstituen. Partai Politik dan kandidat mencoba menyusun program kerja dan kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Program kerja dan kebijakan tersebut selanjutnya dikomunikasikan kepada konstituen. Konstituen memberikan umpan balik yang berupa dukungan dan donasi. Pola inilah yang membentuk hubungan relasional. Peran konstituen tidak terbatas sewaktu Pemilu saja. Untuk dapat membangun loyalitas kepada partai politik atau konstituen politik atau konstituen individu, Konstituen perlu dibina dan dipertahankan

serta dimengerti dalam hal yang menyangkut permasalahan mereka. Di samping itu, partai politik perlu memikirkan identitas partai politik mereka sekaligus untuk membedakan partai mereka yang khas dengan partai politik lain, baik dari sisi ideologi, program kerja sampai pada atribut fisik seperti simbol, logo, dan warna yang digunakan.

Kotler selanjutnya menguraikan bahwa pemasaran politik memiliki banyak kesamaan dengan pemasaran dalam dunia bisnis. Bila dalam dunia bisnis penjual menawarkan barang dan jasa yang dikomunikasikan ke pasar (melalui iklan) dan sebagai umpan baliknya berupa uang (konsumen pembeli), informasi (penelitian konsumen), dan kesetiaan pelanggan (*loyalty*). Maka dalam hal pemasaran politik (kampanye), kandidat menawarkan janji, kebijakan dan kepribadian guna mempengaruhi pilihan pemilih, usaha-usaha sukarela dan kontribusi (Kotler dalam Newmann, 1999,10).

PKP INDONESIA melihat jumlah penduduk perempuan hampir berimbang dengan jumlah penduduk laki-laki menjadikan suatu peluang. Di mana secara kebetulan di Ketuai oleh seorang perempuan yang tentunya keterwakilan perempuan sudah teradopsi, hal tersebut menjadi nilai tambah, dimana proses pemasaran politik dilakukan untuk perekrutan para perempuan agar mau dan aktif menjadi anggota legislatif dan juga untuk memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang partai politik mengenai persentase keterwakilan perempuan dalam partai politik sebesar 30 persen.

Pada Pemilu 2009 jumlah seluruh Calon Legislatif (Caleg) PKP INDONESIA adalah 315 Caleg di mana jumlah Caleg laki-laki sebesar 173 dan Caleg Perempuan sebesar 142 dan Proporsi jumlah Caleg perempuan sebesar $142/315 \times 100\%$ adalah 45.08%

2.3.3. Market Oriented Party.

Dalam keterkaitannya dengan partai politik, Less Marshment menjelaskan bahwa dalam *political marketing* jenis partai politik diasosiasikan dengan *product Oriented party*, yakni partai percaya pada produk yang dihasilkannya, dalam hal ini kandidat, ideologi, program serta ide-idenya, partai politik menolak untuk mengubah produknya walaupun tidak populer dan berpotensi kalah dalam pemilihan. Pada *sales orientes party*, partai percaya pada produk yang dihasilkannya tetapi menyadari bahwa pemilih harus diyakinkan untuk memilih produk tersebut, dengan menggunakan iklan politik, dan tehnik persuasi lainnya sedangkan pada *market oriented party* berpendapat bahwa perlu penelitian terlebih dahulu tentang apa yang diinginkan oleh masyarakat sebelum membuat design produk atau program, sehingga produk yang dibuat benar-benar mencerminkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, (Marshment (2001) dalam Quin, 2008, 5). Masyarakat di sini tentunya adalah masyarakat yang tertarik untuk masuk ke bidang politik melalui Partai Politik.

Perkembangan *political marketing* bergerak dari *Product Oriented Party (POP)* pada sekitar tahun 1940-1950-an ke *Sales Oriented (SO)* sekitar tahun 1960-an kemudian ke arah *Market Oriented Party (MOP)*. Tahapan pada *Product Oriented Party* terdiri dari tahap pembuatan produk, kemudian setelah produk tersebut selesai di rancang. Tahap kedua adalah tahap komunikasi, yakni tahap di mana partai mengkomunikasikan produk pada pemilih sebelum kampanye, tahapan ketiga adalah tahapan kampanye, yakni mengkampanyekan produknya pada pemilih kemudian tahapan penyampaian tentang apa yang sudah dikampanyekan dalam bentuk implementasi. Pada POP ini lebih banyak didorong oleh faktor ideologis sehingga kemungkinan untuk kalah dalam pemilihan sangat besar (Marshment (2001) dalam Quin, 2008, 5).

Sales Oriented Party dimulai pada tahapan pembuatan produk, kemudian dilakukan *market intelligence*, tetapi tanpa merubah produk

yang ditawarkan, dengan cara membuat pemetaan tentang pemilih, ketiga adalah komunikasi yakni melakukan proses *persuasi* dan iklan-iklan untuk menjaring lebih banyak dukungan dari pemilih terhadap produk yang ditawarkan. Tahap kedua adalah kampanye, setelah itu tahapan penyampaian produk. Pada partai dengan orientasi ini sudah disadari pentingnya *market intelligence*, tetapi sifatnya bukan mencari apa yang dibutuhkan pemilih tetapi pada tahapan mencari faktor yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan *persuasi* agar produk dari partai politik tersebut dapat diterima pemilih (Marshment (2001) dalam Quin,2008,5)

Market Oriented Party, dilakukan *pertama* kali adalah *market intelligence* untuk melihat apa yang diinginkan dan dibutuhkan pemilih, setelah itu tahap *kedua* dengan merancang produk, tahapan *ketiga* dengan penyesuaian produk. Kemudian tahap *keempat* implementasi produk, tahap *kelima* tahapan mengkomunikasikan produk ke pemilih, tahap *ke enam* adalah kampanye, kemudian masuk dalam tahapan pemilihan dan terakhir pada tahap penyampaian program. (Marshment,2001 dalam Quin,2005,5). *Political marketing* lebih dari sekedar sales, atau dalam termin politik yakni kampanye. Levit (1960:50: Marshment, National Europe Centre paper No.110:3) mengatakan bahwa perbedaan antara *marketing* dan *selling* lebih dari sekedar semantik, *selling* berfokus pada kebutuhan dari penjual sedangkan *marketing* menekankan pada kebutuhan pasar atau pembeli. *Selling* berasosiasi dengan kebutuhan penjual untuk menukarkan produk atau barang yang dimilikinya dalam bentuk uang sedangkan *marketing* dengan ide untuk memuaskan kebutuhan konsumen dengan produk dan hal lain yang berkaitan dengan keseluruhan bagian hal-hal yang diasosiasikan dengan pembuatan, penyaluran dan terakhir konsumen.

Hal ini sejalan dengan pendapat Marshment yang mengatakan bahwa ketika partai politik mengimplementasikan filosofi *marketing* dalam menentukan semua aspek dari perilakunya, maka ia akan

berusaha untuk mempertemukan kebutuhan dan keinginan pemilih, kemudian memproduksi kepuasan pemilih dan dengan melakukan hal tersebut untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum agar tujuan-tujuan personal partai politik tersebut tercapai. *Market Oriented Party* (MOP) adalah salah satu cara untuk menentukan perilaku dalam rangka memberikan keinginan pemilih dan secara tidak langsung juga memenuhi tujuan partai tersebut. (Marshment, National Europe Centre paper No. 110:3-4)

Model MOP ada 4 aktifitas utama dimana partai politik dapat menggunakan *Political Marketing* dalam menentukan semua aspek dari perilakunya (Marshment, National Europe Centre paper No. 110, 4-6) yakni penggunaan dari *market intelligence* : partai politik akan berusaha untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, perilaku, dan tuntutan dari pemilihnya, (komunikasi partai-pemilih dalam arti yang luas), dengan berbagai sumber dan macam cara. Baik dilakukan secara formal maupun informal, secara *kualitatif* maupun *kuantitatif*, dengan metode penelitian langsung maupun penelitian tidak langsung yang dilakukan oleh partai politik, ataupun dengan menyewa professional untuk melakukan hal tersebut.

Perilaku adaptasi atau *adaptation behavioral* adalah penggunaan selanjutnya, dimana partai politik kemudian akan mengadopsi perilaku tersebut atau membuat “produknya” berdasarkan temuan dari pasar produk dari partai politik tersebut. Proses adaptasi ini dilakukan bukan hanya sekedar slogan yang berupa poster atau iklan politik dalam kampanye saja, tetapi merupakan aspek perilaku yang ditujukan sepanjang waktu, bukan hanya pada saat pemilu, dan pada semua tingkatan partai (bukan hanya pemimpin partai saja tetapi hal lain seperti;kekuatan, sifat dasar kepemimpinan, anggota, staf, konstitusi dan kebijakan). Proses adaptasi yang diperhatikan antara lain apakah pembuatan partai politik tersebut mungkin untuk dilakukan, harus juga memperkirakan reaksi dukungan internal terhadap perubahan perilaku partai politik, memperhitungkan analisa kompetisi dan

dukungan dari pemilih dan partai saingan (Marshment, National Europe Centre paper No. 110:4)

Tahap berikutnya, partai politik kemudian akan meyakinkan bahwa desain produk tersebut akan diimplementasikan pada semua tingkatan atau lazim disebut Organisational implementation. Hal ini penting agar dapat efektif dan menarik dukungan dari pemilih. Pada proses ini diperlukan penanganan yang sangat hati-hati karena bila tidak, akan menimbulkan resistensi di dalam partai politik itu sendiri. Semakin besar tingkat perubahan dalam perilaku yang dihasilkan dibutuhkan semakin sulit tugas pemimpin untuk mendapatkan dukungan bagi perubahan tersebut (Marshment, National Europe Centre paper No. 110:5)

Tahap ke empat, *conveyance of new behavior* atau menyampaikan perilaku yang baru: partai politik melibatkan diri untuk menyampaikan perubahan perilaku atau perubahan desain produk dengan cara yang positif pada pemilih. Proses penyampaian ini dilakukan pada setiap tingkatan dan dilakukan setiap waktu, karena penyampaian perubahan pada saat kampanye adalah kesempatan terakhir untuk partai dalam menyampaikan “produk” nya pada pemilih (Marshment, National Europe Centre paper No. 110:5-6)

2.4. Kampanye Politik

Kampanye Politik merupakan bagian dari political marketing. Kampanye politik menurut Dan Nimmo (1978) adalah suatu kampanye politik pada dasarnya adalah suatu kerja yang berkelanjutan di dalam membentuk kembali serta memindahkan suatu pesan atau symbol yang mempunyai makna melalui proses komunikasi. Kampanye politik mempunyai kaitan erat dengan partisipasi aktif antara *campaign* dengan *voters*-nya. Yang dimaksud *Campaigners* tidak lain adalah : kandidat, penasehat, konsultan dan lainnya. Mereka ini fungsinya adalah mencoba mengelola impresi pemilih merupakan bagian daripadanya dengan cara

mengekspresikan simbol-simbol yang mereka harapkan akan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam benak para pemilihnya.

Nimmo juga mengatakan bahwa pelaksana kampanye adalah tidak lain merupakan keseluruhan yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan kampanye. Mereka adalah tenaga ahli yang memiliki keprofesionalannya di dalam mengelola suatu kegiatan kampanye politik, antara lain mereka adalah : perusahaan yang mengelola suatu kampanye politik, konsultan, staf PR, *political pollster*, *television directors* beserta manajer atau direktur produksinya, para penghimpun dana (*Fundraisers*), para spesialis dalam bidang *mass mailing* dan para penulis pidato (*speech writers*). Untuk bisa menang dalam pemilu, mereka harus menggunakan pendekatan komunikasi persuasif, khususnya mass persuasion. Tujuan dari mass persuasion adalah mengubah dari suatu sikap itu kemudian menjadi alat penggerak respons dari sikap yang tidak sama menjadi sikap yang sama sehingga akhirnya merupakan bagian atau milik bersama.

Walaupun kampanye politik tidak sama dengan kampanye untuk *consumer goods*, namun keduanya digunakan sebagai sarana informasi dan promosi. Sebagai sarana informasi kampanye politik mencoba mengkomunikasikan kepada para pemilih dan calon pemilih tentang kualitas kandidat yang akan menduduki jabatan politik yang ingin ditawarkannya kepada publiknya. Sementara sebagai sarana promosi, maka kampanye politik dapat memperlakukan kandidat suatu produk yang dapat dijual. Newman (1999) menjelaskan bagaimana *marketers* mampu mentransformasikan model pemilihan presiden di Amerika. Bagaimana taktik pemasaran telah digunakan dalam membentuk kebijakan public bagi mereka yang ada di istana, kepresidenan atau di Kongres.

2.5. Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat, dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan an berkembang menjadi penghubung

antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu proses sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri, maka dari itu, dewasa ini di negara-negara baru pun partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai. (Budiarjo, 2004, 158)

Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab, sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang merupakan undang-undang hasil reformasi.

Partai Politik menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah : Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai syarat pembentukan partai politik juga telah diatur pada pasal 2 pada Undang-undang tersebut dan mengenai keterwakilan perempuan pada partai politik juga telah diatur pada Ayat 2 dari pasal tersebut yang berisi : Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan; dan pada Ayat 5 yang berisi : Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. (UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik)

Keberadaan partai politik di negara yang menganut sistem politik demokrasi seperti Indonesia merupakan suatu keharusan mutlak, karena partai politik merupakan institusi politik demokrasi dengan makna bahwa organisasi suatu partai politik ini dapat menjadi milik semua golongan yang ada dalam masyarakat. Partai politik menurut Sigmund Neumann

adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.. Neuman mengemukakan bahwa fungsi utama partai politik adalah (1) sebagai sarana pengatur kehendak masyarakat yang sangat beragam, (2) mendidik masyarakat agar bertanggung jawab secara politik, (3) ketika menjadi penghubung antara pemerintah dan kepentingan masyarakat, (4) memilih para pemimpin (Sigmun Neumann dalam Miriam Budiarjo, 1998,17,71-73).

Pada Pemilu 2009 jumlah partai politik peserta pemilu bertambah dibandingkan pemilu 1999, dari 24 partai politik menjadi 44 partai politik yang terbagi menjadi 38 partai politik nasional dengan nomer urut partai dari 1 sampai 34 dan 41 sampai 44. Sedangkan partai politik lokal ada 6 partai. Dari ke 38 partai nasional, 20 partai merupakan partai peserta pemilu tahun 2004 dan 3 partai merupakan peserta pemilu 2004 tapi berganti nama partai antara lain : Partai Indonesia Baru (PIB) menjadi Partai Perjuangan Indonesia Baru(PPIB), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) menjadi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) menjadi Partai Benteng Nasional Kerakyatan Indonesia (PNBKI) sedangkan sisanya sebanyak 15 partai merupakan partai baru. (Dokumen Internal PKPI 2008)

Dengan demikian partai politik menurut Neuman merupakan perantara yang akan menghubungkan kekuatan-kekuatan dan idiologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang luas. Pengertian ini sejalan pandangan Giovanni sartori yang melihat partai politik sebagai sebuah sistem politik yang didalamnya terdapat struktur kewenangan, proses perwakilan, sistem pemilihan, proses rekrutmen kepemimpinan, memiliki tujuan dan mengatasi konflik internal. Berdasarkan definisi tersebut, partai politik yang dimaksud dalam al ini adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA)

sebagai partai yang akan mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 dengan nomor urut tujuh (7). PKP INDONESIA adalah partai yang berazaskan Pancasila dan menganut *pluralisme* dalam proses perekrutan anggota-anggota untuk dijadikan pengurus ataupun perekrutan kader-kadernya.

Dengan demikian dapat disebut bahwa PKP INDONESIA hanya terdiri orang-orang atau golongan yang berupaya memperoleh serta menggunakan kekuasaan politik dengan tujuan mempengaruhi kebijakan umum, dan kepemimpinan dalam PKP INDONESIA bukanlah secara kebetulan adalah seorang perempuan tapi kepemimpinan perempuan di PKP INDONESIA ini adalah melalui proses Rakornas yang akhirnya pada Januari 2008 melalui suara terbanyak dalam Rakornas partai dipilihlah dan disepakai Ibu Meutia Hatta Swasono, yang pada sejak 2004 sampai 2009 beliau di beri tugas sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan beliau juga putri pertama dari Bapak Proklamator yaitu Bung Hatta. yang sebelumnya jabatan ketua umum sempat vakum karena meninggalnya ketua umum sebelumnya yaitu Bp. Edi Sudrajat pada tanggal 1 Desember 2006.

Terkait dengan fungsi komunikasi politik, partai politik selalu dituntut memiliki kemampuan dalam menjalankan perwakilan, mempengaruhi pergantian kepemimpinan politik baik nasional maupun lokal secara teratur dan damai.

Keterwakilan perempuan dalam partai politik juga ditekankan dalam setiap undang-undang Republik Indonesia yaitu Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 2 tentang Partai Politik, UU RI No. 22 tahun 2007 tentang Pemilu, UU RI No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang didalam semua Undang-undang tersebut ada pasal yang berisi mengenai keterwakilan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

Amanah undang-undang mengatur kuota perempuan sebagai caleg dianggap angin lalu. Buktinya, dari 44 partai politik peserta pemilu, baik

berbasis nasional maupun lokal, hanya 21 di antaranya memenuhi 30 persen kuota keterwakilan perempuan. meskipun secara persentase kuota perempuan terpenuhi, tapi secara kuantitas hanya beberapa partai menempatkan wanita di atas 10 orang. Selebihnya di bawah lima orang.

Ke-21 partai yang memenuhi kuota tersebut adalah Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian, Partai Pemuda Indonesia, Partai Nasional Indonesia Marhaenis, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi. Selanjutnya, Partai Demokrat, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia. (<http://www.kpu.go.id>)

2.5.1. Calon Legislatif

Salah satu syarat tahapan menarik dalam Pemilu adalah pendaftaran calon dan penelitian persyaratan calon, dalam *textbook* pemilu dikenal tiga jenis seleksi. (Prihatmoko,2003,103). *Pertama*, seleksi administratif. Jenis seleksi ini berhubungan dengan kualifikasi standar yang harus dimiliki calon, biasanya minimal. Menjadi calon adalah hak warga tapi tak semua warga bisa menjadi calon. Batasan minimalnya ditunjukkan dengan kriteria-kriteria yang menjadi prasyarat (kualifikasi administratif).

Kedua, seleksi implikasi sistem. Seleksi ini merupakan implikasi dari perundang-undangan. Dalam Pemilu 2004 dan 2009, sistem tidak mengakomodir calon independen, sebagaimana terjadi di Pemilu 1955 atau pencalonan harus melalui partai. Adapun peserta perseorangan diakomodir dalam pemilihan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). *Ketiga*, seleksi berdasarkan sistem pemilihan. Seleksi ini dilakukan

melalui pemungutan suara di mana keterpilihan calon berdasarkan sistem pemilihan yang ditentukan.

Secara teknis seleksi administratif diwujudkan dengan kriteria prasyarat yang harus dipenuhi calon. Prasyarat harus akseptabel terhadap tuntutan masyarakat agar legislatif berkualitas dan beratnya tanggung jawab. Karena dimensi politis pencalonan amat kuat maka prasyarat terbatas pada hal-hal yang berstandar minimal (*legitimasi yuridis*). Untuk hal-hal seperti moralitas dan dukungan diserahkan pada pemilih (*legitimasi politis dan sosiologis*). Prasyarat itu sangat bermanfaat bagi pemilih dalam seleksi politis. Artinya, pemilih dihadapkan pada calon yang diasumsikan memiliki standar kualifikasi setingkat.

Pada aras teknis, penelitian administratif terhadap prasyarat diperlukan untuk membatasi wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sehingga pendekatan bersifat legal formal. KPU/KPUD memberikan apresiasi positif terhadap instansi atau lembaga yang berwenang mengeluarkan rekomendasi atau pernyataan, seperti Rumah Sakit (RS) Pemerintah, Depdiknas, dan Pengadilan Negeri, yang dibutuhkan calon. Pada arah substansi, penelitian administratif membuka kesempatan seluas-luasnya warga yang memiliki hak pilih untuk menjadi calon. Dalam konteks itu, screening atau litsus Orde Baru menjadi tak relevan.

Uraian itu mengandung dua implikasi. Disatu sisi, instansi-instansi yang mengeluarkan prasyarat, seperti Diknas untuk ijasah/STTB; RS pemerintah untuk keterangan sehat jasmani dan rohani; PPS untuk terdaftar sebagai pemilih dan sebagainya, dituntut memiliki tanggungjawab hukum dan profesional. Mereka yang mengeluarkan prasyarat secara tidak prosedur dan taat hukum berarti melakukan pembodohan politik.

2.5.1.1. Syarat-syarat Calon Legislatif

Prasyarat calon anggota legislatif Pemilu 2004 dan 2009 lebih maju dibanding sebelumnya. Secara kelembagaan, kemajuan yang nampak adalah bahwa nomor urut dan nama calon yang diajukan partai merupakan hasil seleksi demokratis dan terbuka (Model B dan BA-1).

Persyaratan menjadi calon anggota legislatif tertuang pula pada UU RI No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu, Anggota DPR, DPD, DPRD pada pasal 12 adalah (a) WNI yang telah berusia 21 tahun atau lebih; (b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c) Bertempat tinggal di wilayah NKRI; (d) Cakap berbicara, menulis dan bercakap dalam bahasa Indonesia; (e) Pendidikan paling rendah tamat SMA dan sederajat; (f) Setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945; (g) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara; (h) Sehat jasmani dan rohani; (i) Terdaftar sebagai pemilih; (j) Bersedia bekerja penuh waktu; (k) Mengundurkan diri sebagai PNS, Tentara/Polisi, BUMD/BUMD dan badan sejenis; (l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publi, advokat/pengacara, pejabat pembuat akta tanah dan profesi lain yang sederajat; (m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan pejabat negara dan pengurus BUMN/BUMD dan yang sederajat; (n) Mencalonkan hanya di satu lembaga perwakilan; (o) Mencalonkan hanya di satu daerah pemilihan.

Secara umum syarat para calon legislatif yaitu melengkapi formulir isian dari mulai : model (BB) formulir surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon anggota legislatif, model (BB-1) formulir surat pernyataan beragama dan cakap berbicara, membaca, menulis dalam bahasa Indonesia; model (BB-2) formulir surat pernyataan setia kepada dasar negara, UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; model (BB-3) formulir surat keterangan catatan kepolisian (SKCK); model (BB-4)

formulir surat keterangan domisili/tempat tinggal caleg; model (BB-4.1) formulir surat keterangan WNI yang bertempat tinggal di Luar Negeri; model (BB-5) formulir surat pernyataan kesanggupan caleg untuk bekerja penuh waktu sebagai anggota legislatif; model (BB-6) formulir surat pernyataan tidak melakukan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota legislatif; model (BB-7) formulir surat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Anggota TNI /Polri dan pengurus BUMN/BUMD; model (BB-8) surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pengurus BUMN / BUMD; model (BB-9) formulir surat keterangan kesehatan / berbadan sehat jasmani dan rohani; model (BB-10) surat keterangan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih /DPT; model (BB-11) formulir surat daftar riwayat hidup.

Adapun kemajuan secara individual antara lain, disertai lampiran ijasah yang telah dilegalisir, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani harus dari Rumah Sakit Pemerintah / minimal Puskesmas, pernyataan kecakapan berbahasa Indonesia (BB-1), dan persyaratan tidak sedang dicabut hak pilih atau menjalani pidana penjara (BB-3) harus diperoleh melalui kepolisian setingkat Polres/Polda.

2.5.2. Kebijakan Internal dan Seleksi Calon Legislatif.

Salah satu fungsi dari partai politik yang tidak tergantikan adalah fungsi dan haknya untuk menominasikan kandidat untuk jabatan politik tertentu. Khususnya di Indonesia hal ini telah berlaku sejak awal diadakannya pemilihan umum. Walaupun kecenderungan baru belakangan ini, karena adanya krisis kepercayaan terhadap partai politik, mulai bermunculan ide tentang kandidat calon anggota legislatif dari mulai kandidat independen yang maksudnya kandidat

non partisan dan kandidat partisan yang berasal dari partai politik. Gejala ini muncul di Nanggroe Aceh Darussalam dan tampaknya akan meluas ke wilayah lain (tesis Dooradi, 2006, 44).

Namun demikian moment ketika sebuah partai menentukan siapa yang menjadi Calon Legislatif yang dipilih melalui proses selektif oleh tim penjaringan internal partai dan hal ini menjadi indikator kuat dari kondisi demokrasi internalnya (Scarrow, 2005,7). Partai yang lebih terbuka terhadap anggotanya biasanya menggunakan proses pemilihan caleg dengan mekanisme penjaringan langsung oleh anggota/pengurus partai yang memang memiliki hak suaranya yang dikenal sebagai *primary election*. Partai semacam ini juga dapat memilih calonnya dengan cara perwakilan, dimana mereka memilih orang yang diutus sebagai delegasi didalam konvensi pemilihan di tingkat atasnya (Scarrow, *ibid*).

Walaupun demikian, partai perlu juga membatasi pihak yang berhak memberikan ini dengan aturan yang demokratis. Karena kalau tidak dibatasi, kuatirnya proses pemilihan akan terkontaminasi oleh orang-orang luar partai yang mungkin tidak memahami visi dan misi partai tersebut. Dalam sebuah partai yang demokratis, proses dan mekanisme pemilihan calon akan dibakukan melalui peraturan yang disusun secara demokratis pula. Apakah calon dipilih dengan mekanisme *primary election*, siapa yang menentukan syarat menjadi kandidat, siapa yang menentukan syarat seorang anggota partai didalam proses pemilihan serta bagaimana persyaratan menjadi calon seharusnya diatur dan disepakati oleh seluruh anggota partai di tingkat daerah sampai di tingkat nasional jauh sebelum *primary election* itu diadakan.

Menarik juga untuk diketahui bahwa cara yang akhirnya diambil oleh sebuah partai untuk nominasi calon mungkin juga dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat partai itu berada. Misalnya di sebuah negara atau provinsi yang secara geografis sangat luas, akan menyulitkan bila sistem penjaringan adalah satu pengurus partai

memiliki suara. Karena berarti proses penjaranga akan berjalan sangat sulit karena harus mengumpulkan minimal melebihi lima puluh perseratus (50%) dari forum dalam waktu tertentu oleh sebab itu sistem perwalian atau pemilihan berjenjang mungkin diambil untuk alasan praktis. Namun demikian ada juga yang akhirnya memilih metode dengan membuat tim khusus. Dengan demikian kadar inklusivitas tetap terjaga sekaligus dari segi biayapun tidak terlalu mahal.

2.5.3. Politik dalam Perspektif Perempuan

Politik dalam perspektif perempuan berarti pandangan perempuan diakui dan dihargai, hak perempuan mengatur kehidupan dikembalikan kepada hakekatnya. Kaum perempuan sendiri menyadari tugas pokoknya sebagai pembawa dan pemelihara kehidupan. Tugas-tugas yang bermuatan kekuasaan mutlak ini membutuhkan kesadaran kaum perempuan secara lebih mendalam.

Adanya kesadaran ini maka kaum perempuan dapat mengontrolnya agar supaya tidak dikendalikan oleh kaum laki-laki. Laki-laki dan perempuan kembali bersama-sama menyatukan pandangan mereka yang berbeda untuk melakukan kegiatan politik yaitu mengatur segala aspek kehidupan tanpa membuat dikotomi kuat – lemah, *nurture-nature*, produksi-reproduksi dan banyak pasangan dikotomis lainnya yang diletakkan berposisi pada ordinat sub ordinat (Murniati,2004,134). Namun tentu perjuangan untuk mencapai perubahan itu mestilah dilakukan tanpa kekerasan. Hal itulah yang menjadi ukuran penting apakah feminisme berjalan secara konsisten atau sama saja dalam menjalankan politik *maskulinisme*.

Perkembangan pengertian politik sendiri didasari cara pandang *biner patriarchist*, akhirnya menciptakan pengertian politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Pengertian politik (klasik) yang semula sebagai suatu musyawarah warga negara untuk membicarakan dan menyelenggarakan segala

aspek kehidupan telah berubah. Politik telah menjadi ilmu yang mempelajari hakikat kedudukan dan menggunakan kekuasaan dimanapun kekuasaan itu ditemukan. Pengertian politik ini menganggap perempuan sebagai manusia yang tidak boleh berkuasa.

Perempuan sudah diberi peran banyak dibidang pembangunan tetapi kedudukan yang diberikan perempuan masih belum kelihatan jelas. Posisi-posisi penting masih diduduki dan di dominasi kaum laki-laki. Berbagai alasan dibuat seperti kaum perempuan belum siap, kurang mampu, terlalu emosional dan sebagainya. Alasan ini selalu digunakan sebagai pembenaran untuk memperlakukan kaum perempuan secara tidak adil.

Masyarakat kita yang masih bercorak paternalistik dan memiliki kecenderungan untuk mengikuti fatwa para pemuka agama biasanya akan memilih para calon yang mendapatkan "restu" dari para pemuka agama. Meskipun perempuan seringkali relatif lebih dekat dengan massa pemilihnya namun perjuangan mereka sangat ditentukan oleh iklim sosial budaya mereka apakah cukup kondusif untuk berjuang melalui jalur politik atau tidak.

Interpretasi keagamaan yang seringkali muncul adalah berasal dari wacana yang didominasi oleh kaum agamawan yang berjenis kelamin laki-laki dan disosialisasikan melalui lembaga-lembaga keagamaan yang selama ini juga didominasi kaum laki-laki. Hal itu yang menimbulkan adanya prasangka-prasangka *misoginis* (membenci perempuan) dalam setiap informasi yang disajikan. (Kusumaningtyas, 2004). Prasangka *misoginis* itu telah merambat ke segenap ruang tanpa harus di dikotomikan apakah itu domestik atau publik, namun sangat terkait dengan relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki dan perempuan. Efek yang cukup penting adalah terserapnya pemahaman-pemahaman keagamaan yang membatasi gerak perempuan termasuk hak-hak politiknya.

Jelaslah, bahwa kondisi perempuan saat ini masih timpang. Di sinilah perlunya pemberlakuan kuota. Kuota merupakan salah satu

bentuk tindakan khusus sementara yang perlu diambil untuk mempercepat persamaan kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan. Adalah fakta bahwa kebanyakan perempuan saat ini terjebak dalam kemiskinan dan tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai manusia. Sementara itu, nilai-nilai sosial budaya dan watak patriarkis negara menghambat dan menutup kesempatan perempuan untuk menjadi pengambil keputusan. Umumnya laki-laki masih sangat sulit menerima kehadiran perempuan di lembaga pengambilan kebijakan. Sebagai akibatnya, jumlah perempuan di lembaga pengambil kebijakan/keputusan sangat kecil, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah cenderung mengabaikan kepentingan dan hak-hak perempuan. Kuota menjadi penting agar jumlah perempuan di tingkat perumus kebijakan dan pengambilan keputusan dapat meningkat secara lebih seimbang agar perempuan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang memuat kepentingan perempuan.

Secara umum ada tiga faktor yang cukup berpengaruh untuk menentukan keterwakilan perempuan dalam bidang politik, yaitu Sistem Pemilu, Peran dan Organisasi Parpol serta penerimaan kultural, termasuk aksi mendukung yang bersifat wajib dan sukarela. Saat ini, salah satu upaya yang dianggap paling strategis untuk memposisikan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan (decision maker) adalah dengan penetapan sistem kuota perempuan di parlemen. (Dokumen Internal PKPI)

Kini, kuota 30% (tiga puluh perseratus) mencuat bersamaan dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 65 ayat 1 yang berbunyi, "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)".

Meski sifat rumusan yang sukarela, dicerminkan lewat kata 'dapat' dan tidak adanya sanksi, namun pasal ini berimplikasi adanya jaminan keterwakilan perempuan sebagai kebutuhan nyata meningkatkan representasi perempuan. Kuota 30% (tiga puluh perseratus) untuk perempuan artinya 30% (tiga puluh perseratus) menjadi batas minimal persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan.

Dengan adanya UU tersebut, jumlah perempuan di legislatif meningkat dari tahun 1999 yang hanya berjumlah 9% menjadi 11,8 persen pada saat ini. Perjuangan politisi perempuan tidak hanya bertujuan terpenuhinya kuota 30% (tiga puluh perseratus) di legislatif, tetapi juga di partai politik (parpol). Saat ini, dari 127 anggota DPD, kouta untuk perempuan baru tercapai 21% , sedangkan untuk DPR dari 550 anggota baru tercapai 11%. (dokumen internal PKPD)

Bahkan, untuk Pemilu 2009 mendatang, telah disahkan UU Pemilu yang baru yang di dalamnya bukan hanya mengatur tentang kuota perempuan di legislative tetapi juga mengatur tentang kuota 30% (tiga puluh perseratus) perempuan di parpol yaitu dalam Pasal 8 yang berbunyi, "Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan", salah satunya dalam point d berbunyi," menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat". Maka, untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa peran yang harus dilakukan oleh parpol yang akan menjadi peserta Pemilu 2009 : pertama, memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dapat terjun dalam bidang politik; kedua, meningkatkan kualitas perempuan-perempuan yang ada di parpol, sehingga ketika telah berada di legislatif dapat memperjuangkan aspirasi perempuan dan bukan hanya menjadi pelengkap; ketiga, berani untuk melakukan suatu perubahan yang berarti untuk masyarakat.

Tabel 2.2

**PASAL-PASAL PENJAMIN KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK
(UU Penyelenggara Pemilu, UU Partai Politik dan UU Pemilu)**

UU No. 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu	UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik	UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu
<p>Pasal 6 ayat 5:</p> <p>Komposisi keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.</p>	<p>Pasal 2 tentang Pembentukan Partai Politik:</p> <p>(Ayat 1) Partai Politik didirikan dan dibentuk paling sedikit oleh 50 orang WNI, berusia 21 tahun dengan akta notaris</p>	<p>Kepengurusan partai politik tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.</p>
<p>Pasal 43 ayat 3:</p> <p>Komposisi keanggotaan Panitia Pemilihan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.</p>	<p>(Ayat 2) Pendirian dan pembentukan partai politik di tingkat pusat menyertakan 30% keterwakilan perempuan.</p>	<p>Pasal 60:</p> <p>Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.</p>
<p>Pasal 73 ayat 8:</p> <p>Komposisi keanggotaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.</p>	<p>(Ayat 5) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.</p>	<p>Pasal 62 ayat 2:</p> <p>Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.</p>
	<p>Pasal 11 tentang Tujuan dan Fungsi Partai Politik</p> <p>Partai Politik berfungsi sebagai sarana untuk rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.</p>	<p>Catatan :</p> <p>Penyusunan daftar calon anggota legislatif harus dilakukan secara berselang-seling perempuan dan laki-laki (disebut "zipper"—seperti ritsleting yang tersusun berselang-seling), dari setiap tiga calon harus terdapat satu perempuan.</p>
	<p>Pasal 20 tentang Kepengurusan Partai Politik:</p>	

<p>Kepengurusan partai politik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD/ART Partai Politik masing-masing.</p> <p>Pasal 31 tentang Pendidikan Politik</p> <p>Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.</p> <p>Pasal 51 tentang Ketentuan Peralihan</p> <p>(Ayat 1) Partai Politik yang menurut UU No. 31/tahun 2002 tentang Partai Politik telah disyahkan sebagai badan hukum berdasarkan UU No. 31/2002, tetap diakui keberadaannya.</p> <p>(Ayat 2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), paling lama pada forum tertinggi pengambilan keputusan, Partai Politik pada kesempatan pertama sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini diundangkan.</p> <p>Catatan :</p> <p>UU Parpol baru ini tidak berlaku retroaktif (sebelum UU Parpol baru disyahkan). UU ini hanya berlaku bagi Parpol yang baru dan bagi Parpol lama tetap diharuskan menyesuaikan dengan UU baru.</p>	<p>Pasal 64 ayat 2:</p> <p>KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.</p> <p>KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan 1 kali kepada peserta pemilu (Partai Politik) untuk memperbaiki daftar calon.</p> <p>Pasal 73:</p> <p>KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan prosentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.</p>
--	--

Sumber : Telah diolah kembali

BAB 3 METODOLOGI

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini dengan menggunakan metode studi kasus terhadap partai politik dalam menjaring calon legislatif (caleg) sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Pemilu mengenai Partai Politik yaitu persentase keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, *metodologi kualitatif* merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistik* (utuh). Dengan demikian, tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. (Moleong, Lexy, 2005, 4)

Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dan lingkungannya serta hubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif yaitu berupa kata-kata dan gambar serta bukan angka-angka, sehingga laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari aktifitas wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya. (Kirk dan Miller dalam Moleong, Lexy, 2005, 5).

Kemudian menurut Denzin dan Lincoln, Penelitian kualitatif merupakan suatu aktifitas yang menempatkan peneliti di dalam dunia

tersebut. Di dalamnya termasuk interpretasi, suatu material praktis yang membuat dunia nyata. Penelitian kualitatif berfikir dalam latar belakang alamiah, berkeinginan melakukan interpretasi fenomena yang sesuai dengan pemaknaan masyarakat yang ditelitinya (Denzin & Lincoln, 2005,3)

Pendekatan penelitian melalui metode studi kasus akan menganalisa berbagai uraian dan penjelasan yang komprehensif mengenai aspek individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu peristiwa atau situasi nasional (Newmann,2004,32).

Pada dasarnya studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, organisasi (komunitas), peristiwa, atau suatu situasi sosial (Neumann, 2000,32). Disamping itu melalui studi kasus, situasi sosial tertentu akan memperoleh penjelasan yang sangat rinci (Neumann,2000,505).

Beberapa keuntungan atau keistimewaan studi kasus adalah (Lincoln dan Guba dalam Mulyana, 2003,201) :

1. Mampu menyajikan uraian yang menyeluruh
2. Mampu menggambarkan hubungan yang jelas antara peneliti dan responden.
3. Mengandung tingkat kepercayaan yang tinggi (*trustworthiness*)
4. Membuka peluang yang luas untuk penelitian karena unsur konteks yang beragam.

Selain karena kelebihan yang dimiliki oleh metode penelitian studi kasus seperti di atas, sesungguhnya pilihan menggunakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) lebih karena permasalahan penelitian yang menjadi pengarah mengapa studi kasus lebih tepat dipakai, karena persoalan penelitian berangkat dari bagaimana strategi yang digunakan PKPI dalam menjaring caleg untuk bisa mengikuti Pemilu 2009, permasalahan penelitian ini tidak tepat bila diungkap dengan metode survei.

3.2. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana peneliti berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara cermat mengenai suatu hal atau fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian. Dan juga berupaya membuat gambaran utuh dan detail dari sebuah situasi sosial tertentu, seperti pernyataan Neuman, 2000, 22 :

"The outcome of descriptive study is detailed pictur of the subject"

Di samping itu penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada permasalahan bagaimana sebuah peristiwa terjadi dan mengapa bisa demikian kondisinya (*"how" and "why" question*).

Analisis data, menurut Paton dalam Moleong, adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan penafsiran data yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian (Moleong, 2000, 103)

Dalam penelitian kualitatif tehnik analisis data tidak terstandarisasi karena pendekatannya yang sangat beragam, Selain itu analisa data bisa dimulai pada awal penelitian atau saat data sedang dihimpun. Ini berbeda dengan analisis data penelitian kuantitatif yang telah terstandarisasi karena menggunakan matematika sebagai alat analisisnya.

Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif, tehnik analisis data kualitatif memiliki tujuan menciptakan konsep atau teori baru dengan menggabungkan semua bukti empirik dengan konsep, tidak menguji hipotesis namun menggambarkan bukti dengan teori dan interpretas. Berdasarkan pemikiran ini, maka data yang dihasilkan dari penelitian lapangan (*data primer*) maupun melalui kepustakaan (*data sekunder*) disusun sedemikian rupa secara sistematis sebagaimana adanya pada tesis ini.

3.3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PKP Indonesia dipilih karena partai ini merupakan partai lama dan telah mengikuti 2 kali tahapan Pemilu dimana Pemilu 1999 nama awal partai ini pada saat itu adalah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dan pada Pemilu 2004 menggunakan nama PKP Indonesia dan pada Pemilu 9 April 2009 PKP Indonesia menjadi peserta Pemilu yang ketiga kalinya dengan nomor urut 7 (tujuh). Selain itu, partai ini menarik untuk diteliti karena beberapa pengurusnya adalah "pecahan dari Partai Golkar" dan sejumlah mantan petinggi Militer serta PKPI telah menempatkan Calon Legislatifnya melebihi kuota keterwakilan perempuan sebesar sebesar 45,08 %.

Penelitian ini mengambil PKPI mengingat Partai ini kepemimpinannya di emban oleh Putri seorang tokoh proklamator yaitu Ibu Meutia Hatta Swasono yang pada saat ini pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada kabinet menduduki posisi sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

3.4. Unit Analisis

Dalam penelitian ini. Yang menjadi fokus penelitian adalah Gambaran Kebijakan internal PKPI dalam menjaring Caleg perempuan hingga memenuhi target melebihi kuota keterwakilan perempuan yang telah diatur dalam undang-undang

Unit of observation yang digunakan meliputi :

- a. Kebijakan internal PKPI
- b. Informasi mengenai strategi komunikasi proses penjaringan caleg perempuan
- c. Faktor-faktor kekuatan dalam menjaring caleg perempuan
- d. Faktor-faktor kendala dalam menjaring caleg perempuan.

Yang menjadi *Unit of Responsenya* adalah :

- a) Meutia Hatta Swasono sebagai Ketua Umum PKP INDONESIA sebagai narasumber utama dan informasi yang ingin diperoleh antara lain kebijakan yang dikemukakan dan strategi yang dibuat serta faktor kekuatan dalam menjaring caleg khususnya caleg perempuan dan kendala yang ada.
- b) Eni Bushiri sebagai sebagai Dewan Penasehat PKP INDONESIA khususnya bidang perempuan, informasi yang ingin diperoleh adalah factor kekuatan dan kendala mengenai posisi perempuan dalam partai politik dan calon legislatif.
- c) Haidar R.S sebagai (Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, dan Ketua Tim Penjaringan Calon Anggota Legislatif) dan informasi yang ingin di peroleh mengenai strategi marketing politic dalam menjaring caleg khususnya caleg perempuan dan proses seleksi yang dilakukan serta factor-faktor kekuatan dan kendala dalam proses menempatkan caleg perempuan.
- d) Chusnul Mariyah Pengamat Politik dan sekaligus akademisi pada bidang ilmu politik. Informasi yang ingin diperoleh antara lain strategi marketing politic partai dalam menjaring caleg perempuan dan latar belakang kuota keterwakilan tiga puluh persen (30%) perempuan serta kendala perempuan dalam bidang politik.
- e) Yetty Ani Ethika Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Perempuan untuk dapil Jateng. Informasi yang ingin diperoleh antara lain seputar factor kekuatan PKP INDONESIA dalam menjaring caleg perempuan dan kendala yang dihadapi.

3.5. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data yang dilakukan adalah dalam bentuk wawancara dan studi literatur serta dokumen yang terkait dengan kegiatan PKPI secara internal yang berhubungan dengan masalah Strategi komunikasi partai politik dalam menjaring caleg perempuan.

Dalam hal ini bentuk wawancara yang akan dilakukan dengan beberapa narasumber sebagai key person yang mempunyai kepentingan yang terkait dengan pengambil keputusan internal Partai dan narasumber eksternal yang mempunyai keterkaitan dengan tema yang diambil, yang diharapkan dapat memperluas khasanah berfikir dalam penelitian ini, dan wawancara yang dilakukan secara mendalam tersebut dapat menemukan hasil yang optimal dalam penelitian ini.

Sedangkan studi kepustakaan dan literatur dalam penelitian ini adalah sebagai referensi dasar bahan analisa selanjutnya. Literatur diperoleh dari berbagai sumber tentunya berhubungan dengan masalah integritas dalam dunia politik khususnya terkait dengan strategi komunikasi partai politik. Disamping itu penelitian akan menggunakan berbagai dokumen mengenai kebijakan internal PKPI, dan media lainnya yang berhubungan dengan topik strategi komunikasi partai politik.

3.6. Kerangka Evaluasi

Metode penelitian data berupa matrix yang digunakan untuk membuat daftar pertanyaan harus berlandaskan (1) Tujuan penelitian dan (2) Kerangka konseptual

Tabel 3.1. Matrix Kerangka Evaluasi

Konsep	Variabel	Indikator	Pertanyaan
Strategi	Kebijakan	1. Proses 2. Langkah-langkah	1. Bagaimana proses kebijakan pada PKP INDONESIA ? 2. Bagaimana langkah-langkah kebijakan yang dibuat PKP INDONESIA ?

	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. komunikasi 2. Langkah-langkah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Strategi komunikasi pada PKP INDONESIA ?. 2. Bagaimana langkah - langkah strategi yang dibuat PKP INDONESIA ?.
	Target	Persentase	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hasil dari target penjangkaran caleg perempuan ?.
Faktor Kekuatan	Kekuatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Figur 2. Infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja yang menjadi factor kekuatan PKP INDONESIA dalam menjangk caleg perempuan?
Faktor Kendala	Kendala	Caleg perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kendala PKP INDONESIA dalam menjangk caleg perempuan?

Tabel 3.2. Reka Penelitian

Tema	Jenis Data	Metode	Sumber
Strategi	Data Strategi Komunikasi dan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mendalam • Penelusuran dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Umum PKP INDONESIA (Ibu Meutia Hatta Swasono) 2. Ketua Tim Penjaringan Calon Anggota Legislatif PKP INDONESIA (Haidar H.S) 3. Pengajar pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI sekaligus Pengamat Politik Perempuan (Chusnul Mari'yah)
Faktor Kekuatan	Data mengenai faktor-faktor kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mendalam • Penelusuran dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Umum PKP INDONESIA (Ibu Meutia Hatta Swasono) 2. Ketua Tim Penjaringan Calon Anggota Legislatif PKP INDONESIA (Haidar H.S) 3. Dewan Penasehat Perempuan PKP INDONESIA (Eni Bushiri)

			<p>4. Pengajar pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI sekaligus Pengamat Politik Perempuan (Chusnul Mari'yah)</p> <p>5. Caleg DPR RI PKP INDONESIA Perempuan (Yetty Ani Ethika)</p>
Faktor Kendala	Data mengenai kendala dalam penjangkaran caleg perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mendalam • Penelusuran dokumen 	<p>1. Ketua Umum PKP INDONESIA (Ibu Meutia Hatta Swasono)</p> <p>2. Ketua Tim Penjangkaran Calon Anggota Legislatif PKP INDONESIA (Haidar H.S)</p> <p>3. Dewan Penasehat Perempuan PKP INDONESIA (Eni Bushiri)</p> <p>4. Pengajar pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI sekaligus Pengamat Politik Perempuan (Chusnul</p>

			Mari'yah) 5. Caleg DPR RI PKP INDONESIA Perempuan (Yetty Ani Ethika)
--	--	--	--

3.7. Keabsahan Penelitian

Keabsahan penelitian merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan atau kesahihan suatu instrument. Suatu Instrumen dianggap abash apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Dengan Kata lain memperoleh data yang tepat dari variable yang diteliti.

Menurut Guba dan Lincoln dalam Bunguin (2003,59-62) terdapat empat alternatif alat ukur data kualitatif yaitu :

1. *Kredibilitas*. Data yang dihasilkan harus dapat dipercaya an diterima oleh key informan yang berhubungan langsung dengan variable data tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA).
2. *Transferabilitas*. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai Strategi Komunikasi Dalam Menjaring Caleg Perempuan, dan dapat diterapkan di partai lain.
3. *Dependenabilitas*. Dengan tehnik berbeda sekalipun akan menghasilkan data yang sama.
4. *Confirmabilitas*. Penelitian kualitatif ini sangat tergantung pada perspektif penelitian yang dilakukan, karenanya data yang dihasilkan harus dapat dikolaborasikan dengan hasil penelitian sejenis lainnya melalui proses konfirmasi dan /atau pengecekan.

3.8. Keterbatasan dan Kelemahan Penelitian

1. Penelitian ini di lakukan pada Calon Anggota Legislatif DPR RI saja, jadi untuk Caleg DPD dan DPRD tidak termasuk data yang di teliti.
2. Penelitian ini dilakukan setelah Daftar Caleg Tetap (DCT) DPR di tetapkan oleh KPU dan diumumkan ke publik melalui media.
3. Penelitian ini hanya bersifat kualitatif deskriptif dan menjelaskan hasil hasil yang telah dicapai oleh PKP INDONESIA.
4. Pada penelitian ini, tidak dilakukan proses *confirmabilitas* kepada para informan dikarenakan keterbatasan waktu penelitian.



BAB 4 DATA, FAKTA, DAN ANALISA

4.1. Latar Belakang Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

4.1.1. Pendahuluan

1. PKP INDONESIA merupakan "*metamorfosa*" dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang dideklarasikan 15 Januari 1999 di Jakarta. PKP INDONESIA sebagai langkah "*metamorfosa*" dari PKP, "*didirikan*" pada tanggal 9 September 2002 oleh sejumlah warga Negara Indonesia yang sangat peduli akan :

- a. Kehidupan rakyat yang menderita akibat krisis multi dimensi, yang menderita akibat krisis multi dimensi, yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi,
- b. Kehidupan bangsa yang rawan konflik dan perpecahan,
- c. Kehidupan bangsa dan negara yang perlu diluruskan dan ditata kembali.

Penataan tatanan pemerintah dan birokrasi aparatur negara yang profesional dan bermartabat, sesuai dasar negara (UUD 1945), sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tujuan Negara, yang sungguh-sungguh mengabdikan dan melayani kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

2. PKP INDONESIA dicitakan sebagai suatu partai politik politik mandiri, populis dan modern, yang berjangkauan jauh ke masa depan. Salah satu ciri dari partai mandiri, populis dan modern adalah memiliki visi, misi, dan landasan perjuangan yang merupakan pengikat dan perekat para kader partai, anggota, simpatisan serta masyarakat.

4.1.2. Hakekat Kelahiran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

1. Panggilan mewujudkan Cita-cita Kemerdekaan.

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan cita-cita dan tujuan untuk mewujudkan masyarakat, bangsa dan negara yang bersatu, berdaulat, adil, sejahtera lahir batin, demokratis, berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kenyataan ideal tersebut saat ini masih jauh dari cita-cita kemerdekaan, termasuk kekuasaan politik dan ekonomi yang masih terpusat di tangan sekelompok orang. Praktek-praktek penyelundupan berbagai sumber kekayaan alam mengakibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur menyengsarakan rakyat dan mengakibatkan terpuruknya kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan negara. Ketidakadilan dan kemiskinan struktural semakin nyata. Persaingan dan “keretakan” struktural pada elit politik strategis makin mencolok, Persatuan bangsa (antar golongan, suku, lintas agama) selalu rentan untuk digoncangkan.

2. Terancamnya Pancasila, Kedaulatan dan Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Krisis penegakan hukum, ekonomi dan politik baik perorangan atau kelompok pada dasarnya bersumber pada krisis moral dan peradaban bangsa, telah melahirkan ancaman serius terhadap eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lahirlah banyak partai politik dengan berbagai ideologi, serta meluasnya budaya kekerasan, masih buruknya kondisi ekonomi, manajemen dan rendahnya kesejahteraan rakyat. Semua ini semakin menambah problematika yang dapat melemahkan persatuan bangsa. Meluasnya rasa ketidakadilan, meningkatkan pengganguran, diabikannya penegakan hukum, konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia, yang cenderung mengancam eksistensi Pancasila

sebagai dasar negara serta ideologi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pengaruh Globalisasi yang Berakibat Lemahnya Kesadaran Masyarakat dalam Berbangsa dan Bernegara serta Menurunnya Rasa Bela Negara.

Oleh karenanya segenap bangsa Indonesia yang majemuk, harus meningkatkan ketahanan nasional secara komprehensif, antara lain dengan meningkatkan daya saing bangsa serta memberdayakan potensi kompetitif dan komparatif nasional.

4. Berdasarkan alasan-alasan mendasar pada diktum 1,2,3 itulah : sejumlah warga bangsa Indonesia yang berasal dari perbagai suku, daerah, ras, etnis, dan agama yang dijiwai “Wawasan Kebangsaan” di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertekad bulat berjuang mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1945 dengan membentuk alat perjuangan bersama yakni Partai Politik bernama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia disingkat “PKP INDONESIA”, didirikan 9 September 2002 sebagai kelanjutan (“metamorfosa”) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Januari 1999 di Jakarta.

4.1.3. Visi dan Misi.

1. Visi :

PKP INDONESIA memandang bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu senantiasa dikembangkan dengan mengacu pada dua hal pokok :

- a. Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 serta Pancasila sebagai ideologi negara dari dasar negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang dirinci sebagai berikut :

- 1). Wawasan Kebangsaan yang senantiasa harus dipupuk dan ditumbuh-kembangkan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat bangsa yang besar dan kokoh, nasional, bersatu-padu, beradab, berbudaya, dan tidak diskriminatif.
 - 2). Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijaga kedaulatan dan dikembangkan eksistensinya melalui pemerintahan yang bersih, jujur, adil, berkualitas, demokratis, berwibawa, kuat, taat pada konstitusi, hukum, serta bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 - 3). Peri kehidupan rakyat yang bersatu dan bekerjasama, berkeadilan dan demokratis, berkesejahteraan sosial, berkarakter, beretika-bermoral-berakhlak mulia, memiliki etos kerja keras yang tinggi serta profesional.
- b. Keadaan nyata masyarakat serta kecerdasan yang dicapai setelah tahun 1945, yang pada gilirannya juga menghasilkan tuntutan terhadap sesama bangsa dan negara.
- 1). Kehidupan bangsa dan negara pada saat ini dan ke masa depan menyaratkan diperlukannya penegakan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan sosial sebagai suatu kesatuan makna dan nafas perjuangan seluruh rakyat Indonesia.
 - 2). Persatuan bangsa hanya dapat terpelihara dan semakin kokoh bila ada keadilan. Keadilan yang diperjuangkan perwujudannya haruslah memperkuat dan memperdalam makna persatuan.

Dengan demikian, maka visi **PKP INDONESIA** adalah terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan,bersatu dan berkesejahteraan sosial dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

2. Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut, "PKP INDONESIA" mengemban misi sebagai berikut :

- a. Mempertahankan kedaulatan dan eksistensi serta tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang masa. Untuk itu PKP INDONESIA akan bekerjasama dengan segenap komponen bangsa dan lapisan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, termasuk TNI dan POLRI.
- b. Mewujudkan keadilan, kesejahteraan sosial dan hak-hak politik rakyat untuk mewujudkan perikehidupan yang adil, beradab, berbudaya dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
- c. Memperkokoh persatuan yang nyata dalam tatanan masyarakat majemuk melalui perikehidupan yang adil, setara, merata dan tidak diskriminatif.
- d. Mewujudkan pemerintahan yang jujur, demokrasi, efisien, efektif, bersih, tidak menyalahgunakan wewenang, berwibawa, kuat dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) agar mampu menyelenggarakan urusan negara dan kepentingan negara untuk melayani kepentingan masyarakat.
- e. Mewujudkan masyarakat kewargaan (*civil society*) yang kuat, sehat, cerdas, profesional, beradab (*civilized society*) dan bersih (*clean society*) melalui pembangunan kesehatan dan pendidikan serta penciptaan kesempatan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- f. Mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang bermartabat, sehingga dapat berperan dalam pergaulan dunia, dan dihormati, serta mampu bersaing dan berkembang dalam kompetisi ekonomi dan politik secara global.

Dengan demikian maka misi PKP INDONESIA adalah mewujudkan masyarakat kewargaan (*civil society*) yang berkeadilan, bersatu, dan berkesejahteraan sosial, mewujudkan pemerintahan yang kuat, efektif, efisien, bersih, taat hukum dan berwibawa dalam wadah Negara Keastuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mampu bersaing dan dihormati dalam pergaulan dunia.

4.1.4. Landasan Perjuangan

1. Ideologi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas maka PKP INDONESIA berazaskan Pancasila sebagai Ideologi partai dan mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PKP INDONESIA berketetapan bahwa Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bersifat universal, digali dari realitas masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk, merupakan fondasi perekat, pemersatu dan pemerkokoh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PKP INDONESIA berjuang agar dalam penyelenggaraan negara secara menyeluruh, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan selalu mewujudkan Pancasila sebagai ideologi dan asas bersama.

2. Konstitusi.

a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

PKP INDONESIA berpedoman bahwa, UUD 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. "Pembukaan UUD 1945" tidak dapat diubah, sementara "Batang Tubuh UUD 1945" terbuka bagi penyesuaian dan penyempurnaan oleh MPR dikukuhkan melalui referendum.

- 1). Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah karena memuat hakikat dan eksistensi negara, dasar negara, cita-cita dan tujuan bangsa. Perubahan Pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran Negara Keastuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
 - 2). Batang Tubuh UUD 1945 dapat disempurnakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan masyarakat, bangsa dan negara, melalui ketetapan MPR dan dikukuhkan melalui *Referendum* (Pemberian pendapat oleh rakyat).
 - 3). Amandemen terhadap Batang Tubuh UUD 1945 dilakukan dalam bentuk *addendum* (penambahan) agar ruh/sukma dan semangat dasar UUD 1945 tidak berubah, baik untuk kepentingan kesejahteraan maupun nilai penuntun ke masa depan.
- b. Hukum dan Demokrasi
- 1). PKP INDONESIA berpedoman bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil makmur, harus inklusif dan berlandaskan jiwa UUD 1945, serta supremasi hukum yang berintikan keadilan dan demokrasi. Semua produk hukum dan kebijakan pemerintah harus transparan serta menyerap aspirasi dan kepentingan rakyat.
Pemerintah dan rakyat wajib taat kepada konstitusi dan hukum yang berasaskan kesamaan (*egaliter*), beretika, bermoral serta berkeadilan menuju terciptanya pemerintahan yang bijaksana, professional dan bersih serta bertanggungjawab kepada rakyat sebagai pemberi mandat.
 - 2). Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menghantarkan masyarakat Indonesia yang

sejahtera dan makmur, harus berlandaskan konstitusi dan supremasi hukum yang ditetapkan secara demokratis, berkeadilan dan bertanggung jawab. Dalam prespektif itulah maka semua kebijakan, yang berkeadilan diambil oleh pemerintah harus bersifat transparan dan berlandaskan hukum.

Aspirasi warga negara harus dihargai dan dipegang teguh, taat pada hukum dan konstitusi.

c. **Hak Asasi Manusia (HAM).**

PKP INDONESIA berpedoman bahwa, hak asasi manusia (HAM) harus dilaksanakan secara murni, konsisten, konsekuen, adil dan terbuka serta diarahkan bagi proses pengembangan kesadaran dan tertib hukum untuk mewujudkan sosok manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana jiwa UUD 1945.

Penghargaan dan perlindungan HAM bagi setiap warga negara yang meliputi hak-hak publik dan hak-hak pribadi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mewujudkan penghargaan dan perlindungan HAM yang adil dan terbuka terhadap semua penduduk, harus menghormati dan menghargai HAM sesama warga tanpa diskriminasi, serta mentaati kewajiban asasi sebagai warga negara.

3. Sikap dan Motto Partai.

PKP INDONESIA sebagai partai politik yang berpaham kebangsaan dan berdasar kedaulatan rakyat (demokrasi), bersifat terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang suku, agama, daerah, status sosial, gender, profesi dan sebagainya, serta memperlakukannya secara adil dan setara.

Sebagai partai politik yang dicitakan menjadi partai mandiri, populis dan modern maka PKP INDONESIA berupaya mengembangkan beberapa unsur pokok, yakni :

- a. **Sebagai partai mandiri**, PKP INDONESIA harus menunjukkan sikap independen dalam mengembangkan fungsi politik dengan tidak berpihak kepada kekuasaan yang otoriter dan represif. Itu berarti keberpihakan kepada rakyat sebagai unsur utama pembangunan politik (subyek demokrasi). Standar moral dalam berpolitik yang dipakai PKP INDONESIA adalah sebuah sikap nurani obyektif untuk menciptakan moralitas politik (*the morality of the politics*) yang memuliakan nilai-nilai keadilan, kebenaran, kebersamaan dan persatuan.
- b. Adanya landasan perjuangan yang jelas, merupakan perekat yang kuat bagi kemandirian kader partai dan kemandirian strata partai untuk memiliki motivasi yang konstruktif, profesional dan demokratis. Sehubungan dengan itu, PKP INDONESIA sebagai partai yang populis bertekad melaksanakan program untuk memberdayakan rakyat sebagai unsur negara pemilik kedaulatan. Partai yang populis yang tidak eksklusif, tetapi inklusif, bersama rakyat, memahami hati nurani rakyat dan aspirasinya sehingga menjadi pelaku pembangunan yang produktif.
- c. **Sebagai partai modern**, PKP INDONESIA dikelola secara profesional dengan menggunakan manajemen politik yang merangkul setiap kader dan anggota, dan memosisikannya sebagai subyek politik. Sebagai partai modern PKP INDONESIA harus mengembangkan kehidupan politik yang demokratis, kebersamaan, tidak primordial, tidak eksklusif dan bersahabat. Para Pemimpin partai tidak boleh menempatkan diri sebagai "elit politik" yang memandang

kekuasaan sebagai sesuatu yang harus dimiliki secara absolut.

- d. Sebagai partai politik yang **berpaham kebangsaan dan berdasarkan kedaulatan rakyat**, yang bertujuan menegakkan keadilan dan persatuan, sepatutnya dan sangat logis dengan menggunakan pendekatan ideologis dan historis, maka ke depan PKP INDONESIA dapat diakronimkan menjadi **Partai Penegak Keadilan dan Persatuan Indonesia**.

Keadilan terkait langsung dengan Tuhan Yang Maha Adil, dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur dalam kehidupan antar manusia pada harkat, tempat dan martabat yang sama.

Persatuan dalam pluralisme Indonesia merupakan energi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang berkembang bila antar etnis dan golongan masyarakat terdapat rasa senasib dan sepenanggungan dan merasa ikut memiliki (*sence of belonging*), dan bertanggung jawab (*sence of responsibility*) sehingga kehidupan bangsa dapat berlangsung tertib. Berbicara tentang keadilan, keadilan tidak mungkin terjadi apabila tidak ada persatuan. Sebaliknya tidak mungkin terjadi persatuan apabila tidak ada keadilan. Keadilan dan persatuan merupakan dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Dengan demikian, kader PKP INDONESIA harus mampu mengaktualisasikan diri sebagai media perekat bangsa yang adil dan bersatu, dan mampu mentransformasikan keadilan menjadi budaya dan hati nurani bangsa. Budaya keadilan, sikap yang jujur, kebenaran dan kerja keras harus menjiwai seluruh kader partai. Oleh karenanya, motto PKP INDONESIA adalah **KEADILAN DEMI PERSATUAN**.

4. Ketuhanan Yang Maha Esa

- a. PKP INDONESIA berpedoman bahwa wujud kehidupan sprituiat yang mulia wujud kehidupan spiritual yang mulia (akhlakul karimah), beradab, beretika dan bermoral yang dapat diterima oleh semua ajaran agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah **kehidupan spiritual manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berkedaulatan, bertoleransi dan berkeperimanusiaan yang saling menghormati.**
- b. Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hidup bangsa dan **masyarakat Indonesia yang ber-Ketuhanan, berkeperimanusiaan** dan menganut berbagai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang maha Esa, harus bebas melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, yang saling menghormati dan menghargai sebagai wujud kehidupan spiritual yang beradab, menghargai harkat dan martabat kemanusiaan dan kodrat kemanusiaan yang berbudi luhur.
- c. **Kebebasan beragama adalah hak asasi yang bukan pemberian negara, melainkan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sendiri.** Negara memfasilitasi agar kehidupan keagamaan dan hubungan warga lintas keagamaan serta menjamin kebebasan beragama dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

5. Kedaulatan Rakyat.

PKP INDONESIA berpedoman bahwa dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, bernegara dan berpemerintahan **maka rakyat diposisikan sebagai pemilik yang sah dan harus diakui sebagai sumber kedaulatan.** Kebijakan negara dan gerak penyelenggaraan negara harus berpihak dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah dan semua kekuatan sosial politik harus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi

rakyat tanpa henti-hentinya. PKP INDONESIA tidak akan membiarkan rakyat dan bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak berpihak kepada rakyat, tidak demokratis dan tidak bersikap adil, serta orang-orang yang memiliki cacat moral.

6. Negara Kebangsaan.

PKP INDONESIA berpedoman bahwa Negara Kesatuan republik Indonesia adalah negara kebangsaan berdasarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, derap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara haruslah dalam bingkai mempertahankan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berwawasan kebangsaan. Kinerja negara kebangsaan yang memperlakukan warganya secara adil akan memperkokoh rasa semangat kebangsaan dalam maknanya yang paling dalam.

7. Penyelenggaraan Negara.

PKP INDONESIA berpedoman bahwa keadilan yang hakiki diwujudkan dalam semua kebijakan dan penyelenggaraan negara. Keadilan harus diterapkan dalam setiap gerak pembangunan bangsa, di setiap tingkatan dan lapangan kehidupan. Dengan keadilan maka kesetiakawanan, persaudaraan, kebangsaan dan persatuan dapat terbangun dengan jujur, kokoh dan kuat. Dengan demikian untuk menyelenggarakan pembangunan keadilan itu diperlukan profesionalisme dan menghargai kearifan lokal.

8. Otonomi Daerah.

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika merupakan negara kepulauan yang demikian luas dan majemuk, maka penyelenggaraan pemerintah membutuhkan pendekatan otonomi daerah. **Otonomi daerah perlu dilaksanakan secara nyata dan adil** dalam sistem pemerintahan yang mengatur keseimbangan kewenangan

antara pusat dan daerah, dan memenuhi tuntutan keadilan dan nurani rakyat.

- b. Otonomi daerah yang dimaksudkan untuk pemberdayaan pemerintahan daerah agar dapat mengelola sumberdaya yang ada secara lebih optima. Memberdayakan pemerintah dengan otonomi daerah juga dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat daerah agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik, layak dan sejahtera. Dengan perwujudan otonomi daerah lebih cepat dan tepat melalui peningkatan serta penyempurnaan pelayanan kepada masyarakat di daerah dengan segala kepentingan dan keunikan serta kearifan lokal.

9. Pembangunan Berkelanjutan

- a. PKP INDONESIA berpedoman bahwa upaya pembangunan berkelanjutan harus segera dan terus menerus dilaksanakan dalam rangka membangun masyarakat kewargaan (*civil society*) yang demokrasi, sejahtera dan berkeadilan. Pembangunan berkelanjutan harus dilaksanakan terus menerus, rasional dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan lintas generasi, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. PKP INDONESIA berpedoman bahwa untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan secara nasional yang bertanggung jawab dan rasional diperlukan sumberdaya manusia yang memiliki kesadaran lingkungan, memiliki profesionalisme, produktif, hemat, kritis dan mandiri dan bertanggung jawab terhadap generasi selanjutnya.
- b. Industrialisasi yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan berkelanjutan harus ramah lingkungan dan senantiasa dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (*public accountability*). Dalam hal ini PKP INDONESIA mengajak masyarakat dan pemerintah, serta

dunia internasional untuk melaksanakan sungguh-sungguh Kesepakatan Rio de Janeiro dan Piagam Kyoto.

10. Hubungan dan Kerjasama Internasional.

- a. Menyurutnya pengaruh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Situasi Umum Hubungan Internasional.

Pembahasan tentang pengaruh dan kinerja PBB haruslah dilihat dalam dua perspektif yaitu : hubungan internasional dan penegakan hukum internasional. Ada pun inti permasalahan perlunya reformasi PBB, karena apabila Hukum Internasional (sejak 1648) mengakui kedaulatan negara, maka berbagai kegiatan yang dilakukan dewasa ini baik oleh individu maupun kelompok secara lintas negara, justru sering meremehkan kedaulatan negara dan Hukum Internasional tersebut, dengan akibat berkembangnya konflik-konflik antar negara. Hal ini telah menjurus ke arah krisis kedaulatan negara dan krisis dunia. Fungsi PBB makin surut padahal PBB didirikan untuk memecahkan bersama konflik-konflik Internasional agar tidak memuncak menjadi perang dunia dan karenanya menjadikan kesepakatan antar negara sebagai bagian dari Hukum Internasional.

- b. Jenis-Jenis Kepentingan

Para Ilmuwan Hubungan Internasional sejak tahun 1960-an di abad yang lalu bahkan telah melihat bahwa kepentingan antar individu/antar kelompok yang bertindak lintas negara akan berkembang menjadi konflik kepentingan tidak terbatas lagi pada (i) konflik kekuasaan; (ii) konflik nasional/negara dan (iii) kepentingan ideologi saja, tetapi berkembang menjadi (iv) konflik yang berakar pada kepentingan antara negara Dunia ketiga melawan negara-negara kekuasaan/industri, karena adanya tahap ekonomi yang berbeda. Mendekati akhir abad ke-20 dan pada awal abad milenium / abad ke-21 makin tampak adanya (v) konflik nilai

(antar budaya dan antar agama). Konflik-konflik tersebut diatas kemudian menyatu menjadi konflik berakar pada (vi) konflik kekuasaan.

c. Sikap PKP INDONESIA

Hingga sekarang pedoman politik luar negeri Indonesia ialah:

- 1). Mendahulukan/mempertahankan / memperjuangkan kepentingan nasional;
- 2). Sebagai akibat dari kepentingan nasional, memilih sikap politik bebas = aktif;

Kedua prinsip ini untuk beberapa dekade lebih banyak tersisihkan, sehingga Indonesia kini menemukan diri dalam keadaan, di mana bahkan negara-negara tetangga terdekat mulai meremehkan kedaulatan Republik Indonesia di daerah perbatasan dan udara serta berbagai bentuk pencurian kekayaan alam Indonesia oleh pihak asing.

PKP INDONESIA berkesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk mengurangi pelanggaran terhadap kedaulatan dan pencurian kekayaan alam Republik Indonesia salah satunya adalah dengan mengutamakan pembangunan kemampuan pertahanan dan keamanan negara di darat, di laut, dan di udara. Untuk itu PKP INDONESIA mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian skala prioritas kepada pembangunan persenjataan dan kemampuan Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Angkatan Darat Indonesia, disamping pembangunan Kepolisian Negara Indonesia sebagai pengayom dan penegak keamanan serta ketertiban masyarakat. Akhirnya diharapkan Indonesia dapat berkembang pulih kembali menjadi suatu negara yang dihormati, disegani dan perlu diajak

bekerja sama pembangunan yang diabdikan bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan proklamasi.

11. Matra Darat, Laut dan Udara.

a. Wilayah.

Wilayah matra darat, laut dan udara Indonesia mencapai luas 8.400.000 km² dengan jumlah pulau 17.667 buah meliputi daratan (2.027.087 km²), lautan (64.000.00 km²), yang terdiri dari laut territorial (3.166.163 km²), landas kontinen (3.166.163 km²) ditambah zona ekonomi eksklusif/ZEE (3.166.163 km²) dan geostationary orbit (GSO) dengan panjang 33.979 km, tinggi 35.761 km diatas batas wilayah udara nasional 110 km, merupakan wawasan persatuan dan kesatuan yang bulat dan utuh (wawasan nasional).

b. Perspektif Persatuan dan Kesatuan

PKP INDONESIA memahami bahwa matra darat, laut dan udara merupakan wadah menyelenggarakan kehidupan nasional yang memiliki identitas, integritas dan ketahanan nasional untuk kelangsungan hidup sebagai bangsa dan negara.

c. Hakekat.

Wawasan Nasional adalah pandangan geopolitik, yaitu pandangan mengenai realita keberadaan bangsa Indonesia dan aspirasinya, dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografis untuk menjamin kepentingan nasional, yang pada hakikatnya menciptakan tanggung jawab, motivasi dan dorongan bagi seluruh bangsa mencapai tujuan dan mewujudkan cita-cita nasional.

d. Dasar Hukum

Matra darat, laut dan udara terwadahi dalam UU No. : 17/1985, mempunyai kekuatan hukum positif untuk :

1). Mencapai tujuan nasional.

- 2). Keutuhan teritorial dan melindungi kekayaan negara, karena semua kepulauan dan laut yang terletak diantaranya merupakan satu kesatuan yang bulat.
- 3). Pengintegrasian wawasan benua, bahari dan dirgantara berdasarkan kebulatan dan keutuhan wilayah.
- 4). Melandasi pelaksanaan pertahanan dan keamanan, sikap dan perilaku dalam penyelenggaraan serta pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

PKP INDONESIA memandang dan bersikap mengenali diri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia mengutamakan persatuan, kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. PKP INDONESIA berkepentingan untuk mewujudkan, matra darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan wilayah, kesatuan bangsa, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan keamanan serta ketertiban, dengan menjunjung tinggi HAM dan konservasi lingkungan hidup.

e. Potensi Disharmoni.

PKP INDONESIA berpendirian bahwa pengelolaan wilayah perbatasan negara perlu segera ditingkatkan. Wilayah NKRI harus dijaga dengan penegasan dan penguasaan "de facto" atas pulau-pulau terpencil, antara lain dengan pendudukan, kehadiran pemerintahan lokal dan aparatur pemerintahan lainnya.

4.1.5. Lambang Partai.



4.1.5.1. Arti

Tanda gambar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) diperkenalkan kepada masyarakat sebagai :
**PERISAI-1, BERGAMBAR GARUDA-2, MERAH PUTIH-3,
 YANG MEMEGANG RANGKAIAN PADI DAN KAPAS-4**
 Atau untuk lebih jelas disebut :

1. PERISAI perlambang PERLINDUNGAN PANCASILA
2. GARUDA perlambang MARTABAT BANGSA YANG KSATRIA.
3. MERAH-PUTIH perlambang NEGARA KESATUAN RI
4. PADI-KAPAS perlambang Keadilan dan KESEJAHTERAAN

Singkatan nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah : PKP INDONESIA. Penulisannya menggunakan huruf tebal dan kokoh menggambarkan prinsip yang teguh untuk memperjuangkan kelestarian bangsa dan negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4.1.5.2. Perlambang.

Secara lengkap tanda-gambar PKP INDONESIA dapat diurai dalam unsur-unsur yang membawa perlambang khusus.

ASTAPRALAMBANG PKP INDONESIA

- i. PANCASILA

Garuda, dikenal sebagai Garuda Pancasila. Pancasila sebagai Dasar Negara terbukti mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan negara RI.

2. KEADILAN

Rangkaian padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial, lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. PERSATUAN

Konfigurasi dari satuan garis-garis melambangkan sifat kebhinekaan Indonesia yang secara harmonis menyatu membentuk suatu wujud yang utuh dan strategis.

4. KEMANUSIAAN

Warna merah yang dominan melambangkan gairah hidup. Merah darah adalah warna pertama yang dikenal manusia, dan secara biologis sebagai pertanda awal kehidupan manusia.

5. KEMERDEKAAN

17 butir padi, 8 buah kapas, 4 bulu ekor dan 5 bulu sayap garuda melambangkan Proklamasi RI 17 Agustus 1945.

6. PEMBELAAN

Perisai alat untuk melindungi diri dari ancaman dan bahaya, melambangkan pembeiaan untuk menegakkan demokrasi, keadilan, kesejahteraan serta perlindungan dan pertahankan bagi keutuhan negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

7. PEDOMAN PERJUANGAN DAN SIKAP DASAR PKP INDONESIA

Garis-garis sayap dan ekor garuda perlambang "bentangan dan kibasan" pedoman perjuangan dan sikap-sikap dasar PKP INDONESIA.

8. INDONESIA DI ERA BARU

Garuda yang gagah perkasa, dalam posisi lepas landas untuk terbang ke depan melambangkan perjuangan dengan penuh

keyakinan untuk mencapai kecemerlangan masa depan Indonesia di era baru.

4.1.5.3. Falsafah.

Sebagai lambang organisasi politik, konfigurasi garis-garis di dalam tanda gambar PKP INDONESIA menyiratkan falsafah :

TRILOGI HUBUNGAN HAKIKI

1. Kepada Tuhan YME.

Garis-garis utama yang turun dari atas dan membentuk sayap garuda :

Bahwasanya hidup adalah semata-mata anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, Oleh karenanya harus dijaga dan dipelihara melalui ketaqwaan.

2. Kepada Sesama.

Garis-garis mendatar yang membentuk ekor garuda :

Bahwasanya dalam hubungan bermasyarakat hubungan yang harmonis, saling mendukung, menguatkan, dan damai dengan sesama senantiasa harus dijaga dan diperjuangkan dengan penuh Tanggung-Jawab serta rasa saling menghargai.

3. Kepada Lingkungan

Garis-garis turun yang membentuk kaki garuda :

Bahwasanya sebagai rasa syukur atas anugerah kehidupan itu, setiap manusia bertanggung-jawab menjaga, memelihara, melestarikan dan mengusahakan tata kehidupan alam semesta, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

4. Semboyan.

Berdasarkan rasionalisasi dari tanda gambar Garuda Merah Putih di atas, semboyan partai salah satunya berbunyi :

"Garuda Merah Putih Akulah Pendukungmu !"

4.3.1. Susunan DPN (Dewan Pimpinan Nasional), desain bagan dan pembagian organisasi.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) ART, susunan DPN atas institusi :

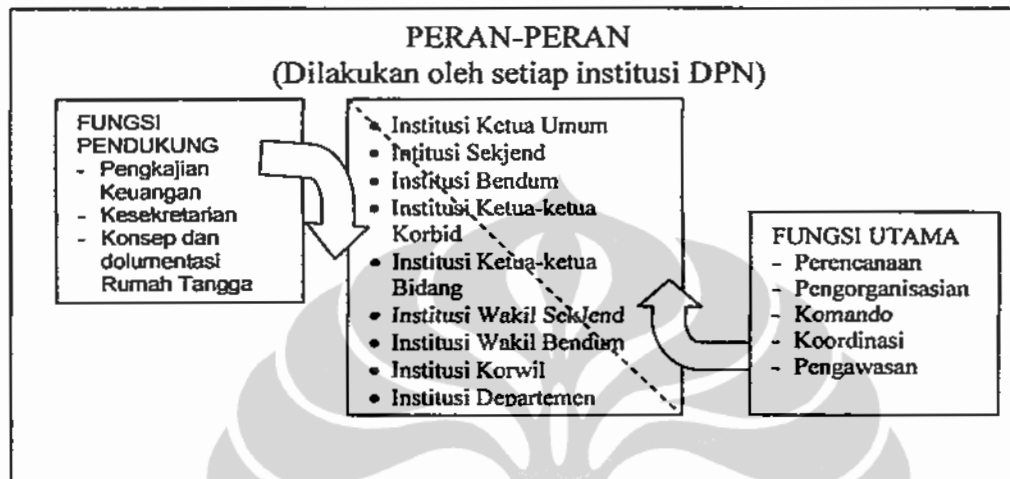
(a) Ketua Umum; (b) Wakil Ketua Umum; (c) Beberapa Ketua; (d) Sekretaris Jenderal; (e) Beberapa Wakil Sekeretaris Jenderal; (f) Bendahara Umum; (g) Beberap Wakil Bendahara Umum; (h) Beberapa Departemen; (i) Beberapa Lembaga.

Atas dasar hal tersebut DPN PKP INDONESIA masa bakti 2005-2010 hasil revitalisasi tahun 2008 disusun sebagai beriku :

- a. Ketua Umum
- b. Wakil Ketua Umum (sementara waktu dikosongkan)
- c. Ketua-Ketua Koordinator Bidang
 - 1). Ketua Koordinator Bidang Sumber Daya
 - 2). Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik
 - 3). Ketua Koordinator Bidang Sumber Dana
- d. Ketua-Ketua Bidang dalam Koordinasi Sumberdaya
- e. Ketua-Ketua Bidang dalam Koordinasi Kebijakan Publik
- f. Ketua-Ketua Bidang dalam Koordinasi Sumber dana
- g. Kesekretarisjendralan
- h. Kebendaharaan
- i. Koordinasi Wlayah
- j. Departemen sebagai kelompok Aksi dan Implementasi Kebijakan Partai kepada anggota dan masyarakat dalam Koordinasi Bidang Sumber Daya
- k. Lembaga sebagai Kelompok Aksi dan Implementator Kebijakan partai Kepada proses pembangunan nasional, penyelenggaran pemerintah dan kenegaraan dalam Bidang Kebijakan Publik

Selain terdapat sejumlah fungsi yang mesti diemban di dalam struktur organisasi PKP INDONESIA, juga terdapat sejumlah peran dari setiap institusi struktur organisasi PKP INDONESIA, juga terdapat sejumlah peran dari setiap intitusi di DPN PKP INDONESIA

berdasarkan tingkatannya di dalam organisasi, sebagaimana ditampilkan dalam gambar :



Gambar : 4.1. Peran-peran dalam Institusi DPN PKP INDONESIA

4.1.7. Hubungan Antar Posisi dalam Struktur Organisasi DPN PKP INDONESIA

Setiap posisi dalam struktur organisasi memiliki hubungan kerja dan keterkaitan yang harus dapat dipastikan, sehingga membentuk sebuah sistem yang utuh, terpadu dan terintegrasi. Hubungan antar setiap posisi dalam struktur organisasi DPN PKP INDONESIA adalah sbb :

- a. Penanggungjawab organisasi adalah Ketua Umum;
- b. Fungsi kepemimpinan dalam DPN adalah totalitas peran yang dijalankan oleh seluruh pengurus DPN (kepemimpinan kolektif);
- c. Mengingat kompleksitas organisasi yang terus meningkat seiring dengan formalisasi dan pilihan desentralisasi aksi maka organisasi mengembangkan budaya birokrasi profesional; yang dimaksudkan adalah pemahaman birokrasi secara positif dimana terjadi pembagian dan spesifikasi peran dan alokasi sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam pemahaman ini maka interaksi antar posisi dan perilaku peran diarahkan untuk menciptakan tumpuan

- beroperasinya organisasi pada sistem dan menghindarkan diri dari ketergantungan pada figur-figur tertentu;
- d. Setiap institusi dapat berhubungan langsung secara koordinatif, sementara hubungan komando adalah sesuai dengan hirarkis struktur organisasi.
 - e. Hubungan antara institusi pada garis yang sama dapat dikoordinasikan oleh institusi di atasnya secara formal, atau dapat dilakukan koordinasi non formal secara lintas institusi.
 - f. Hubungan formal lintas fungsi dan aras/tingkat dalam kerangka pembentukan dan pendayagunaan Satuan Tugas baik untuk melaksanakan kegiatan ataupun untuk tugas-tugas khusus, dilakukan oleh rapat pengurus harian atau pleno, dan pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Sekretaris Jenderal;
 - g. Dukungan fungsi administrasi di tingkat DPN dilakukan dengan memfungsikan satu sekretariat partai yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, yang berfungsi sebagai pusat aktivitas partai dan pusat aktivitas pendukung administratif. Pengelolaan sekretariat partai menjadi tanggungjawab Sekretaris Jenderal.

4.2. Strategi Komunikasi PKP INDONESIA

Suatu Strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Jadi dalam merumuskan strategi komunikasi, selain diperlukan perumusan tujuan yang jelas, juga terutama memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak.

Strategi komunikasi PKP INDONESIA adalah suatu cara untuk mencapai implementasi Visi dan Misi secara baik sesuai dengan kondisi yang sedang berkembang dan bentuk strategi bagi internal partai adalah dengan adanya revitalisasi organisasi pada tahun 2008 yang dilakukan sebagai (a) upaya untuk terus menerus memantapkan konsolidasi organisasi partai secara nasional, sehingga partai tetap solid, kompak bersinergi, dan efektif-efisien dalam mencapai target sukses pada pemilu 2009; dan (b) upaya untuk melakukan penataan ulang struktur dan

personalia lewat evaluasi dan penilaian berdasarkan aspirasi warga partai; atas faktor-faktor : loyalitas, kapabilitas, dedikasi dan pengorbanan bagi pengembangan organisasi dan peran PKP INDONESIA selama ini dan ke masa depan. Hasil Revitalisasi inilah yang kemudian PKP INDONESIA dapat mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta pemilu 2009,

Adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan dijelaskan secara garis besar oleh Ketua Umum PKP INDONESIA Ibu Meutia Hatta Swasono:

..... strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan dan PKP INDONESIA sendiri telah jauh hari yaitu dari awal mula pendirian partai ini yang berdiri dengan dilatarbelakangi oleh terusiknya rasa keadilan dan persatuan yang terabaikan, maka PKP INDONESIA akan selalu memulai menerapkan rasa keadilan tersebut di mulai dari lingkungan internal partai sendiri. PKP INDONESIA berprinsip dan berkebijakan bahwa semua perjuangan kita harus dipraktikkan dulu dari diri kita sendiri..... Dalam Rakornas berbicara kepada jajaran DPN, DPP dan DPD serta secara khusus pada rapat pleno DPN juga menekankan pada Ketua-ketua koordinator bidang , ketua-ketua bidang, koordinator wilayah dan departemen-departemen dengan menekankan perlunya para kader partai harus selalu membuat dan membuka komunikasi.

Komunikasi yang terbuka dan transparan merupakan awal dari suatu strategi dimana faktor kepemimpinan yang mau dan mengerti bahwa perempuan harus terlibat dalam politik dan hal ini juga secara gamblang dikemukakan oleh Pengajar pada Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia dan juga pengamat politik perempuan yaitu Ibu Chusnul Mari'yah :

Strategi partai politik dalam menjaring caleg perempuan umumnya masih ada yang dilakukan dengan cara seperti membuka lowongan pekerjaan yaitu dengan "dibutuhkan atau dibuka calon anggota legislatif khususnya perempuan". Parpol mengatakan memberi kesempatan

perempuan untuk jadi caleg, tetapi katanya perempuan tidak siap dengan berbagai alasan.....

.....Tidak transparan. Tidak pernah terjadi dialog untuk apa perempuan masuk ke politik. Ini hanya by product, "Oke perempuan mau masuk, ya masuk saja.". Kenapa tidak dari awal? Kalau memang punya perspektif gender harus dari awal, secara sadar (by design) disiapkan. Bukan kemudian by product baru diomongkan, misalnya untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang sedang diperbaiki, sejak awal dirancang 40 persen harus diberikan kepada perempuan. Yang lalu hanya 10 persen, sementara yang paling miskin adalah perempuan. Jadi menurut pendapat saya berbicara strategi terutama berkaitan dengan menjaring caleg perempuan adalah pertama tetapkan tujuan yang jelas dan terukur mengenai konsep gender, kedua definisikan target citra yang akan dikehendaki dimata kaum perempuan yang berminat masuk ke ranah politik, ketiga analisa kekuatan dan kelemahan mengenai caleg perempuan dan keempat definisikan isyu, pesan, target sasaran dan sarana komunikasi yang tepat.

Kemudian berkaitan dengan strategi partai politik juga dikemukakan dengan singkat oleh Haidar selaku Ketua Tim Penjaringan Caleg yaitu :

Strategi adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan agar tercapai tujuan yang diinginkan dengan melakukan sesuai pedoman yang dibuat, dan setiap partai menurut saya harus mempunyai strategi dan strategi yang dilakukan PKP INDONESIA berkaitan dengan perekrutan caleg khususnya caleg perempuan adalah dengan mengacu pada visi, misidan landasan perjuangan PKP INDONESIA yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.

4.3.1. Langkah-langkah kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian dari konsep pokok dan asas yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau konsep dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kepemimpinan dan cara bertindak. Dalam hal ini kebijakan yang

dikemukakan oleh Ketua Umum PKP INDONESIA dalam memberikan arahan ke pengurus atau anggota partai lainnya.

Kebijakan yang disampaikan oleh Ketua Umum disampaikan dalam Rapat Pleno Perdana Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP INDONESIA pada tanggal 1 Juni 2008, terdiri dari beberapa hal antara lain :

1. PKP INDONESIA telah diumumkan lulus verifikasi administrasi Partai Politik Peserta pemilu 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 30 Mei 2008, sehingga mengacu pada UU No.10/2008 tentang Pemilu Pasal 316 huruf d dan Keputusan KPU No. 12 Tahun 2008. Dengan demikian maka PKP INDONESIA sebenarnya telah merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2009.
2. Kita harus menekadkan bahwa Pemilu 2009 tidak sekedar ikut, tapi PKP INDONESIA harus menang.
3. Tolak ukur menang adalah :
 - a. Meraih suara pemilih sah jauh lebih besar dari parliamentary threshold (2,5 % dari suara sah) di tiap TPS dan akumulasinya sampai dengan hasil perhitungan suara di tingkat KPU Pusat.
 - b. Dapat menempatkan perwakilan di
 - 1) Lembaga legislatif (DPR RI, DPRD Prov/Kab/Kot),
 - 2) Lembaga Eksekutif (Presiden, Gubernur, Walikota/Wakilnya),
 - 3) Dan lembaga kenegaraan lainnya.

Sehingga cita-cita kelahiran partai dapat diimplementasikan dalam menentukan arah bernegara, berbangsa dan bermasyarakat secara signifikan.

4. Pemilu 2009 adalah “gerbang” bagi PKP INDONESIA dalam mewujudkan cita-cita kelahirannya tersebut, karena Pemilu 2009 merupakan wahana politik kenegaraan yang sah, merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia setelah 100 Tahun Kebangkitan Nasional, 80 Tahun Sumpah Pemuda, 63 Tahun usia

kemerdekaan Republik Indonesia, dan 10 Tahun era transisi/Reformasi

5. Untuk dapat dipilih PKP INDONESIA harus mendapat simpati dari rakyat, dengan tahapan:
 - a. DIKETAHUI publik sebagai P2 dan P4 di Pemilu 2009;
 - b. DIKENAL sehingga PKP INDONESIA harus disosialisasikan dengan intens dan terarah;
 - c. DIBUTUHKAN karena kiprah & keperpihakannya kepada kepentingan umum, sehingga mendapatkan simpati;
 - d. DIPILIH karena rakyat menyukainya.
6. Apa yang dibutuhkan :
 - a. Pengembangan brand image dan sosialisasi : melalui rubrik opini, iklan/promosi, dalam Partai tugas ini diemban oleh sub struktur Kebijakan Publik;
 - b. Agen/jaringan & Personal : melalui konsolidasi secara langsung baik oleh struktur resmi (DPN, DPP, DPK, DPC, DPD/L) maupun struktur yang akan dibentuk secara Adhoc (Bapilu/Dapil/dil), dalam Partai tugas ini diemban oleh sub struktur Sumberdaya.
 - c. Tentunya kedua peran, tugas dan tanggung jawab di atas harus dapat bersinergi, sehingga diperlukan adanya :
 - 1) Tim pengarah oleh ketua Umum dibantu para Ketua, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Pertimbangan.
 - 2) Tim yang mengelola manajemen Partai secara umum dan khusus keuangan yaitu kesekjenan dan kebendaharaan.
 - d. Seluruh Program dapat bekerja dengan baik hanya apabila didukung dengan dana yang cukup. Karena Partai Politik sekarang dananya tidak lagi disiapkan oleh pemerintah seperti pada jaman Orde Baru, sehingga perlu ada Tim Khusus yang menangani penggalan dan pengelolaan dana partai (fund rising) yang diemban oleh sub struktur Sumberdana.

- e. Tentunya kesemuanya itu dikendalikan dalam satu komando, yaitu Ketua Umum.
7. Diharapkan seluruh personil baru ini dapat :
- a. Menjaga Kesatuan dan Persatuan ;
 - b. Profesional dalam bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. Mengembangkan prinsip kemandirian dan kerjasama.
8. Target PKP INDONESIA :
- a. Suara sah : 5.000.000 suara (minimal moderat-dapat dicapai).
 - b. Kursi DPR : Akan dihitung kemudian, tetapi haruslah merupakan jumlah yang cukup dapat disegani dan mampu tunaikan tugas dan tanggung jawab.
9. Untuk itu perlu segera :
- a. Dibentuk Badan Pemenerangan Pemilu yang bertugas memberikan arahan dan rekomendasi kepada Partai tentang Strategi Sukses Pemilu 2009.
 - b. Tim Penjaringan Calon Anggota Legislatif, dan Tim Pemenangan Daerah Pemilihan yang bertugas membantu Ketua Umum memanagerial dan mengendalikan daerah Pemilihan dan Pemenangan. (Sumber Dokumen Internal PKPI 2008)

Kebijakan yang dibuat oleh Ketua Umum juga harus melihat situasi politik yang berkembang seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Ibu Mutia Hatta Swasono sebagai berikut :

..... bahwa kondisi penentu yang mempengaruhi partai politik adalah pertama kondisi masyarakat, yang dimaksud adalah problematika, kebutuhan dan harapan masyarakat. Jika partai dapat memetakan kondisi masyarakat ini secara tepat maka partai dapat merumuskan respon yang tepat pula dan yang kedua adalah peraturan UU, yang dimaksud adalah partai mampu memenuhi seluruh persyaratan perundang-undangan bidang politik, seperti UU no.2 Tahun 2008 tentang partai Partai Politik dan UU no. 10 Tahun

2008 tentang Pemilihan Umum, yang ditetapkan, tidak saja agar partai dapat beroperasi sebagai "Partai Politik (P2)", namun juga menjadi konstantan pemilihan umum sebagai "Partai Politik Peserta Pemilu (P4)" yang disegani. Dengan mempertimbangkan kedua kondisi tersebut, serta atas dasar platform partai yaitu visi, misi, fungsi, sifat dan lain-lain, Saya selaku Ketua Umum adalah sebagai penanggung jawab utama organisasi yang dipilih oleh Kongres, maka bertugas memimpin partai secara nasional dan DPN PKP INDONESIA, Memberikan petunjuk dan arahan kebijakan makro strategis partai ke luar dan ke dalam organisasi, Merumuskan strategi dan kebijakan makro, Bersama-sama SekJend menandatangani pernyataan sikap, pendapat, hubungan kerjasama, hasil PEMILU, kebijakan partai, peraturan partai, serta kebutuhan administrasi internal dan eksternal partai, Kemudian menyampaikan kebijakan, sikap, dan pernyataan baik ke dalam maupun ke luar.

Kemudian setelah proses kebijakan secara jelas terjadi maka kemudian langkah-langkah kebijakan yang dikemukakan oleh Ketua Umum PKP INDONESIA berkaitan dengan penjaringan calon anggota legislatif adalah dan khususnya caleg perempuan adalah :

..... perlu segera pertama dibentuk badan pemenangan pemilu yang bertugas memberikan arahan dan rekomendasi kepada partai tentang strategi sukses pemilu 2009 walau hasilnya sudah kita bisa lihat bahwa pada Pemilu 2009 ini sebenarnya kita bisa mendapatkan suara untuk DPR RI lebih dari 2.5 persen dan kita bisa lolos dalam Parliementary Threashold (PT) bila pihak KPU sendiri tidak melakukan kecurangan, kedua dibentuk Tim penjaringan calon anggota legislatif, dan tim pemenangan daerah pemilihan yang bertugas membantu Ketua Umum memanagerial dan mengendalikan daerah pemilihan dan pemenangan

Kemudian kebijakan yang tersebut langsung mendapat tanggapan dan melalui ketua Tim Penjaringan caleg Haidar H.S mengungkapkan sebagai berikut :

Mengenai kebijakan tentunya waktu itu pada Rapat Pleno DPN Ibu Ketua Umum yaitu Ibu Meutia Hatta memberikan arahan dan langkah yang kemudian hal ini diteruskan melalui Ketua Bidang masing-masing untuk disampaikan ke Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) dan selanjutnya hingga Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK), dan arahan dari beliau yang utama berkaitan dengan penjaringan caleg adalah perlu segera dibentuk Tim khusus yang bertugas menjaring caleg, dan akhirnya dibentuklah Tim Penjaringan Calon Anggota Legislatif (TPC) yang kemudian melalui rapat fungsionaris setelah rapat pleno disepakatilah saya menjadi ketua tim tersebut.

Kebijakan dalam Partai politik pada umumnya sudah ada aturan yang dibuat dan juga kewenangannya, seperti dikemukakan oleh pangamat politik dan pengajar ilmu politik Chusnul Mari'yah sebagai berikut :

Biasanya suatu kebijakan dalam partai politik sudah sudah tertuang dalam suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan kewenangan kebijakan harus dibuat oleh suatu Dewan Pimpinan dimana Dewan tersebut merupakan badan yang tertinggi dan umumnya bersifat kolektif. Tapi terkadang dalam pelaksanaannya biasanya para elit partai yang merasa punya keinginan pribadi dan ingin menonjol sendiri, mentang-mentang punya pengaruh maka terkadang kebijakan tersebut cenderung bersifat individu, dan inilah yang membuat suatu konflik internal dalam partai itu sendiri muncul.

4.3.1. Langkah-langkah Strategi

Setelah mengenal target dan situasinya, maka langkah selanjutnya adalah membuat langkah-langkah strateginya, ialah menyusun pesan yaitu menentukan tema dan materi. Syarat utama dalam mempengaruhi target dari pesan tersebut ialah mampu membangkitkan *perhatian* .

Langkah-langkah strategi PKP INDONESIA berkaitan dengan proses penjaringan calon anggota legislatif disampaikan dan dirumuskan pada Rapat Internal dengan TIM Penjaringan Calon Anggota Legislatif pada tanggal 1 Juni 2008 setelah rapat pleno berlangsung adalah :

1. Dalam Proses penjaringan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada kader-kader yang duduk dalam kepengurusan.
2. Membuka kesempatan lebih luas kepada simpatisan PKP INDONESIA yang berminat masuk ke bidang politik tentunya melalui mekanisme yang selektif.
3. Memberikan kesempatan secara khusus kepada kerabat/kawan/keluarga untuk masuk menjadi Caleg.

Kemudian berkaitan dengan menjaring caleg perempuan secara khusus Ibu Ketua Umum PKP INDONESIA menekankan :

1. Tantangan Pembangunan yang semakin kompleks semakin menuntut keterlibatan perempuan.
2. Turut menciptakan iklim yang kondusif bagi penataan kehidupan politik demokratis.
3. Memberikan kesempatan kader-kader perempuan yang potensial yang duduk dalam kepengurusan untuk aktif membantu penjaringan caleg perempuan.
4. Memberikan Peluang seluas-luasnya bagi perempuan sebagai caleg khususnya agar merepresentasikan kuota perempuan sebesar 30% (tiga puluh perseratus)

Langkah-langkh strategi yang dikemukakan Ketua Umum PKP INDONSEIA pada wawancara dengan peneliti intinya adalah perlunya proses yang selektif pada proses penjaringan dan dikemukakan sebagai berikut :

.....bahwa dalam penjaringan para caleg harus dilakukan secara selektif agar mereka dalam hal ini para caleg diharapkan mengerti dan mengetahui setiap permasalahan pada daerah pemilihan

masing-masing. Melalui Tim yang sudah dibentuk yaitu Tim Penjaringan Calon Anggota Legislatif (TPC).....

..... nah proses ini setelah semua dilengkapi dan di seleksi melalui pengurus untuk selanjutnya diserahkan ke KPU Pusat dan daerah atau KPUD, dari KPU dan KPUD tentunya masih diseleksi kelengkapan berkas lagi, baru setelah semua selesai maka akan diumumkan ke publik sebagai DCS(daftar caleg sementara) baru setelah kesempatan publikasi dan masukan dari masyarakat tidak ada maka sesuai dengan jadwal yang telah dibuat baru di publikasikan kembali sebagai DCT (daftar caleg tetap).

Strategi yang digunakan oleh PKP INDONESIA dilakukan dengan membuka jaringan komunikasi melalui para pengurus dan fungsionaris seperti yang di paparkan oleh ketua tim penjaringan caleg Haidar H.S sebagai berikut :

Langkah-langkah strategi yang saya lakukan bersama Tim Penjaringan Caleg adalah pertama mendata semua pengurus yang aktif pada DPN dan kemudian menghubungi dan menawarkan kepada seluruh jajaran yang duduk sebagai pengurus untuk masuk menjadi caleg PKP INDONESIA Pada pemilu 2009, kedua melalui fungsionaris dari pusat hingga ke propinsi untuk menjaring calon anggota legislatif dan di harapkan perempuannya berimbang dengan laki-laki, ketiga kepada simpatisan atau pengurus partai lain yang mau pindah ke PKP INDONESIA yang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk menjadi caleg, khususnya caleg perempuan, dan untuk tingkat propinsi dan kabupaten menyesuaikan dengan strategi yang dibuat di pusat.

Persaingan antar partai menuntut suatu partai harus mempunyai strategi dan strategi berkaitan dengan penjaringan caleg dikemukakan oleh pengajar ilmu politik Chusnul Mari'yah yaitu :

Langkah-langkah strategi perlu dibuat oleh setiap partai karena melihat juga bahwa partai juga punya pesaing yang juga mereka sama-sama melakukan hal intens, sementara itu cara pandang

simpatisan melihat bahwa apakah partai yang saya pilih bila saya masuk menjadi menjadi caleg bahwa perjuangan saya dapat terpenuhi, dan berbagai alasan lainnya juga banyak dikemukakan dalam masyarakat, tapi biasanya para caleg yang masuk tidak lagi melihat kepentingan masyarakat dan umumnya mereka lebih melihat bagaimana saya dapat meraih suara sesuai target.

4.3.1. Target persentase kuota perempuan

Akhirnya unsur yang paling dominan dalam keseluruhan proses komunikasi untuk mencapai efektifitas adalah komunikator, yaitu mereka yang menyusun dan melontarkan pesan atau pernyataan ke publik (arifin,1984,87) Kedudukan dan fungsi komunikator dalam upaya menciptakan efektifitas dalam proses komunikasi adalah penting sekali, karena daripadanya terletak efektif tidaknya pesan-pesan yang dibuat.

Tim Penjaringan Calon Anggota Legislatif (TPC) telah berhasil mencapai hasil dengan telah mendapatkan jumlah caleg sebesar tiga ratus limabelas (315) caleg dan dari jumlah tersebut kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) tercapai. Dan proporsi Jumlah caleg perempuan sebesar seratus empat puluh dua (142 caleg) atau sebesar 45,08% dan dengan hasil ini kinerja tim diakui oleh Ketua Umum PKP INDONESIA cukup bagus, seperti yang dikemukakan dalam wawancara yaitu :

.....Sejak saya menjadi ketua umum PKPI saya berusaha menempatkan perempuan lebih banyak yang duduk pada jajaran kepengurusan dan hasilnya secara persentase pengurus perempuan pada DPN PKPI sebesar tiga puluh enam persen (36%) artinya kita sudah mengkomodir prasyarat yang ada,.....

.....mengenai target saya bersyukur bahwa dari tahapan DCS ke DCT secara nasional dan di tingkat DPR RI, PKP INDONESIA mengukir prestasi sebagai partai politik dengan jumlah persentase caleg perempuan yang terbesar yaitu sebesar empat puluh lima koma

not delapan persen (45,08%). Itu berarti jumlah caleg perempuan dan caleg laki-laki di PKP INDONESIA sangat berimbang, sebagaimana jumlah penduduk Indonesia yang juga sangat berimbang antara warga perempuan dan warga laki-laki, bahkan data statistik menunjukkan bahwa jumlah perempuan masih lebih banyak dari jumlah laki-laki di Indonesia. Kebijakan dan strategi untuk memiliki jumlah caleg perempuan yang dominan secara nasional bukanlah sekedar latah, bukanlah sekedar gagah-gagahan, bukanlah sekedar memenuhi ketentuan perundang-undangan, bukan pula karena Ketua Umum-nya seorang perempuan atau bahkan karena Ketua Umum-nya menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan, tetapi justru karena inilah jati diri PKP INDONESIA sebagai partai nasionalis = kebangsaan yang non-diskriminatif, sehingga semua unsur dalam tubuh PKP INDONESIA memperoleh tempat dan perlakuan yang sama dan setara, termasuk dalam soal gender mainstream.

Keterwakilan perempuan calon legislatif PKP INDONESIA pada awalnya juga melalui proses seleksi dan hal tersebut juga di jelaskan oleh oleh ketua tim penjangaran calon anggota legislatif Haidar H.S sebagai berikut :

Pada awalnya setelah melalui strategi yang dilakukan maka pendaftaran yang masuk pada awalnya berjumlah empat ratus lima belas (415) kemudian dari situ yang berkas yang masuk ada tiga ratus enam puluh lima (365) dan setelah melewati proses seleksi dan kelengkapan maka caleg yang siap dan bisa mengikuti pemilu legislatif pada 9 april 2009 berjumlah tiga ratus lima belas (315) dan dari situ seratus empat puluh dua (142) caleg adalah perempuan, dan caleg yang masuk umumnya sudah melalui proses seleksi dan umumnya sudah sarjana walau persyaratan minimal adalah smu.

4.3. Kekuatan PKP INDONESIA

PKP INDONESIA sebagai partai yang mempunyai visi dan misi yang konsisten dan pembangunan karakter organisasi partai antara lain : (Dokumen Profil PKPI 1999-2008)

1. Partai Nasionalis Kebangsaan

Sebagai partai dengan jati diri nasionalisme dan kebangsaan, mewajibkan PKP INDONESIA harus melayani seluruh wilayah nusantara tanpa diskriminasi dan terus mengembangkan organisasinya sampai ke tingkat terbawah untuk lebih dekat dengan massa-rakyat. Komitmen ideal tersebut dibangun dengan prinsip kemandirian dan gotong royong antar anggota / kader.

2. Partai Politik Mandiri

Untuk dapat bersikap independen dan teguh dalam misi perjuangannya, menjadikan PKP INDONESIA sejak awal berdiri telah mencanangkan prinsip KEMANDIRIAN sebagai jati diri sama prinsipilnya dengan konsepsi pembelaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konsepsi kemandirian, PKP INDONESIA dibangun dalam pendekatan sistem, menghindari pendekatan personal/figur sentris atau kultus individu. Untuk itu PKP INDONESIA senantiasa mengembangkan pendekatan demorasi dan aspirasi dari "bawah ke atas" (*bottom-up approach*). Tentunya kombinasi pendekatan dari "atas ke bawah" (*top-down approach*) tetap dibutuhkan untuk memberikan fungsi pengarahan penataan, pengayoman, fasilitasi, koordinasi dan kepemimpinan, sebagai konsekuensi dari partai politik nasional dengan puncak kepemimpinan berada di tingkat nasional.

3. Partai Politik Modern

Organisasi PKP INDONESIA bertumbuh berkat dukungan simpati publik, karena tertarik dan percaya terhadap sistem pengelolaan partai, kinerja partai, tawaran program partai, serta kualifikasi dan integritas para kader dan kepemimpinan partai yang dapat dipercaya dan dinilai mampu berperan memecahkan permasalahan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Untuk itulah, konsep pengelolaan partai =PKP INDONESIA =

dikelola secara MODERN, dengan unsur-unsur pokok : (a) Adanya suatu platform yang merupakan perekat dan motivasi rasional dari para anggota partai, berupa visi, misi dan landasan perjuangan partai; (b) Kehidupan partai didukung oleh kesukarelaan anggotanya, sehingga partai dapat mandiri dalam bersikap dan tidak tergantung pada orang lain atau kelompok tertentu; (c) Pola Komunikasi dan sosialisasi politik dapat mencerdaskan rakyat sebagai bagian penting dari pendidikan politik; (d) Pola kaderisasi yang mampu melahirkan kader-kader penyelenggara negara di berbagai bidang, agar tidak "gagap" bila diberi kepercayaan oleh rakyat di suatu kurun waktu; (e) Pembedaan antara tugas-tugas politik dan administrasi, sehingga pendewasaan berpolitik di kalangan kader, fungsionaris dan eksekutif partai dapat tertangani secara lebih efektif.

4. Partai Politik Kader

Orgainsasi PKP INDONESIA bertumbuh tidak hanya dengan mengandalkan basi masa tradisional-emosional semata, tetapi mengedepankan pembentukan KADER partai secara nasional, pada setiap aspek kehidupan, meliputi setiap segmen profesi, bersifat lintas gender, asal usul, suku, ras, agama dan golongan, melalui suatu mekanisme proses penerimaan anggota dan pelaksanaan pendidikan kader yang terencana, sistematis, reguler, dan berkualitas atas dasar prinsip non diskriminasi dan merit sistem.

5. Partai Politik Populis (memasyarakat)

Tantangan terbesar persoalan bangsa kita adalah tidak/belum tersentuhnya penyerapan (artikulasi) dan perjuangan (agregasi) aspirasi dan kepentingan rakyat secara substansial. Paradigma "bersama-sama rakyat membangun hari depan", adalah "kata kunci" sukses PKP INDONESIA ke masa depan. Untuk itu, disamping terus memperkuat jati diri sebagai MANDIRI dan partai MODERN berbasiskan KADER, maka konsepsi jati diri yang harus dikembangkan PKP INDONESIA ke masa depan adalah jati diri sebagai partai POPULIS (memasyarakat), Artinya, partai yang tidak eksklusif, tidak etis, memahami hati nurani rakyat dan

aspirasinya, sehingga menjadi pelaku pembangunan yang produktif dan bernilai tinggi.

4.3.1. Faktor Figur dan Infrastruktur

Faktor kekuatan pada PKP INDONESIA dalam penjangkaran caleg perempuan menjadi kekuatan dan figur tersebut adalah figur Mutia Hatta Swasono sebagai Ketua Umum PKP INDONESIA dan juga menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan, hingga kaum perempuan yang menjadi caleg PKP INDONESIA, melihat figur ketua umum adalah seorang perempuan, bagi para bakal caleg perempuan dapat merupakan sebagai motivasi tersendiri.

Keberadaan Ketua Umum yaitu Seorang perempuan juga tidak terpilih dengan sendirinya tapi melalui proses yang panjang hingga pada akhirnya kepemimpinan partai dimandatkan ke seorang perempuan dan hal ini dikemukakan oleh Ketua Umum PKP INDONESIA Meutia Hatta Swasono sebagai berikut :

Berbicara mengenai kekuatan tentunya tidak lepas dari suatu kebijakan internal dalam hal ini kebijakan yang terkait dengan penjangkaran calon anggota legislatif dimana PKP INDONESIA sudah konsisten terhadap peran perempuan dalam kiprahnya berpolitik dimana sejak kepemimpinan Almarhum Bp. Edi Sudradjat sendiri sudah menempatkan perempuan pada posisi yang strategis di dalam kepengurusannya dan saya sendiri pada saat itu juga dilibatkan pada posisi sebagai anggota sekretaris jendral dan faktor kekuatan tentunya juga tidak lepas dari visi, misi dan platform PKP INDONESIA, hingga pada saat berpulangannya Edi Sudradjat selaku ketua umum PKP INDONESIA ke rahmatullah pada awal Desember 2006, secara tidak langsung berpengaruh terhadap seluruh jajaran partai secara nasional. Meski roda organisasi tetap berjalan di bawah kendali Wakil Ketua Umum, Haris Sudarno, namun dalam rangka menghadapi pemilu 2009 jajaran partai secara nasional memandang bahwa perlu adanya figur nasional yang dapat menjadi

motor penggerak seluruh jajaran partai, yang diyakini dapat membawa PKP INDONESIA ke pintu gerbang kesuksesan sebagaimana amanat cita-cita kelahiran. Atas dasar pertama aspirasi jajaran partai mulai dari pendukung nasional sekaligus pendiri partai Bapak Try Sutrisno, jajaran DPN PKP INDONESIA dan para perwakilan DPP-DPP PKP INDONESIA secara informal; kedua koordinasi dan konsultasi para pimpinan partai baik yang bersifat formal maupun non formal; ketiga sandaran aturan partai yang termuat dalam AD/ART; serta keempat kesediaan kader yang diminta memimpin partai maka akhirnya melalui Rapat Pleno DPN PKP INDONESIA dan MUSPIMNAS IV PKP INDONESIA pada Januari 2008 akhirnya memilih saya sebagai pengganti antar waktu ketua umum DPN PKP INDONESIA masa bakti 2005-2010. kemudian faktor kekuatan lainnya adalah adanya revitalisasi organisasi PKP INDONESIA yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan UU no.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU no.10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota legislatif antara lain pemenuhan keterwakilan 30 persen perempuan pada pengurus partai dan juga penjaringan calon anggota legislatif perempuan. Faktor kekuatan yang juga menjadi tolak ukur PKP INDONESIA adalah infrastruktur hasil dari pemilu 2004 dimana PKP INDONESIA pada urutan 10 dengan perolehan suara sebesar lebih dari 1,4 juta yang menghasilkan 1 kursi DPR, 9 kursi DPRD dan 244 kursi DPRD kabupaten/kota.

Faktor kekuatan lainnya adalah infrastruktur berupa revitalisasi organisasi yang dilakukan Ketua Umum PKP INDONESIA masa bakti DPN 2005-2010 pada Januari 2008, seperti yang dikemukakan oleh Ketua Umum PKP INDONESIA :

.....faktor kekuatan lainnya adalah adanya revitalisasi organisasi PKP INDONESIA yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan UU no.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU no.10 Tahun 2008 tentang Pemilu

anggota legislatif antara lain pemenuhan keterwakilan 30 persen perempuan pada pengurus partai dan juga penjangkaran calon anggota legislatif perempuan. Faktor kekuatan yang juga menjadi tolak ukur PKP INDONESIA adalah infrastruktur hasil dari pemilu 2004 dimana PKP INDONESIA pada urutan 10 dengan perolehan suara sebesar lebih dari 1,4 juta yang menghasilkan 1 kursi DPR, 9 kursi DPRD dan 244 kursi DPRD kabupaten/kota.

Kekuatan PKP INDONESIA dalam menjaring caleg khususnya caleg perempuan ada pada infrastruktur dan figur, hal ini dikemukakan dengan singkat oleh ketua tim penjangkaran caleg Haidar H.S yaitu :

Kekuatan PKP INDONESIA adalah pada infrastruktur yang telah terbangun sebelumnya hingga dalam proses menjaring caleg khususnya caleg perempuan tidak begitu mengalami kesulitan dan dimana Ketua Umum partai ini kan dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan, maka sebisa mungkin kita harus dapat memenuhi keterwakilan perempuan sesuai dengan amanat UU yaitu tiga puluh persen (30%) dan akhirnya kita bisa menjaring caleg perempuan hingga empat puluh lima koma nol delapan persen (45,08%).

Semenjak Ketua Umum di jabat oleh Meutia Hatta, kehadiran kaum perempuan dalam tubuh PKP INDONESIA menjadi motivasi tersendiri seperti dikemukakan oleh Dewan Penasehat bidang Perempuan Eni Bushiri sebagai berikut :

...yang menjadi kekuatan kaum perempuan mau terlibat dalam PKP INDONESIA tentunya adalah peran figur Ibu Ketua Umum sebagai salah satu kekuatan dalam menjaring kepengurusan dan caleg, kemudian juga faktor kekuatan lainnya adalah juga telah lama sejak partai ini berdiri posisi perempuan telah mulai diperhatikan dimana juga posisi perempuan pada partai ini sudah didudukkan pada posisi yang tinggi tau dalam setiap kegiatan peran perempuan pada posisi sebagai ketuanya.

Kekuatan figur menjadi salah satu pengaruh dan juga tentunya infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya juga menjadi kekuatan lainnya dalam menjangkau caleg khususnya caleg perempuan, hal ini seperti dipaparkan juga oleh Pengajar Ilmu Politik yaitu Chusnul Mari'yah sebagai berikut :

.....secara kebetulan Ketua Umumnya Perempuan dan apalagi Beliau seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan, jadi setiap kebijakan yang dibuat oleh beliau mau tidak mau pengurus atau Tim yang telah dibentuk akan berusaha untuk menempatkan melibatkan perempuan dalam bakal caleg, jadi kalau boleh saya simpulkan tentunya faktor Figur masih menjadi suatu yang dominan disamping tentunya Infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya.

Faktor figur menjadi daya tarik yang utama, dan pernyataan tersebut dijelaskan dengan singkat oleh salah satu caleg DPR RI seorang perempuan Yetty Ani E. sebagai berikut :

Kalo menurut saya tentunya ya faktor ketua umum kita salah satunya karena beliau seorang perempuan dan juga seorang menteri yang pasti buat saya sebagai caleg perempuan sudah mengenal sosok ketua umum PKP INDONESIA, nah ini lah yang menjadi minat saya untuk masuk dan menjadi caleg, faktor lainnya karena partai ini juga bukan partai baru tapi partai yang saya dengan juga pernah dipimpin oleh almarhum bp Edi dimana dulu beliau juga seorang menteri yang menurut saya cukup bersih.

4.4. Kendala PKP INDONESIA

Negara-negara yang konstitusinya menjamin kesederajatan warga negaranya, masih sedemikian banyak kendala dalam merealisasikannya. Namun, jenis kesenjangan yang mempunyai prevalensi universal dan mempunyai akar sejarah, budaya, adat istiadat, religi, serta norma lokal adalah ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. (Kompas, 27 Januari 2009).

Perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan jender relatif tidak seberat dibandingkan dengan banyak negara lain di dunia. Dalam perspektif politik, bahkan perempuan Indonesia jauh lebih cepat memperoleh hak-hak politiknya dibandingkan dengan negara yang dianggap sebagai kampiun demokrasi, Amerika Serikat. Di negara itu, kaum perempuan memerlukan perjuangan sekitar 60 tahun untuk memperoleh hak pilih. Adapun perempuan Indonesia sejak pemilu pertama kali dilakukan tahun 1955, hak memilih telah dimilikinya.

Bahkan dengan terbitnya UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, kemajuan perjuangan lebih signifikan karena UU itu menegaskan beberapa hal sebagai berikut : *pertama* daftar bakal caleg paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan (pasal 53); *kedua* daftar caleg disusun berdasarkan nomor urut (pasal 55 Ayat1); *Ketiga*, dalam daftar caleg setiap tiga orang terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan (pasal 55 Ayat 2). Ketentuan itu sama spiritnya dengan Pasal 2 Ayat 5 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menegaskan persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan kepengurusan tingkat pusat.

Namun harapan itu kandas karena beberapa hal sebagai berikut. Pertama, penyusunan daftar caleg masih banyak menempatkan caleg perempuan tidak sesuai dengan UU Pemilu Legislatif; Kedua, yang lebih dramatis, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) akhir desember 2008 membatalkan Pasal 214 UU No.10/2008 mengenai penetapan caleg terpilih berdasarkan nomor urut karena bertentangan dengan UUD 1945. (Analisis Politik: J Kristiadi dalam Kompas 27 januari 2009). Terlepas dari kontroversi keputusan itu, dampak yang memprihatinkan adalah hilangnya hak konstitusional perempuan Indonesia. UU Pemilu legislatif secara tegas menyatakan perempuan Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan diskriminatif positif. Ketentuan itu mempunyai dasar yang kuat dalam Pasal 28 Huruf H UUD 1945.

Kendala PKP INDONESIA dalam menjaring caleg perempuan tidak begitu sulit, hanya kaum perempuan yang masuk menjadi caleg oelh partai

harus perlu adanya pendidikan politik dan hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ketua Umum PKP INDONESIA :

..... Sejak saya menjadi ketua umum PKPI saya berusaha menempatkan perempuan lebih banyak yang duduk pada jajaran kepengurusan dan hasilnya secara persentase pengurus perempuan pada DPN PKPI sebesar 36% artinya kita sudah mengakomodir prasyarat yang ada, dan perempuan yang menjadi pengurus tentunya perempuan yang telah melewati proses seleksi jadi saya yakin perempuan yang ada pada jajaran PKPI cukup berkualitas.....

..... Sebenarnya masalah kendala dalam penjangkaran perempuan di PKP INDONESIA tidak begitu sulit dalam proses penjangkarnya hanya umumnya perempuan yang masuk partai biasanya tidak begitu aktif, mereka kaum perempuan harus selalu di beri pendidikan politik agar bisa lebih tahu kapasitas dan posisi dia di tengah masyarakat....

Tidak adanya kendala secara khusus dalam penjangkaran caleg perempuan di PKP INDONESIA juga dikemukakan oleh Ketua Tim Penjangkaran Calon Anggota Legislatif Haidar H.S dan pernyataan yang sama juga dikemukakan pula oleh Dewan Penasehat bidang Perempuan PKP INDONESIA Eni Bushiri dan juga oleh caleg perempuan Yetty Ani E memaparkan dengan bahwa :

kendala dalam penjangkaran untuk partai ini mungkin menurut saya tidak ada, karena itu urusan para pengurus dalam mencari dan menjangking, tapi kalo perempuan yang terlibat dalam partai atau menjadi caleg adalah melihat pengalaman saya dimana ada rekan saya yang terlibat menjadi caleg, awalnya didukung oleh suami atau keluarganya tapi setelah banyak kegiatan yang akhirnya banyak meninggalkan keluarga maka hal ini menjadi suatu yang membuat akhirnya motivasi untuk lebih aktif dalam partai menjadi semakin berkurang dan menjadi keterlibatan di partai sebagai sampingan yang tidak menjadi serius, saya sendiri juga hampir mengaami hal yang sama, tapi memang berat posisi saya dimana saya juga terkadang harus meninggalkan keluarga tapi alhamdulillah keluarga saya bisa mengerti.

Kendala perempuan menjadi caleg sangat banyak disamping budaya patrenalistik dan pandangan dari agama juga sangat menjadi kendala disamping kendala lainnya seperti yang dikemukakan oleh pengajar ilmu politik Chusnul Mari'yah sebagai berikut :

Berbicara kendala partai politik dalam menjaring caleg yang perempuan bahwa kendala yang paling utama adalah dari diri individu perempuan itu sendiri kemudian hambatan yang ada adalah pertama hambatan politik artinya sistem pemilu masih belum transparan atau kalo melihat istilah dulu adalah LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia), kedua Hambatan ekonomi yaitu perjuangan hak-hak perempuan dan kemiskinan artinya bahwa bila perempuan terlibat bila secara ekonomi masih tergantung dengan suami atau laki-laki maka kebebasan masih semu dan apalagi persentase perempuan yang miskin masih banyak, ketiga ideologi dan psikologi secara budaya perempuan masih dianggap kaum perempuan yang maju masih dianggap tabu, kemudian intepretasi agama bahwa perempuan masih dianggap kaum lemah; peran media dan psikologi perempuan masih banyak menggunakan figur perempuan sebagai barang komoditi dan secara psikologi banyak perempuan yang kurang percaya diri

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Strategi Komunikasi partai politik dalam menjaring calon anggota legislatif perempuan sudah menjadi sesuatu yang harus diimplementasikan oleh setiap partai politik, dan partai politik harus mau membuka diri berkaitan dengan proses menerima dan menjaring mulai dari pengurus dan calon anggota legislatif, apalagi pemerintah telah membuat aturan yang berkaitan dengan menempatkan persentase perempuan yang duduk di pengurus partai politik maupun sebagai calon anggota legislatif.

PKP INDONESIA memahami bahwa UU no. UU RI No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang tertulis pada pasal 53 yang isinya “ *Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan* “, Bagi PKP INDONESIA telah menerapkan pada proses penjaringan Caleg Perempuan dengan mengacu pada UU RI tersebut.

PKP INDONESIA menyadari akan pentingnya peran perempuan untuk masuk ke ranah politik perlu konsistensi karena proses bahwa peran partai politik menjadi salah satu bagian penentu perempuan bisa terlibat langsung dalam proses kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Dari hasil kajian terhadap Strategi Komunikasi Partai Politik dalam Menjaring Calon Anggota Legislatif Perempuan itu, dapat disimpulkan antara lain:

1. Strategi PKP INDONESIA dalam menjaring Calon Anggota Legislatif belum maksimal artinya bahwa dari jumlah kursi untuk Anggota Legislatif sebanyak 560 Kursi, PKP INDONESIA seharusnya dapat menempatkan Calegnya sebanyak 700 Caleg tetapi yang dapat dijaring sebesar 315 Caleg. Dan Strategi dalam menjaring Caleg Perempuan telah berhasil menjaring jumlah caleg yang cukup banyak atau hampir berimbang dengan Caleg laki-laki yaitu sebesar empat puluh lima koma nol delapan persen (45,08%).

Dan temuan yang ada adalah bahwa dalam proses penjaringan politik masih tetap cenderung elitis dan sarat dengan isu-isu Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

2. Faktor Kekuatan PKP INDONESIA dalam menjaring Caleg Perempuan ada pada Faktor Figur dalam hal ini Figur yang digunakan adalah Figur Ketua Umum dimana Figur tersebut adalah pertama seorang perempuan yang populer, kedua menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan faktor kekuatan yang lain adalah Infrastruktur yang telah terbentuk dimana partai PKP INDONESIA tersebut adalah bukan partai yang baru, artinya partai ini telah mempunyai kader dan simpatisan sebelumnya.
3. Faktor Kendala PKP INDONESIA dalam menjaring Caleg perempuan, adalah sebagian besar kaum perempuan tidak percaya diri untuk tampil dan aktif dalam bidang politik, kemudian Caleg Perempuan yang terjaring oleh PKP INDONESIA masih ada yang tidak berkualitas.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Praktis

Beberapa saran praktis yang bisa dikemukakan dalam kaitannya Strategi Komunikasi Partai Politik dalam Menjaring Calon Anggota legislatif Perempuan, antara lain :

1. Strategi PKP INDONESIA dalam menjaring perlu lebih membuka diri ke publik, jadi kesan elitis dan unsur KKN lebih dikurangi dan bila perlu dihilangkan, agar hasil strategi lebih maksimal.
2. Faktor yang menjadi kekuatan PKP INDONESIA dapat dikembangkan dengan pada 4 hal yaitu SMCR, dimana *S* (*Source/Sumber*) Figur yang populer dapat dibuat tidak hanya melalui Ketua Umum saja, *M* (*Message/Pesan*) Visi dan Misi disosialisasikan ke para kader, simpatisan dan publik yang lebih luas agar lebih banyak yang mengetahui, *C* (*Channel/Saluran*)

Partai ini harus mempunyai jaringan yang lebih luas tidak hanya dari kalangan internal partai tapi kalangan eksternal harus dijalin lebih luas, R (*Receiver/Penerima*) perlu diberikan dorongan kepada kader dan simpatisan yang potensial khususnya Kader/Simpatisan perempuan.

3. Faktor keberhasilan menempatkan persentase keterwakilan perempuan jangan menjadi suatu tolak ukur artinya bahwa faktor kendala pada perempuan yang masuk menjadi Caleg, bahwa Caleg Perempuan harus selalu diberi pendidikan politik, Agar kiprahnya sebagai Caleg Perempuan dapat di maksimalkan yaitu dengan dimulai bahwa Caleg Perempuan mempunyai pemahaman mengenai masih banyaknya peran perempuan yang harus diperjuangkan.

5.2.2. Saran Akademik

Penelitian ini dilakukan, setelah hasil Daftar Caleg Tetap telah diumumkan, sehingga telah diketahui bagaimana hasil strategi komunikasi PKP INDONESIA dalam menjaring Calon Anggota Legislatif Perempuan, Untuk itu kepada mereka yang berminat terhadap Strategi yang dilakukan Partai Politik dalam menjaring Caleg masih sangat terbuka ruang untuk meneliti lebih mendalam mengenai PKP INDONESIA dibandingkan dengan Strategi Komunikasi Partai lain dalam menjaring Caleg Perempuan.

Meningkatkan Penelitian atas Partai Politik yang mengedepankan keterlibatan Perempuan masih relatif relevan dengan isu mengenai keterlibatan perempuan dalam politik, maka diperlukan lebih banyak kajian akademis agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana Strategi Komunikasi Partai Politik dalam menjaring Caleg Perempuan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustono, Budi, 2000, *Perempuan dalam partai politik di Masa Orde Reformasi (Transisi)*, Pusat Studi Wanita Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Arifin ,Anwar, 1984, *Strategi Komunikasi(Sebuah pengantar ringkas)*, Armico, Bandung.
- Astuti, Sri Wahyuni, 2004, "*Manajemen Pemasaran*". Buku Materi pokok Universitas Terbuka, Jakarta
- Budiarjo, Miriam, 1998, *Partisipasi dan partai politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- _____, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Budiman, Kris, 1999, *Feminografi*, Pustaka pelajar, Yogyakarta
- Baines, Paul R;Brennan, Ross;Egan, John, 2003,*Structure and Strategy in Political Market*, Middlesex University Discussion Paper Series. Middlesex University Bussiness School, London.
- Bannon, Declan P, 2004, *Marketing Segmentation and Political marketing*, Paisley Bussines School, Paisley-UK, London
- Bystrom, Dianne, 2004, *Women as Political Communication Source*, in *Hand Book of Political Communication*, Lawrence Elbaum Associate Publishes : Kaid, Lynda Lee.
- Cartee, Karen S Johnson & Copeland, Gary A, 2004, *Strategic Political Communication*, Rowman & Littlefield Publisher.inc.Oxford,
- Coleman, J.S. 1987, "Equility." Dikutip dalam J. Eatwell, M. Milgate, dan P. Newman, eds., *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, Vol.2. London: The Macillan Press Limited.
- Creedom, Pamela J. 1993, *Women in Mass Communication*, Sage Publication, London.
- Denzin, Norman; Lincoln, Yvonna, 2005, *The Sage Handbook of Qualitative Research*, Sage Publication, London.

- Engendering Development, 2005, *Pembangunan Berperspektif Gender*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Fauzi, Ikhwan, 2002, *Perempuan dan Kekuasaan*, Penerbit AMZAH, Jakarta.
- Fakih, Mansour, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Faturohman, Deden dan Sobari, Wawan, 2002, *Pengantar Ilmu Politik*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Firmansyah, 2008, *Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Gazali, Effendi, 2005, *modul manajemen persuasi dan pencitraan*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Graber, Doris A, editor, 1984, *Media Power in Politics*, Congressional Quarterly Inc, London
- Humm, Maggie, 1995, *The dictionary of Feminist Theory*, Prentice Hall, USA.
- Kasali, Rhenald, 1995, *Manajemen Periklanan, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Sarwono, 2007, *Politik dan Perempuan*, Penerbit Koekoesan, Jakarta
- Kolbe, Richard L., 1985, *American Political Parties. An Uncertain Future*, Harper & Row Publishers, New York.
- Kotler, Philip; ED. L.R, 2000, *Social marketing Strategies for Changing Public Behavior*, The Free Press, New York.
- Larson, Charles U, 1986, *Persasion Reception and responsibility*, Wadsworth Publishing Company, California
- Lie, Shirley, 2005, *Pembebasan Tubuh Perempuan : Gugatan Etis Simone de Beauvoir terhadap Budaya Patriarkat*, Grasindo, Jakarta
- Moleong, Lexy, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Montero, Jose Ramon; Gunther, Richard, 2004, *Reviewing and Reassessing Parties dalam Political Parties-Old Concepts and New Challenges*, Oxford University Press, California

- Mulyana, Dedy, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Murniati, A.Nunuk P, 2004, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*, Indonesia Tera, Magelang.
- Neumann, W. Lawrence, 2000, *Social Research Methods-Qualitative and Quantitative Approaches*, 4th Edition, Pearson Education Company.
- Newman, Bruce I & Perloff, Richard, 2003, *Political Marketing : Theory, Research and Application in Women as Political Communication Source* in Hand Book of Political Communication, Lawrence Elbaum Associate Publishes : Kaid, Lynda Lee
- Newman, Bruce I, 1999, *Handbook of Political Marketing*, Sage Publication, London
- Nimmo, Dan. 2001, *Komunikasi Politik : Khalayak dan Efek*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- O'Shaughnessy, Nicholas, 1999, *Political Marketing and Political Propaganda, In Handbook of Political Marketing*, Newman (ed). Sage Publication, Inc, California
- Prihatnoko, Joko J, 2008, *Mendemokratiskan Pemilu*, LP3M Universitas Wahid Hasyim, Semarang.
- Quin, Tom, *Political Communication II : Political Marketing*, GV 519-British Political Parties, London.
- Scarrow, Susan, 2005, *Political Parties and Democracy in Theoretical and Prastical Perspectives*, NDI for International Affairs, Orlando.
- Seda, Francisia, 2003, *Meningkatkan Partisipasi Perempuan : bukan Jumlah Semata dalam Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, IDEA, Jakarta.
- Shimp, Terence A, 1997, *Advertising, Promotion and Supplemental Aspects of Integrated Marketing Communications*, 4th ed., The Dryden Press Flarcourt Brace College Publisher, Orlando.
- Sunarto, Kamanto, 2000, *Pengantar Sosiologi*, LPFEUI, Jakarta
- Yin, Robert K, 2002, *Studi Kasus : Desain dan Mode*, PT. Rajagrafindo, Jakarta

Universitas Indonesia, 2008, *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia*, Jakarta

Dokumen dan Peraturan :

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKP Indonesia, 2008

Dokumen Internal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Indonesia, 2008

UNDANG-UNDANG RI No. 2 tahun 2008 tentang *Partai Politik*

UNDANG-UNDANG RI No. 22 tahun 2007 tentang *Pemilu*

UNDANG-UNDANG RI No. 10 tahun 2008 tentang *Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD*

Dokumen KPU (*Komisi Pemilihan Umum*)

Jurnal :

AD, Kusumaningtyas, *Pemilu 2004, Menagih Komitment Parpol Islam untuk Demokrasi yang Berkeadilan Gender dalam Jurnal Perempuan "Politik dan Keterwakilan Perempuan"*, Jakarta :Yayasan Jurnal Perempuan , 2004

Dewi, Sinta R, 2006. "*Pengarus Utamaan Gender*", Jurnal Perempuan 50. Yayasan Jurnal Perempuan.

Murti, Ratna Batara.2006. "*Sejauh Mana Komitmen Negara*". Jurnal Perempuan 45, Yayasan Jurnal Perempuan.

Saraswati, Tumbu, 2004. "*Halo Senayan*". Jurnal Perempuan 35. Yayasan Jurnal Perempuan 35.

Marshment, Jennifer Lee, *Political Marketing as Party Management Thatcher in 1979n and Blair in 1997*, National Europe Centre Papaer No. 110

Tesis/Disertasis/Makalah :

Dooradi, Dicky M, 2006, *Penerapan Tehnik Political Marketing dan Hubungannya dengan Demokrasi Internal Partai Politik*, Program Pascasarjana Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

Erlyska, Irene, 2004, *Perempuan Sebagai Calon Legislatif Pemilu 5 April 2004 di Media Televisi*, Program Pascasarjana Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

Irmanto, 2008, *Strategi Kampanye Partai Politik Baru (Studi Kasus :Partai Hamura)*, Program Pascasarjana Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

Suryandari, Astri, 2008, *Pembuatan Kebijakan Partai Politik dalam Pilkada : Studi Kasus Penentuan Kandidat Partai Golkar dan PDIP pada Pilkada Jakarta*, Program Pascasarjana Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

Widiyanto, Nurul Ikhsan, 2005, *Pengaruh Keterwakilan Perempuan di Legislatif (Kajian Political marketing mengenai Pengaruh Eksposur Iklan pada Sikap dan Perilaku)*, Program Pascasarjana Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

Koran/Majalah/Tabloid :

Kompas, 27 Januari 2009 (*Suara Terbanyak dan Nasib Perempuan*)

Kompas, 9 Februari 2009 (*Tak Ada Alasan Meragukan Caleg Perempuan*)

Internet :

<http://www.antara.co.id/arc/2008/4/20/perempuan-sulit-jadi-pemimpin-karena-budaya/> diunduh pada 15 Desember 2008.

<http://re-searchengines.com/mjannah.html>

http://www.bps.go.id/sector/population/Pop_indo.htm

Kompas Cyber Media - Kesehatan.htm artikel tanggal 9 Juli 2005

<http://www.wikimu.com/News/>

<http://www.kpu.go.id/>

<http://kowani.or.id/profile/5/>

[http://dubes.go.id/norwegia/persamaan gender](http://dubes.go.id/norwegia/persamaan_gender)



Wawancara dengan Ibu Meutia Hatta Swasono

- Menteri Pemberdayaan Perempuan RI
- Ketua Umum PKP INDONESIA

Tempat : Rumah Kediaman
Kampus UNJ. Jl. Daksinapati Timur
Rawamangun Jakarta Timur
Hari/Jam : Kamis, 14 Mei 2009 / 20.00 WIB

Tanya: Bagaimana Strategi komunikasi yang dibangun oleh PKP INDONESIA ?.

Jawab: *Sesungguhnya suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan, PKP INDONESIA sendiri telah jauh hari, yaitu dari awal mula pendirian partai ini yang berdiri dengan dilatarbelakangi oleh terusiknya rasa keadilan dan persatuan yang terabaikan, maka PKP INDONESIA akan selalu memulai menerapkan rasa keadilan tersebut di mulai dari lingkungan internal partai sendiri. PKP INDONESIA berprinsip dan berkebijakan bahwa semua perjuangan kita harus dipraktekan dulu dari diri kita sendiri. Tidak mungkin seseorang yang bertindak adil dalam keluarganya akan mampu bertindak adil bagi lingkungannya. Jadi berbicara strategi komunikasi PKP INDONESIA berarti berbicara tentang bagaimana sebuah perubahan diciptakan pada khalayak dengan mudah dan cepat ?. Untuk itu Saya selaku ketua umum, bahkan selalu dalam setiap Rakornas berbicara kepada jajaran DPN,DPP dan DPD serta secara khusus pada rapat pleno, DPN juga menekankan pada Ketua-ketua koordinator bidang , ketua-ketua bidang, koordinator wilayah dan departemen-departemen dengan menekankan perlunya para kader partai harus selalu membuat dan membuka komunikasi, karena dengan semua pihak mau berkomunikasi, mau tidak mau pasti mengalami perubahan besar.*

Tanya: Maksudnya ?

Jawab: *Bahwa komunikasi dapat merubah sama sekali citra para kader secara individu ataupun secara organisasi, mengenal dirinya sendiri maupun mengenai lingkungannya, itulah sebabnya PKP INDONESIA memandang strategi komunikasi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam keseluruhan bentuk perubahan sosial, yaitu dimana para kader atau organisasi PKP INDONESIA ini berada dan selalu siap serta mengenal setiap permasalahan yang ada pada daerah masing-masing, dan hal ini harus selalu dikoordinasikan ke atas ataupun ke setiap jaringan struktur dalam PKP INDONESIA.*

Tanya: Bagaimana proses kebijakan Ketua Umum PKP INDONESIA.?

Jawab: *Begini sebelumnya bisa dijelaskan bahwa kondisi penentu yang mempengaruhi partai politik adalah pertama kondisi masyarakat, yang dimaksud adalah problematika, kebutuhan dan harapan masyarakat. Jika partai dapat memetakan kondisi masyarakat ini secara tepat maka partai*

dapat merumuskan respon yang tepat pula dan yang kedua adalah peraturan UU, yang dimaksud adalah partai mampu memenuhi seluruh persyaratan perundang-undangan bidang politik, seperti UU no.2 Tahun 2008 tentang partai Partai Politik dan UU no. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, yang ditetapkan, tidak saja agar partai dapat beroperasi sebagai "Partai Politik (P2)", namun juga menjadi konstantan pemilihan umum sebagai "Partai Politik Peserta Pemilu (P4)" yang disegani. Dengan mempertimbangkan kedua kondisi tersebut, serta atas dasar platform partai yaitu visi, misi, fungsi, sifat dan lain-lain, Saya selaku Ketua Umum adalah sebagai penanggung jawab utama organisasi yang dipilih oleh Kongres, maka bertugas memimpin partai secara nasional dan DPN PKP INDONESIA, Memberikan petunjuk dan arahan kebijakan makro strategis partai ke luar dan ke dalam organisasi, Merumuskan strategi dan kebijakan makro, Bersama-sama SekJend menandatangani pernyataan sikap, pendapat, hubungan kerjasama, hasil PEMILU, kebijakan partai, peraturan partai, serta kebutuhan administrasi internal dan eksternal partai, Kemudian menyampaikan kebijakan, sikap, dan pernyataan baik ke dalam maupun ke luar.

Tanya: Bagaimana langkah-langkah kebijakan yang diputuskan berkaitan dengan strategi komunikasi ?

Jawab: *Begini, mengenai langkah-langkah kebijakan pernah saya utarakan pada Rapat Pleno perdana DPN PKP INDONESIA setelah ada revitalisasi yang intinya adalah PKP INDONESIA setelah diumumkan lulus verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu 2009 oleh KPU pada tanggal 30 Mei 2008, sehingga mengacu pada UU no 10 tahun 2008 tentang Pemilu pada pasal 316 d dan keputusan KPU no.12 tahun 2008, maka PKP INDONESIA sebenarnya telah merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2009, kemudian dibutuhkan pengembangan brand image dan sosialisasi melalui opini, iklan/promosi, dalam partai, tugas ini diemban oleh sub struktur kebijakan publik. Kemudian agen/jaringan dan personal melalui konsolidasi secara langsung baik oleh struktur resmi yaitu DPN, DPP, DPK, DPC, DPD maupun struktur yang akan dibentuk secara Adhoc yaitu Bapilu atau Dapil, dalam partai tugas ini diemban oleh sub struktur sumberdaya. Semua itu dikendalikan dalam satu komando yaitu oleh Ketua Umum. Akhirnya untuk hal tersebut perlu segera pertama dibentuk badan pemenangan pemilu yang bertugas memberikan arahan dan rekomendasi kepada partai tentang strategi sukses pemilu 2009 walau hasilnya sudah kita bisa lihat pada Pemilu 2009 ini sebenarnya kita bisa mendapatkan suara untuk DPR RI lebih dari 2.5 persen dan kita bisa lolos dalam Parliementary Threashold (PT) bila pihak KPU tidak melakukan kecurangan, kedua dibentuk Tim penjangkaran calon anggota legislatif, dan tim pemenangan daerah pemilihan yang bertugas membantu Ketua Umum memanegerial dan mengendalikan daerah pemilihan dan pemenangan.*

Tanya: Bagaimana Strategi Komunikasi PKP INDONESIA dikaitkan dengan proses penjangkaran caleg ?

Jawab: *Berbicara mengenai strategi adalah sesuatu yang sangat penting dan harus dilakukan, Untuk mencapai visi dan misi secara baik maka diperlukan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi yang sedang berkembang. Secara umum pilihan strategi adalah "Sinergi dari beberapa strategi yang dapat dilaksanakan di daerah pemilihan sesuai kondisi masyarakat setempat". Strategi mengandung pengertian Sarana, Cara, dan Sasaran yang ingin dicapai. Ruang lingkup strategi harus diupayakan mampu menjangkau masalah satu tingkat ke atas dan dua tingkat ke bawah. Mengingat titik berat Pemilu adalah jumlah pemilih, maka strategi komunikasi harus menjangkau pencapaian jumlah pemilih pada tingkat Nasional, daerah Tk I, maupun Daerah TK II secara sinergis maka hal itu dituntut bahwa dalam penjurangan para caleg harus dilakukan secara selektif agar mereka dalam hal ini para caleg diharapkan mengerti dan mengetahui setiap permasalahan pada daerah pemilihan masing-masing. Melalui Tim yang sudah dibentuk yaitu Tim Penjurangan Calon Anggota Legislatif (TPC) ,proses penjurangan ini tentunya bisa dikatakan sulit karena selain persyaratan yang harus dimengerti serta dilengkapi serta pengisian formulir yang benar-benar harus dipahami oleh para caleg, nah proses ini setelah semua dilengkapi dan di seleksi oleh pengurus atau Tim TPC untuk selanjutnya diserahkan ke KPU Pusat dan daerah atau KPUD, dari KPU dan KPUD tentunya masih diseleksi kelengkapan berkas lagi, baru setelah semua selesai, maka akan diumumkan ke publik sebagai DCS(daftar caleg sementara) selama beberapa hari, baru setelah kesempatan publikasi dan masukan dari masyarakat tidak ada, maka sesuai dengan jadwal yang telah dibuat baru di publikasikan kembali sebagai DCT (daftar caleg tetap).*

Tanya: Selanjutnya bagaimana PKP INDONESIA melakukan penjurangan pada caleg perempuan berkaitan dengan UU mengenai keterwakilan perempuan pada partai politik dan Pemilu sebesar 30 persen?.

Jawab: *Sejak saya menjadi ketua umum PKPI saya berusaha menempatkan perempuan lebih banyak yang duduk pada jajaran kepengurusan dan hasilnya secara persentase pengurus perempuan pada DPN PKPI sebesar tiga puluh enam persen (36%) artinya kita sudah mengakomodir prasyarat yang ada, dan perempuan yang menjadi pengurus tentunya perempuan yang telah melewati proses seleksi jadi saya yakin perempuan yang ada pada jajaran PKPI cukup berkualitas. Latar belakang bahwa saya selalu menegaskan berkali-kali, pemberdayaan perempuan harus terus ditingkatkan. Perempuan Indonesia, sejumlah 50 persen dari penduduk kita masih jauh tertinggal. Jumlah buta huruf, droupout, pengganguran, dan kemiskinan perempuan lebih besar dari laki-laki. Perempuan yang akan melahirkan anak-anak bangsa ini, sebagian harus menjadi pemimpin berkebangsaan dan sebagian menjadi warga negara tangguh berkesejahteraan. Dari sini, awalnya kita merealisasikan cita-cita nasional "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Dalam kegiatan rapat pleno hingga rakornas saya selalu menyampaikan bahwa*

sudah saatnya pada pemilu 2009 perempuan semakin diberdayakan dengan dijarah menjadi caleg PKP INDONESIA, jadi bukan hanya untuk memenuhi prasyarat sebesar 30 persen saja tapi juga memberikan kesempatan Perempuan untuk bisa memperjuangkan ketidakadilan kaum perempuan yang masih banyak terjadi, dari mulai kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dalam hal ini perempuan paling banyak persentasenya, dan ketidakadilan posisi perempuan dalam menduduki posisi strategis masih sangat langka.

Tanya: Bagaimana langkah-langkah strategis berkaitan dengan penjurangan caleg perempuan ?

Jawab: *Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa melalui Tim yang sudah dibentuk yaitu TPC, yang diketuai oleh Bapak Haidar. tentunya TIM tersebut sudah mempunyai platform sendiri yang tentunya mengacu dari kebijakan yang telah disampaikan oleh Ketua Umum pada rapat pleno yaitu : pertama terwujudnya kesetaraan gender dalam proses penjurangan, kedua meningkatkan kualitas peran dan kemandirian perempuan dalam berkiprah pada partai, ketiga hak asasi pada perempuan juga sama dengan hak asasi pada manusia.*

Tanya: Maksudnya ?

Jawab: *acuan mengenai hak asasi perempuan tentunya hal ini mengacu pada konferensi tentang HAM PBB di Wina pada tahun 1993 yaitu bahwa hak asasi perempuan dan anak perempuan adalah bagian yang tak terpisahkan dari Hak Asasi manusia secara menyeluruh, Perlunya partisipasi penuh dan setara bagi kaum perempuan dalam seluruh aspek kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya pada tingkat nasional, regional, dan Internasional kemudian penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin merupakan tujuan utama masyarakat sedunia dan kekerasan berbasis gender harus dihapuskan.*

Tanya : Bagaimana dengan target persentase keterwakilan perempuan pada PKP INDONESIA ?

Jawab: *Mengenai target saya bersyukur bahwa dari tahapan DCS ke DCT secara nasional dan di tingkat DPR RI, PKP INDONESIA mengukir prestasi sebagai partai politik dengan jumlah persentase caleg perempuan yang terbesar yaitu sebesar empat puluh lima koma nol delapan persen (45,08%). Itu berarti jumlah caleg perempuan dan caleg laki-laki di PKP INDONESIA sangat berimbang, sebagaimana jumlah penduduk Indonesia yang juga sangat berimbang antara warga perempuan dan warga laki-laki, bahkan data statistik menunjukkan bahwa jumlah perempuan masih lebih banyak dari jumlah laki-laki di Indonesia. Kebijakan dan strategi untuk memiliki jumlah caleg perempuan yang dominan secara nasional bukanlah sekedar latah, bukanlah sekedar gagah-gagahan, bukanlah sekedar memenuhi ketentuan perundang-undangan, bukan pula karena*

Ketua Umum-nya seorang perempuan atau bahkan karena Ketua Umum-nya menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan, tetapi justru karena inilah jati diri PKP INDONESIA sebagai partai nasionalis – kebangsaan yang non-diskriminatif, sehingga semua unsur dalam tubuh PKP INDONESIA memperoleh tempat dan perlakuan yang sama dan setara, termasuk dalam soal gender mainstream. Justru karena cara pandang yang mendasar seperti itulah, yang mendorong dan menugaskan saya selaku kader PKP INDONESIA di kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dalam posisi tugas sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk berada pada garda terdepan untuk memperjuangkan perlunya ketentuan kuota pelibatan peran perempuan dalam dunia politik, Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran PKP INDONESIA mulai tingkat daerah sampai tingkat nasional melalui peran Tim Penjaringan Anggota Legislatif yang telah bekerja secara maksimal untuk melahirkan susunan dan postur Caleg PKP INDONESIA secara nasional.

Tanya: Bagaimana dengan faktor kekuatan PKP INDONESIA dalam menjaring caleg perempuan.?

Jawab: *Berbicara mengenai kekuatan tentunya tidak lepas dari suatu kebijakan internal, dalam hal ini kebijakan yang terkait dengan penjaringan calon anggota legislatif, dimana PKP INDONESIA sudah konsisten terhadap peran perempuan dalam kiprahnya berpolitik dimana sejak kepemimpinan Almarhum Bp. Edi Sudradjat sendiri sudah menempatkan perempuan pada posisi yang strategis di dalam kepengurusannya, dan saya sendiri pada saat itu juga dilibatkan pada posisi sebagai anggota sekretaris jendral, dan faktor kekuatan tentunya juga tidak lepas dari visi, misi dan platform PKP INDONESIA, hingga pada saat berpulanginya Edi Sudradjat selaku ketua umum PKP INDONESIA ke rahmatullah pada awal Desember 2006, secara tidak langsung berpengaruh terhadap seluruh jajaran partai secara nasional. Meski roda organisasi tetap berjalan di bawah kendali Wakil Ketua Umum, Haris Sudarno, namun dalam rangka menghadapi pemilu 2009 jajaran partai secara nasional memandang bahwa perlu adanya figur nasional yang dapat menjadi motor penggerak seluruh jajaran partai, yang diyakini dapat membawa PKP INDONESIA ke pintu gerbang kesuksesan sebagaimana amanat cita-cita kelahiran. Atas dasar pertama aspirasi jajaran partai mulai dari pendukung nasional sekaligus pendiri partai Bapak Try Sutrisno, jajaran DPN PKP INDONESIA dan para perwakilan DPP-DPP PKP INDONESIA secara informal; kedua koordinasi dan konsultasi para pimpinan partai baik yang bersifat formal maupun non formal; ketiga sandaran aturan partai yang termuat dalam AD/ART; serta keempat kesediaan kader yang diminta memimpin partai maka akhirnya melalui Rapat Pleno DPN PKP INDONESIA dan MUSPIMNAS IV PKP INDONESIA pada Januari 2008 akhirnya memilih saya sebagai pengganti antar waktu ketua umum DPN PKP INDONESIA masa bakti 2005-2010. kemudian faktor kekuatan lainnya adalah adanya*

revitalisasi organisasi PKP INDONESIA yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan UU no.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU no.10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota legislatif antara lain pemenuhan keterwakilan 30 persen perempuan pada pengurus partai dan juga penjaringan calon anggota legislatif perempuan. Faktor kekuatan yang juga menjadi tolak ukur PKP INDONESIA adalah infrastruktur hasil dari pemilu 2004 dimana PKP INDONESIA pada urutan 10 dengan perolehan suara sebesar lebih dari 1,4 juta yang menghasilkan 1 kursi DPR, 9 kursi DPRD dan 244 kursi DPRD kabupaten/kota.

Tanya: Bagaimana kendala PKP INDONESIA berkaitan dengan penjaringan caleg perempuan.?

Jawab: *Sebenarnya masalah kendala dalam penjaringan perempuan di PKP INDONESIA tidak begitu sulit dalam proses penjaringannya hanya umumnya perempuan yang masuk partai biasanya tidak begitu aktif, mereka kaum perempuan harus selalu di beri pendidikan politik agar bisa lebih tahu kapasitas dan posisi dia di tengah masyarakat dan biasanya faktor kendala lainnya adalah pertama kesiapan diri perempuan sendiri untuk mengembangkan kualitas, kapasitas dan kompetensinya memasuki dunia politik; kedua belum menonjolnya peran kepemimpinan perempuan untuk meraih dukungan dari pemilih dan ketiga budaya patriarki yang memarjinalkan perempuan di ranah publik; keempat adalah domestifikasi peran perempuan dalam berbagai aktivitas keseharian juga membuat perempuan tidak pernah terlibat aktif dalam berbagai kegiatan politik*

Wawancara dengan Haidar H.S

- Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan PKP INDONESIA
- Ketua Tim Penjaringan Calon Legislatif (TPC) DPR RI PKP INDONESIA

Tempat : Rumah Kediaman
Komplek Perumahan Mas Naga
Kalimalang Jalan Borobudur
Jakarta Timur

Hari/Jam : Rabu, 20 Mei 2009 / 11.00 WIB.

Tanya: Sebelumnya apa yang menjadi latar belakang Bp. Haidar terlibat dalam partai politik?

Jawab: *Awalnya adalah pada saat itu sebenarnya karena saya aktif di Resimen Mahasiswa kemudian dikenal juga oleh Almarhum Bp. Edi Sudrajat karena waktu itu Beliau juga sebagai pembina Menwa dan kemudian pada saat beliau membentuk PKP pada saat itu mengajak saya untuk bergabung pada kepengurusan di partai politik tersebut.*

Tanya: Kemudian bagaimana perkembangan PKP INDONESIA dalam keterlibatannya dalam pemilu?

Jawab: *Keterlibatan PKP INDONESIA mulai terlibat sejak Pemilu 1999 dimana pada saat itu masih menggunakan nama PKP dan kemudian pada Pemilu 2004 mengikuti dengan berubah nama menjadi PKP INDONESIA karena pada pemilu 2004 kita tidak lolos electoral threshold (ET) dan pada Pemilu 2009 PKP INDONESIA kembali ikut dengan nomor urut tujuh (7).*

Tanya: Bagaimana Kebijakan dan langkah yang dibuat PKP INDONESIA berkaitan dengan proses penjaringan caleg perempuan?

Jawab: *Mengenai kebijakan tentunya waktu itu pada Rapat Pleno DPN, Ibu Ketua Umum yaitu Ibu Meutia Hatta memberikan arahan dan langkah yang kemudian hal ini diteruskan melalui Ketua Bidang masing-masing untuk disampaikan ke Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) dan selanjutnya hingga Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK), dan arahan dari beliau yang utama berkaitan dengan penjaringan caleg adalah perlu segera dibentuk Tim khusus yang bertugas menjaring caleg, dan akhirnya dibentuklah Tim Penjaringan Calon Anggota Legislatif (TPC) yang kemudian melalui rapat fungsionaris setelah rapat pleno disepakatilah saya menjadi ketua tim tersebut.*

Tanya: Bagaimana Strategi PKP INDONESIA dalam menjaring caleg perempuan ?

Jawab: *Strategi adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan agar tercapai tujuan yang diinginkan dengan melakukan sesuai pedoman yang dibuat, dan setiap partai menurut saya harus mempunyai strategi, dan strategi*

yang dilakukan PKP INDONESIA berkaitan dengan perekrutan caleg khususnya caleg perempuan adalah dengan mengacu pada visi, misi dan landasan perjuangan PKP INDONESIA yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.

Tanya: Bagaimana langkah-langkah strategi yang dibuat berkaitan dengan merekrut caleg perempuan ?.

Jawab: *Langkah-langkah strategi yang saya lakukan bersama Tim Penjaringan Caleg adalah pertama mendata semua pengurus yang aktif pada DPN dan kemudian menghubungi dan menawarkan kepada seluruh jajaran yang duduk sebagai pengurus untuk masuk menjadi caleg PKP INDONESIA Pada pemilu 2009, kedua melalui fungsionaris dari pusat hingga ke propinsi untuk menjaring calon anggota legislatif dan di harapkan perempuannya berimbang dengan laki-laki, ketiga kepada simpatisan atau pengurus partai lain yang mau pindah ke PKP INDONESIA yang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk menjadi caleg, khususnya caleg perempuan, dan untuk tingkat propinsi dan kabupaten menyesuaikan dengan strategi yang dibuat di pusat.*

Tanya: Kemudian Bagaimana Bapak sebagai ketua Tim menjaring caleg yang masuk kemudian menempatkan caleg perempuan secara proporsional memenuhi tiga puluh persen?

Jawab: *Pada awalnya setelah melalui strategi yang dilakukan maka pendaftaran yang masuk pada awalnya berjumlah empat ratus lima belas (415) pendaftar, kemudian dari situ yang berkas yang masuk ada tiga ratus enam puluh lima (365) berkas, dan setelah melewati proses seleksi dan kelengkapan maka caleg yang siap dan bisa mengikuti pemilu legislatif pada 9 april 2009 berjumlah tiga ratus lima belas (315) dan dari situ seratus empat puluh dua (142) caleg adalah perempuan, dan caleg yang masuk umumnya sudah melalui proses seleksi serta umumnya sudah sarjana walau persyaratan minimal adalah smu.*

Tanya: Bagaimana dengan faktor kekuatan PKP INDONESIA dalam menjaring caleg perempuan?.

Jawab: *Kekuatan PKP INDONESIA adalah pada infrastruktur yang telah terbangun sebelumnya hingga dalam proses menjaring caleg khususnya caleg perempuan tidak begitu mengalami kesulitan dan dimana Ketua Umum partai ini kan dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan, maka sebisa mungkin kita harus dapat memenuhi keterwakilan perempuan sesuai dengan amanat Undang-Undang yaitu tiga puluh persen (30%), dan akhirnya kita bisa menjaring caleg perempuan hingga empat puluh lima koma nol delapan persen (45,08%).*

Tanya: Kemudian kendala PKP INDONESIA dalam menjaring caleg perempuan ?

Jawab: *Kendala kita dalam menjaring caleg perempuan untuk tingkat pusat tidak begitu sulit tapi kalo di daerah agak sulit karena banyak perempuan yang tidak tertarik masuk ke partai politik dan menjadi caleg.*



Wawancara dengan Eni Busiri

- Dewan Penasehat bidang Perempuan PKP INDONESIA
- Ketua Wanita Legiun Veteran Republik Indonesia

Tempat : Kantor LVRI
Plasa Semanggi Lt.11
Jl. Gatot Subroto
Jakarta Pusat

Hari/Jam : Selasa, 19 Mei 2009 / 12.30 WIB

Tanya: Bagaimana latar belakang keterlibatan Ibu dalam bidang politik ?

Jawab: Untuk diketahui, ketertarikan saya dalam dunia politik tidak begitu saja terlibat, artinya setelah begitu lama mengeluti, awal2 pada saat masih muda selalu hadir pada setiap kegiatan organisasi pada saat itu belum ada politik krn menurut saya hal itu perlu untuk diketahui kemudian pada jaman penjajahan sudah bergabung dengan organisasi kepanduan belanda dan pada saat SMP mulai bergabung dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) dan itu semua terus berlanjut sampai akhirnya saya jadi mamusia dewasa dan mengetahui bahwa banyak tantangan yang dihadapi oleh perempuan di segala aspek kehidupan, katakanlah pada saat saya merasa benar-benar perlunya seorang istri untuk ikut berkiprah pada saat saya menikah dengan seorang tentara, tapi itu semua tergantung dari diri dan motivasi masing-masing, bila kita sebagai seorang istri tidak ikut aktif terlibat ya tidak ada apa-apa yang dihasilkan, misal istri seorang komandan tentara bila dia tidak terlibat, maka apa yang terjadi dengan anak buah suaminya juga tidak tahu, kemudian setelah saya meningkat menjadi perempuan yang betul-betul perempuan dewasa dan tahu betul apa yang be somebody kamu harus terjun langsung dan waktu itu saya terpilih menjadi ketua umum kongres wanita Indonesia, dan itu jelas meminta kepiawaian dari seseorang. karena ia jelas bukan fungsionir, maksudnya ikut apa kata suami atau jabatan suami, tetapi di Kowani tidak dan saya betul-betul tertantang, dan saya 15 tahun disana, yaitu 10 tahun sebagai Ketua dan 5 Tahun sebagai ketua Umum dan saya juga merangkap di DPP Golkar dan waktu itu tidak ada partai lain alias belum banyak jadi saya pikir biarlah saya aktif Golkar, dan pada saat itu saya seperti merasa gampang dan tidak ada saingan, tetapi ternyata tidak segampang yang saya duga apalagi waktu itu ada kompetisi katakanlah untuk menjadi anggota dewan tidak semudah yang saya kira dan waktu itu saya sudah sendiri alias saya sudah janda, karena suami meninggal dan suami meninggal jabatan terakhir sebagai Gubernur Irian disamping sebelumnya banyak jabatan suami yang diembannya dan kemanapun suami dinas saya selalu ikut aktif dalam organisasi nah itulah yang membentuk diri saya disamping pengalaman masa lalu saya pada organisasi menjadikan saya tetap eksis sampai saat kini.

Tanya: Bagaimana keterlibatan ibu dalam PKP INDONESIA ?

Jawab: *saya mengenal Almarhum Bp. Edi sudah sejak lama dimana beliau juga sama-sama berkarir di Angkatan darat dengan almarhum suami saya, dan pada saat Almarhum Bp. Edi mendirikan PKP pada saat itu, kurang lebih pada saat saya masih menjabat sebagai Ketua Kowani. Pada saat era setelah reformasi dimana pada saat Bp Habibie menjabat sebagai Presiden menggantikan Almarhum Bp. Soeharto, saya diajak langsung untuk mendirikan PKP dan saya pada saat itu juga duduk sebagai salah satu ketua, dan tentunya posisi saya pada saat itu juga banyak tantangannya, dimana masih banyak kaum laki-laki yang masih memandang peran perempuan dianggap kurang maksimal atau malah bisa jadi menjadi suatu saingan baru, dan saya pada saat itu juga melihat bahwa setiap kegiatan peran perempuan masih kurang makanya saya membuat himbauan agar dalam setiap kegiatan harus dipimpin oleh seorang perempuan. Kemudian pada saat kepemimpinan Ibu Meutia masuk sebagai pemimpin, peran perempuan dalam kepengurusan lebih terlihat dan jumlah yang masuk sebagai pengurus ataupun caleg perempuan juga meningkat.*

Tanya: Bagaimana pendapat Ibu dengan adanya UU yang mengatur keterlibatan perempuan dalam partai politik dan pemilu sebanyak tigapuluh persen (30%) ?

Jawab: *Menurut saya sebenarnya tidak perlu dibuat tiga puluh persen (30%) karena seakan-akan perempuan sudah dikotak-kotakan, maksudnya diberi jatah, tapi bila melihat perkembangan politik dan peran saya dalam politik, apalagi posisi perempuan yang terlibat dalam politik masih sedikit, ditambah masalah yang banyak dihadapi umumnya pada kaum perempuan, maka mau tidak mau keterlibatan perempuan dalam partai politik perlu ditingkatkan. agar bila mereka kaum perempuan bisa sampai kursi di legislatif dan bisa memperjuangkan kaum perempuan pada khususnya.*

Tanya: Bagaimana peran Ibu selaku Dewan Penasehat pada PKP INDONESIA ?

Jawab: *Peran saya biasanya lebih banyak pada pemberian saran dan pikiran berkaitan dengan perkembangan dan aktifitas partai kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan visi, misi dan perjuangan partai, tapi penyampaian berkaitan kebijakan dan strategi partai diserahkan sepenuhnya kepada Ibu Ketua Umum. Serta peran secara khusus juga memberikan motivasi dan dukungan sepenuhnya kepada kaum perempuan yang telah terlibat dalam kepengurusan dan caleg nya, berupa arahan bagaimana seharusnya posisi perempuan dalam bidang politik sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan.*

Tanya: Menurut Ibu Bagaimana faktor kekuatan PKP INDONESIA dalam menjaring caleg perempuan ?

Jawab: *yang menjadi kekuatan kaum perempuan mau terlibat dalam PKP INDONESIA tentunya adalah peran figur Ibu Ketua Umum sebagai salah*

satu kekuatan dalam menjaring kepengurusan dan caleg, kemudian juga faktor kekuatan lainnya adalah juga telah lama sejak partai ini berdiri posisi perempuan telah mulai diperhatikan dimana juga posisi perempuan pada partai ini sudah didudukkan pada posisi yang tinggi dan dalam setiap kegiatan peran perempuan pada posisi sebagai ketuanya.

Tanya: Kemudian faktor kendala dalam menjaring caleg perempuan ?.

Jawab: *masalah kendala dalam penjaringan caleg perempuan adalah kurang siapnya mereka, dan kurang percaya diri yang ada pada mereka kaum perempuan, maka itulah salah satu tugas kita sebagai dewan penasehat bersama ketua bidang bahwa masalah perempuan mendorong kaum perempuan tersebut untuk aktif dan punya peran. dan faktor lainnya juga adalah masih terhambatnya posisi perempuan yang terlibat dalam partai karena awalnya keluarga atau para suami mengizinkan tapi setelah berjalan, dan mau mulai aktif, mereka umumnya jadi mau mundur lagi, nah hal-hal seperti ini yang terkadang masyarakat masih melihat bahwa perempuan yang terlibat dalam partai adalah atau perempuan yang terlibat dalam politik adalah perempuan yang melupakan dan meninggalkan kodratnya sebagai seorang perempuan. Dan akhirnya saya lihat bahwa perempuan yang menjadi caleg di PKP INDONESIA masih ada yang kurang berkualitas, ..gimana nga berkualitas karena yang masuk saya melihat seperti masih muda dan keponakan si ibu atau bapak ini...., atau adik dari ibu ini atau saudara...., dan sebagainya dan untuk hal ini juga masih ada yang perlu punya pengalaman politik atau perlu adanya pendidikan politik, apalagi bila hanya untuk memenuhi persentase sesuai dengan Undang-Undang.*

Wawancara dengan Chusnul Mari'yah

• Pengajar pada Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Politik FISIP
Universitas Indonesia

• Aktivistis Perempuan

• Pengamat Politik Perempuan

Tempat : Rumah Kediaman
Perumahan Nuansa Kelapa Dua
Depok

Hari/Jam : Sabtu, 30 Mei 2009 / 09.00 WIB

Tanya: Bagaimana anda melihat persoalan perempuan dalam politik ?

Jawab: *Kelihatannya masih sangat sulit ke depan. Pertama, yang saya lihat hampir semua parpol sekarang berbicara akan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Jadi masih menjawab pertanyaan "apa", tetapi tidak satupun berbicara "bagaimana caranya", "kapan akan ditingkatkan". Itu tidak ada. Pada saat saya menanyakan kuota dan sebagainya umumnya belum semua parpol dengan berani melakukannya. Padahal kalau saya berbicara soal affirmative action yang mekanismenya dengan kuota, itu adalah strategi sementara untuk mengurangi hambatan perempuan masuk ke politik.*

Tanya: Bila orang hanya bicara soal kualitas, dan standar yang ditetapkan tidak berperspektif gender, apakah perempuan akan pernah sampai ke sana?

Jawab: *Tidak akan. Apalagi kalau disuruh berkompetisi model pasar bebas. Ini sangat tidak seimbang. Ada konstruksi social dimana perempuan hidup dalam sosialisasi patriarkhal sehingga posisinya subordinat. Belum lagi cap-cap yang dilekatkan, seperti "bukan perempuan baik-baik" bila mereka memperjuangkan sesuatu. Kita membuat Negara dengan tujuan supaya pasar tidak memakan semua. Jadi Negara berkepentingan mengatur antara pasar dan kepentingan publik. Affirmative action bukan berarti menisbikan kualitas. Di India kursinya dibiarkan kosong bila tidak ada anggota legislatif perempuan yang berkualitas. Jadi tidak berarti siapa pun bias duduk di situ. Itu adalah proses untuk mencapai target critical mass.*

Tanya: Jadi mana yang lebih baik, kuantitas, atau kualitas ?

Jawab: *Dua-duanya. Orang selalu omong kuantitas gak perlu. Akan tetapi menurut saya perlu, karena dalam proses pengambilan keputusan critical mass menjadi amat penting. Itu makanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentukan kuota 30 persen untuk jumlah perempuan di kursi-kursi pengambilan keputusan nasional dan telah berjalan dengan baik di Norwegia. Dengan banyaknya perempuan disitu, ia akan lebih percaya diri. Bila sendirian, ia akan tergulung dalam mekanisme proses yang maskulin. Ada perempuan anggota legislatif yang mengatakan "Kami sudah ditempatkan sangat terhormat. Tidak ada masalah." Saya bilang, "Yang kita bicarakan disini bukan Ibu, tetapi konstituen*

perempuan, kepentingan mereka, isu-isunya". Mengapa anggota DPR kita bersikap demikian? Itu karena system politik kita sangat partisan. Artinya anggota-anggota DPR itu bertanggung jawab pada parpol, tidak kepada konstituennya, kepada rakyat. Makanya system distrik sebenarnya menjadi lebih baik. Sekarang semua partai bicara soal nasional. Semua urusannya Jakarta. Kasus daerah operasi militer (DOM) di Aceh, Timtim, kasus kekerasan di aceh, Sambas, Irian, tidak banyak dikemukakan. Saya perlu menegaskan lagi bedanya isu dan perspektif gender. Pada perpektif mungkin isunya sama, tetapi karena pengalaman perempuan berbeda dari laki-laki pengambilan keputusannya juga berbeda. Soal pekerjaannya misalnya, perempuan lebih mungkin mempunyai kebutuhan mendapatkan pekerjaan yang flexible, bukan permanent karena adanya beban yang berganda-ganda.

Tanya: Contoh Norwegia yang terlalu berbeda dari Indonesia ?.

Jawab: Bangladesh juga menyediakan kursi untuk perempuan dengan menyediakan 35 dari 135 kursi. Itu affirmative action. Di India angkanya 35 persen dan itu masuk ke dalam amandemen konstitusinya. Norwegia merupakan contoh spektakuler tentang peran politik perempuan, dengan kuota 30 persen. Contoh spektakuler penting dan bukan Amerika yang kita pakai. Namun, yang menarik pada Amerika ada ditingkat Negara bagian. Ada country government, ada local government. Di situ peran perempuan luar biasa. Mereka bias menjadi walikota atau anggota dewan kota. Semuanya local. Mengapa ?. perempuan merasa lebih nyaman berbicara dalam tingkatan basis kehidupan sehari-hari. Masalah sampah, pendidikan, air, itu sebagian kecil masalah lokal yang langsung berhubungan dengan kepentingannya dan semua itu masalah politik. Juga lebih mudah buat perempuan untuk aktif karena tidak harus meninggalkan peran domestiknya. Karena itu, menurut saya, perempuan Indonesia tidak harus berperan hanya ditingkat DPR Pusat, tetapi di setiap tingkat institusi politik, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, semua penting, supaya perempuan terlibat dalam setiap tingkatan pengambilan keputusan politik.

Tanya: Bagaimana pendapat Ibu mengenai Strategi yang harus dilakukan dan langkah-langkah kongkrit partai politik dalam menjaring caleg perempuan ?.

Jawab: Strategi partai politik dalam menjaring caleg perempuan umumnya masih ada yang dilakukan dengan cara seperti membuka lowongan pekerjaan yaitu dengan "dibutuhkan atau dibuka calon anggota legislatif khususnya perempuan". Parpol mengatakan memberi kesempatan perempuan untuk jadi caleg, tetapi katanya perempuan tidak siap dengan berbagai alasan.....

Tidak transparan. Tidak pernah terjadi dialog untuk apa perempuan masuk ke politik. Ini hanya by product, "Oke perempuan mau masuk, ya masuk saja.". Kenapa tidak dari awal? Kalau memang punya perspektif gender harus dari awal, secara sadar (by design) disiapkan. Bukan

kemudian by product baru diomongkan, misalnya untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang sedang diperbaiki, sejak awal dirancang 40 persen harus diberikan kepada perempuan. Yang lalu hanya 10 persen, sementara yang paling miskin adalah perempuan. Jadi menurut pendapat saya berbicara strategi terutama berkaitan dengan menjaring caleg perempuan adalah pertama tetapkan tujuan yang jelas dan terukur mengenai konsep gender, kedua definisikan target citra yang akan dikehendaki dimata kaum perempuan yang berminat masuk ke ranah politik, ketiga analisa kekuatan dan kelemahan mengenai caleg perempuan dan keempat definisikan isu, pesan, target sasaran dan sarana komunikasi yang tepat. Kemudian langkah-langkah kongkretnya tentunya harus dimulai dengan berani dari Ketua umumnya dalam memberikan arahan kepada Tim yang disusun secara khusus yang bertugas melakukan proses penjaringan dan seleksi caleg, nah arahan itu tentunya adalah bahwa dengan mengacu pada Undang-Undang maka keterwakilan perempuan pada parpol dan bakal caleg harus diimplementasikan.

Tanya: Bagaimana langkah-langkah strategi partai politik dalam menjaring caleg, khususnya dalam hal ini caleg perempuan ?.

Jawab: *Langkah-langkah strategi perlu dibuat oleh setiap partai karena melihat juga bahwa partai juga punya pesaing yang juga mereka sama-sama melakukan hal intens, sementara itu cara pandang simpatisan melihat bahwa apakah partai yang saya pilih bila saya masuk menjadi caleg bahwa perjuangan saya dapat terpenuhi, dan berbagai alasan lainnya juga banyak dikemukakan dalam masyarakat, tapi biasanya para caleg yang masuk tidak lagi melihat kepentingan masyarakat dan umumnya mereka lebih melihat bagaimana saya dapat meraih suara sesuai target.*

Tanya: Bila hanya sedikit perempuan masuk ke politik, apakah karena masih melihat politik itu kotor?.

Jawab: *Itu hasil sosialisasi selama ini. Perlu proses untuk membawa perempuan masuk ke politik. Norwegia perlu 10 tahun untuk sampai pada keadaan itu. Kita baru tahun 1998 mulai berteriak-teriak. Selama ini lebih inward organization dengan practical interest nya. Sejak Mei tahun 1998 kita sudah bicara dengan level politik dan mengatakan secara terbuka kita ingin affirmative action. Kita tidak bisa mengharapkan saat ini juga harus ada (makin banyak perempuan duduk di kursi legislatif), apalagi pemilu disiapkan hanya dalam waktu satu tahun maksudnya pada pemilu 1999. Belum lagi pimpinan-pimpinan parpol yang masih tidak atau belum punya perspektif gender. Jade persoalannya ada di dua titik. Perempuan sendiri masih menganggap politik itu kotor karena ada korupsi, main sikut-sikutan dan harus punya banyak uang, sementara masih banyak sekali perempuan miskin. Disisi lain, dukungan dari parpol dan para pimpinannya juga masih sangat kurang, tapi untuk Pemilu 2009 saya lihat pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya yaitu dari mulai-mulai UU RI No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU RI No. 10 tahun*

2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD walau dalam hal ini saya rasa masih agak kurang tapi secara perjuangan sudah cukup berarti.

Tanya: Sebetulnya konsep politik yang dianggap netral itu tidak netral atau bias gender, begitukah ?

Jawab: *Ya, sangat bias gender. Parpol menolak yang diperjuangkan adalah perempuan. Parpol mengatakan yang diperjuangkan adalah rakyat...yang kita perjuangkan demokrasi, selalu begitu. Pada saat yang sama, ada kelompok warganegara dewasa perempuan yang jumlahnya begitu besar, dipingirkan dari proses pengambilan keputusan. Itu bukan demokrasi.*

Tanya: Bagaimana membentuk *critical mass*, padahal yang harus dipengaruhi adalah kebijakan public?

Jawab: *Karena tidak banyak organisasi perempuan yang bergerak di tingkat strategis gender, artinya berusaha mempengaruhi satu kebijakan politik, mencari alternatif agar perempuan bias comfortable di situ, agar kepentingan dan perspektif perempuan masuk, jadi alternatif kebijakan. Selama ini organisasi perempuan biasanya bergerak di bidang kepentingan praktis gender. Kalau mengurus masalah kekerasan, yang dilakukan pendamping korban. Tidak langsung masuk ke satu kebijakan di DPR, advokasi disana dan akhirnya keluar satu UU tentang masalah itu. Bila melihat perempuan miskin, yang dilakukan bagaimana meningkatkan pendapatannya, tetapi tidak bertanya kepada perempuan miskin. Jadi direbut kebijakannya. Hal sama juga dilakukan organisasi perempuan saat Indonesia merdeka. Situasinya sulit saat itu. Lalu yang dilakukan membuka koperasi perempuan, membuka rumah sakit ibu dan anak,*

Tanya: Apakah tidak sulit karena perspektif dari beberapa partai tampak amat berbeda mengenai masalah perempuan ?

Jawab: *Justru harus dikumpulkan. Mungkin perspektifnya memang lain, tetapi secara biologis mereka punya hal yang sama. Isu kanker leher rahim, kanker payudara, kesehatan reproduksi, bisa kena semuanya.*

Tanya: Tetapi bila bicara soal kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, misalnya, bisa sangat berbeda sudut pandangnya ?

Jawab: *Ya, tetapi harus dimulai kan. Dibukanya wacana belajar, kalau tidak, mereka tidak tahu ditambah nanti ada hubungan dengan kelompok penekan (yang berada diluar) yang terus berbicara dengan women caucus. Jadi kita tidak hanya berbicara dengan parpol. Dengan begitu, seluruh kelompok perempuan di Indonesia harus bicara. Dengan women caucus ini kemudian ada hubungan antara perempuan yang duduk di DPR dengan konstituen-nya.*

Tanya: Anda sendiri akan berada dimana?

Jawab: *Posisi saya ...saya lebih suka masuk ke kelompok penekan atau interest group yang nantinya bisa masuk ke semua partai untuk kepentingan perempuan. Yayasan Selendang Lila misalnya (yang ia bentuk bersama Myra Diarsi) bisa berperan menjadi kelompok menengah, antara yang ditingkat akar rumput dengan kelompok diatas, atau mengkonseptualisasikan yang dibawah untuk mengadvokasi pemerintah dan parpol.*

Tanya: Bagaimana dengan kebijakan suatu partai dalam menjaring para caleg, khususnya caleg perempuan ?

Jawab: *Biasanya suatu kebijakan dalam partai politik sudah sudah tertuang dalam suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan kewenangan kebijakan harus dibuat oleh suatu Dewan Pimpinan dimana Dewan tersebut merupakan badan yang tertinggi dan umumnya bersifat kolektif. Tapi terkadang dalam pelaksanaannya biasanya para elit partai yang merasa punya keinginan pribadi dan ingin menonjol sendiri, mentang-mentang punya pengaruh maka terkadang kebijakan tersebut cenderung bersifat individu, dan inilah yang membuat suatu konflik internal dalam partai itu sendiri muncul.*

Tanya: Bagaimana pendapat Ibu mengenai PKP INDONESIA yang telah berhasil mencapai proporsi keterwakilan perempuan?

Jawab: *kalau menurut saya bahwa jumlah caleg perempuan di PKP INDONESIA sampai melebihi kuota keterwakilan perempuan, itu karena secara kebetulan Ketua Umumnya Perempuan dan apalagi Beliau seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan, jadi setiap kebijakan yang dibuat oleh beliau mau tidak mau pengurus atau Tim yang telah dibentuk akan berusaha untuk menempatkan melibatkan perempuan dalam bakal caleg, jadi kalau boleh saya simpulkan tentunya faktor Figur masih menjadi suatu yang dominan disamping tentunya Infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya.*

Tanya: Kembali ke soal kualitas dan kuantitas. Banyak pihak menekankan soal kualitas?

Jawab: *Sebenarnya ukuran kualitas sendiri membingungkan. Setiap kali kita bicara mengenai perempuan masuk ke dalam dunia politik, selalu dipojokkan dengan kualitas. Kenapa tidak hal yang sama diberlakukan kepada laki-laki? Ada ketidakadilan disitu. Yang sebenarnya menjadi persoalan adalah ideologi yang sebagian diterjemahkan dalam kehidupan politik sehari-hari, ya itu tadi sistem politik yang maskulin. Artinya, norma, nilai, cara kerja, mekanisme kerja yang ada di dalam satu sistem atau di dalam parpol, seringkali disesuaikan dengan gaya hidup pria. Teori demand(kebutuhan). Supaya norma, nilai, mekanisme kerja di dalam dunia politik diubah sehingga perempuan bisa comfortable masuk ke dunia itu, dan bagaimana pikiran perempuan dibutuhkan dalam*

memecahkan berbagai persoalan. Dengan pergeseran dari supply ke demand ini jangan berpikir kita akan memarjinalkan laki-laki. Bukan itu, kita ingin memberikan kontribusi untuk memecahkan persoalan bangsa ini yang komposisinya mayoritas perempuan.

Tanya: Kata “dibutuhkan” itu sendiri kemudian tergantung pada orang lain. Bila mereka bilang tidak membutuhkan?

Jawab: *Siapa yang bilang tidak butuh? Laki2. Ya..ya memang bisa juga seperti itu. Tetapi kan memang kita bisa masuk ke politik riil, misalnya mengenai isu perkosaan, soal hak reproduksi, masalah upah yang tidak setara pendidikan dan ketidakadilan di berbagai bidang, masalah kekerasan terhadap perempuan dan lain-lain. Jadi ada dua alasan. Masalah biologis yang memang membedakan antara perempuan dan laki-laki, sedangkan kesetaraan upah adalah masalah sosial (gender). Jarang isu seperti ini dibicarakan di DPR. Misalnya lagi, KB mengapa sembilan puluh tiga persen (93%) akseptor perempuan ngak pernah dibicarakan di DPR. Padahal dari dua puluh (20) alat kontrasepsi lebih seratus persennya (100%) adalah alat kontrasepsi untuk perempuan. Laki-laki hanya kondom atau vasektomi. Itu politik tapi tidak diperdebatkan secara politik karena isu politik sendiri yang mendefinisikan laki-laki. Akhirnya kasus kekerasan dan perkosaan misalnya hilang begitu saja.*

Tanya : Jadi harus terus didengungkan apa yang sering dilihat sebagai masalah pribadi sebenarnya adalah isu politik ?.

Jawab: *Ya. Untuk memecahkan persoalan perempuan dan politik itu mereka mendiktekan kepada kita dengan cara ...”Buat dong Bu, partai politik perempuan.” Bila misalnya, saya tidak setuju dengan pernyataan Megawati mereka bilang..”Lho mengapa Ibu bisa berbeda dengan Megawati?”. Jawaban saya adalah kalau laki-laki bisa membuat 140 parpol, mengapa perempuan harus satu?. Kalau laki-laki boleh berbeda pendapat, kenapa kita tidak? Kita tidak boleh berbeda pendapat karena dianggap perempuan itu satu. Memang ada yang mempersatukan secara biologis perempuan sama, secara sosial perempuan tersubordinasi. Di situ kemudian muncul pengalaman perempuan sehingga muncul perspektif perempuan. Perempuan secara biologis belum tentu punya perspektif gender yang tidak dimiliki perempuan. Kita mendukung peningkatan kesadaran perempuan yang berkualitas melalui lobi, supaya mereka sadar ada banyak persoalan dalam banyak masalah perempuan. Banyak dari mereka masih menganggap masalah itu tidak penting.*

Tanya: Bagaimana dengan Kendala yang ada pada parpol dalam menjaring caleg perempuan?

Jawab: *Berbicara kendala partai politik dalam menjaring caleg yang perempuan bahwa kendala yang paling utama adalah dari diri individu perempuan itu sendiri kemudian hambatan yang ada adalah pertama hambatan politik artinya sistem pemilu masih belum transparan atau kalo melihat istilah dulu adalah LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia),*

kedua Hambatan ekonomi yaitu perjuangan hak-hak perempuan dan kemiskinan artinya bahwa bila perempuan terlibat bila secara ekonomi masih tergantung dengan suami atau laki-laki maka kebebasan masih semu dan apalagi persentase perempuan yang miskin masih banyak, ketiga ideologi dan psikologi secara budaya perempuan masih dianggap kaum perempuan yang maju masih dianggap tabu, kemudian intepretasi agama bahwa perempuan masih dianggap kaum lemah; peran media dan psikologi perempuan masih banyak menggunakan figur perempuan sebagai barang komoditi dan secara psikologi banyak perempuan yang kurang percaya diri



Wawancara dengan Ibu Yetty Ani Ethika

• Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Perempuan Dapil Jateng IX

Tempat : Lobby Hotel Cempaka

Kegiatan Muspimnas V PKP INDONESIA

Hari/Jam : Senin, 27 April 2009 / 18.30 WIB

Tanya: Sejauh mana Ibu mengenal dan terlibat dalam dunia Politik ?

Jawab: *Sebenarnya saya terjun ke dalam dunia politik belum lama, tetapi untuk mengenal politik itu sendiri, sejak saya duduk di bangku kuliah saya dan teman-teman juga sudah mulai terlibat dalam organisasi dan organisasi tersebut adalah suatu lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kegiatan sosial berupa membantu penyaluran bantuan pada masyarakat yang kena bencana terutama di lingkup daerah Jawa Tengah, dan mengenai sistem politik yang ada di Indonesia, sebenarnya saya belum begitu paham dan mengerti betul, apalagi sistem politik di Indonesia menurut pendapat saya, belum jelas arah yang mau dibawa, apalagi semenjak presiden Soeharto situasi politik di Indonesia berubah-ubah.*

Tanya: Maksudnya ?

Jawab: *Ya maksudnya adalah sejak presiden Soeharto turun dan digantikan siapa..ya... oya Habibie, malah semakin nga karuan, dan apalagi setelah pergantian presiden berikutnya sampai presiden sekarang, malah situasinya masih sama dan belum berubah, tidak seperti pada jaman Soeharto dulu yang tenang dan tidak ada bencana, kemudian harga-harga kebutuhan pokok masih murah.*

Tanya: Bagaimana awalnya Ibu bisa masuk ke PKP INDONESIA.?

Jawab: *Awal keterlibatan saya dengan PKP INDONESIA belum begitu lama tepatnya ya.. pada awal Januari 2008 dimana saya diajak oleh rekan dari suami saya dimana suami saya adalah seorang polisi, dan rekan suami saya tersebut adalah salah satu pengurus Dewan Pimpinan Propinsi PKP INDONESIA wilayah Jawa Tengah, dan sebelumnya saya masih ragu untuk bergabung tetapi setelah saya dimotivasi bahwa partai tersebut dipimpin oleh seorang perempuan dan beliau juga seorang menteri pemberdayaan perempuan serta putri dari proklamator yaitu Bung Hatta, maka saya langsung memutuskan untuk mau bergabung menjadi calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI.*

Tanya: Bagaimana Ibu memposisikan seorang caleg perempuan ?

Jawab: *Posisi saya sebagai caleg perempuan di PKP INDONESIA, sesuai dengan pemahaman yang saya dapatkan adalah tentunya berkaitan dengan amanah Undang-Undang tepatnya saya lupa pasal tapi yang pasti dalam Undang-Undang tersebut dikatakan, bahwa perlu adanya peran perempuan secara proporsional sebesar tiga puluh persen (30%), maksudnya jumlah perempuan caleg perempuan dalam caleg PKP*

INDONESIA harus sampai sejumlah tiga puluh persen, nah mengenai hitungannya saya belum mengerti.

Tanya: Bagaimana pengaruh perempuan pada PKP INDONESIA berkaitan dengan hasil Pemilu 2009 ?

Jawab: *Wah berbicara hasil saya belum yakin saya bisa dapat suara yang banyak tapi saya sudah berusaha dan untuk sampai saat ini hasilnya belum sesuai yang saya harapkan, apalagi persaingan pemilu kali ini cukup berat dimana partai besar lainnya juga melakukan kampanye yang cukup serius baik kampanye oleh caleg laki-laki ataupun caleg perempuan dari partai besar tersebut.*

Tanya: ya bu kembali ke PKP INDONESIA, menurut ibu apa yang menjadi kekuatan partai ini hingga dapat meraih caleg perempuan melebihi kuota tersebut?.

Jawab: *Kalo menurut saya tentunya ya faktor ketua umum, salah satunya karena beliau seorang perempuan dan juga seorang menteri yang pasti buat saya sebagai caleg perempuan sudah mengenal sosok ketua umum PKP INDONESIA, nah ini lah yang menjadi minat saya untuk masuk dan menjadi caleg, faktor lainnya karena partai ini juga bukan partai baru tapi partai yang saya dengan juga pernah dipimpin oleh almarhum bp Edi dimana dulu beliau juga seorang menteri yang menurut saya cukup bersih dalam karirnya.*

Tanya: Kalo faktor kendala dalam partai berkaitan penjaringan caleg perempuan?

Jawab: *kendala dalam penjaringan untuk partai ini mungkin menurut saya tidak ada, karena itu urusan para pengurus dalam mencari dan menjaring, tapi kalo perempuan yang terlibat dalam partai atau menjadi caleg adalah melihat pengalaman saya dimana ada rekan saya yang terlibat menjadi caleg, awalnya didukung oleh suami atau keluarganya tapi setelah banyak kegiatan yang akhirnya banyak meninggalkan keluarga, maka hal ini menjadi suatu keputusan yang sulit, hingga akhirnya membuat motivasi untuk lebih aktif dalam partai menjadi semakin berkurang dan keterlibatan di partai hanya sebagai sampingan yang tidak menjadi sesuatu yang serius, saya sendiri juga hampir mengalami hal yang sama, tapi memang berat posisi saya dimana saya juga terkadang harus meninggalkan keluarga tapi alhamdulillah keluarga saya bisa mengerti.*


Tanya: Bila Ibu dalam pemilu mendapat suara yang signifikan dan akhirnya lolos masuk menjadi parlemen, bagaimana pemahaman Ibu mengenai tugas seorang anggota legislatif?

Jawab: *hmmm.. kalo tugasnya saya belum mengerti sepenuhnya tapi sepengetahuan saya adalah sebagai anggota parlemen harus bisa*

memperjuangkan kaum perempuan dimana dalam hal ini masih banyak para perempuan yang masih dianggap sepele, terutama perempuan yang berada di tempat kerja, seperti pengalaman teman saya yang kebetulan perempuan yang bekerja, dimana dia pada suatu saat hamil, dan perusahaan dimana dia bekerja hanya memberikan ijin selama melahirkan hanya sebulan dan itupun gajinya masih dipotong setengahnya (1/2), jadi menurut saya bahwa posisi perempuan harus bisa diperjuangkan dan itu adalah salah satu tugas anggota legislatif.









Daftar peserta pemilu 2009 (Dok. Internal PKPI)

No. urut	Lambang dan nama partai	
1		<u>Partai Hati Nurani Rakyat</u>
2		<u>Partai Karya Peduli Bangsa</u>
3		<u>Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia</u>
4		<u>Partai Peduli Rakyat Nasional</u>
5		<u>Partai Gerakan Indonesia Raya</u>
6		<u>Partai Barisan Nasional</u>
7		<u>Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia</u>
8		<u>Partai Keadilan Sejahtera</u>
9		<u>Partai Amanat Nasional</u>
10		<u>Partai Perjuangan Indonesia Baru</u>
11		<u>Partai Kedaulatan</u>
12		<u>Partai Persatuan Daerah</u>
13		<u>Partai Kebangkitan Bangsa</u>
14		<u>Partai Pemuda Indonesia</u>

Lanjutan Lampiran 6.

No.urut	Lambang dan nama partai	
15		<u>Partai Nasional Indonesia Marhaenisme</u>
16		<u>Partai Demokrasi Pembaruan</u>
17		<u>Partai Karya Perjuangan</u>
18		<u>Partai Matahari Bangsa</u>
19		<u>Partai Penegak Demokrasi Indonesia</u>
20		<u>Partai Demokrasi Kebangsaan</u>
21		<u>Partai Republika Nusantara</u>
22		<u>Partai Pelopor</u>
23		<u>Partai Golongan Karya</u>
24		<u>Partai Persatuan Pembangunan</u>
25		<u>Partai Damai Sejahtera</u>
26		<u>Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia</u>
27		<u>Partai Bulan Bintang</u>
28		<u>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</u>

Lanjutan Lampiran 6.

No.urut	Lambang dan nama partai	
29		<u>Partai Bintang Reformasi</u>
30		<u>Partai Patriot</u>
31		<u>Partai Demokrat</u>
32		<u>Partai Kasih Demokrasi Indonesia</u>
33		<u>Partai Indonesia Sejahtera</u>
34		<u>Partai Kebangkitan Nasional Ulama</u>
41		<u>Partai Merdeka</u>
42		<u>Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia</u>
43		<u>Partai Sarikat Indonesia</u>
44		<u>Partai Buruh</u>